



LAPORAN PENELITIAN

PEMETAAN PEMILIH PEMULA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2014

KERJASAMA ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA**

SEMESTER GASAL TA 2012/2013

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

**Pemetaan Pemilih Pemula Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik
Pada Pemilu 2014**

Surabaya, 29 November 2012

Mengetahui :

Dekan



Basuki Nugroho
Drs. Basuki Nugroho, M.Si
NIP. 19570902 198603 1 001

Ketua LPM
Universitas Dr. Soetomo



Indra Wirawan
Ir. Indra Wirawan, M.Si
NPP. 90.01.1.062

Kepala UPT Perpustakaan



Bambang Eko Rusdianto
Drs. Bambang Eko Rusdianto
NPP. 85.01.2.027

ORGANISASI PENELITI

1. Judul Penelitian : **Pemetaan Pemilih Pemula Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2014**

2. Peneliti
 - a. Ketua Tim : Prof. Dr.Sarmini, M.Hum
 - b. Anggota Tim : 1) Drs. I.Wayan Nuada, M.Si
2) Sri Roekminiati, S.Sos. M.Kp
3) Januar Dwi Purwanto, S.Psi, M.Psi

3. Lembaga Pelaksana : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Surabaya dan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Dr. Soetomo

4. Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Tim Peneliti dapat menyelesaikan menyusun Laporan Akhir dari penelitian : **“Pemetaan Pemilih Pemula Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu 2014”**. Dengan penuh rasa hormat Tim Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Tim Peneliti melakukan penelitian lapangan di 3 kabupaten, meliputi Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Sampang. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada: (1) Opini pemilih pemula terhadap penyelenggaraan pemilu dan/atau pilukada yang mereka tahu selama ini, (2) Komitmen pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan/atau pilukada di masa mendatang, (3) Pola afiliasi politik pemilih pemula terhadap partai politik, (4) Harapan pemilih pemula terhadap : (i) partai politik, (ii) calon anggota legislatif, (iii) Calon Kepala Daerah, (iv) Calon Presiden dan Wakil Presiden, (5) Harapan pemilih pemula terhadap penyelenggaraan pemilu dan/atau pilukada yang akan berlangsung di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Akhir ini. Semoga apa yang kita laksanakan memberikan manfaat bagi kita semua, demi tercapainya keberhasilan Pemilu tahun 2014.

Surabaya, November 2012

Tim Peneliti

ABSTRAK

Jumlah *pemilih pemula* di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. *Pemilih pemula* yang ikut dalam *pemilu* 2009, berkisar 36 juta orang atau setara dengan 19-20% dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Secara umum bertujuan untuk mengetahui estimasi profil dan perilaku politik *pemilih pemula* di daerah lokasi penelitian.

Hasil penelitian, Estimasi proporsi *pemilih pemula* terhadap jumlah konstituen di Provinsi Jawa Timur pada *pemilu* 2014 sekitar 9,42% dari jumlah penduduk, setara dengan 14,01% jumlah konstituen. *Pemilih pemula* memiliki *partisipasi politik* yang relatif tinggi sehingga 18 - 20% dari pengguna hak pilih dalam *Pemilu* 2009 adalah *Pemilih Pemula*. Pola ini diasumsikan terjadi pada *pemilu* 2014. Komitmen Responden untuk menggunakan hak pilihnya pada *pemilu* dan/atau pemilukada di masa mendatang lebih dari 80%. Harapan Responden terhadap partai politik pemenang *pemilu*, calon anggota legislatif, Calon Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur), Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mereka pilih adalah ingin bebas dari KKN, lebih bertanggung jawab, memperjuangkan aspirasi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pihak pemberi referensi yang menjadi rujukan dalam melakukan pilihan politik dan/atau pertimbangan yang melatarbelakangi pilihan politik di kalangan *pemilih pemula* secara berurutan adalah : saran teman dekat, saran pacar, popularitas calon, saran saudara kandung, reputasi calon (yang diketahui dari media masa), tokoh (calon) yang menjadi idola, saran orang tua, saran guru dan dari partainya. Harapan pemilih pemula terhadap penyelenggaraan *pemilu* dan/atau pemilukada yang akan berlangsung pada tahun 2014 semoga berlangsung secara LUBER dan JURDIL, tidak ada politik uang, dan tidak ada manipulasi suara. Apapun adanya pemilih pemula cenderung akan menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi tersebut. Untuk itu pemilih pemula merupakan segmen konstituen yang perlu diberi pendidikan politik (program tertentu) sedemikian rupa sehingga partisipasi politiknya tidak hanya dipergunakan untuk mencari pengalaman politik yang pertama, namun pada *pemilu* periode tahun berikutnya tetap berkomitmen untuk menggunakan hak pilihnya.

Kata kunci : *pemilih pemula, pemilu, partisipasi politik*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat	6
1.4. Hasil Yang Diharapkan	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6. Kerangka Pemikiran	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Orientasi Politik	10
2.1.1. Budaya Politik	10
2.1.2. Komponen Budaya Politik	11
2.1.3. Obyek-obyek Orientasi Politik	12
2.2. Partisipasi Politik	13
2.2.1. Pengertian Partisipasi Politik	13
2.2.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	15
2.2.3. Tujuan Partisipasi Publik	22
2.3. Pemilihan Umum (Pemilu)	24
2.3.1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)	24
2.3.2. Tujuan Pemilihan Umum	25
2.3.3. Azas Pemilihan Umum	25
2.3.4. Sistem Politik Umum	26
2.3.5. Macam-macam Pemilihan Umum	29
2.4. Pemilih Pemula	29
2.5. Perilaku Memilih	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Lokasi dan Materi Penelitian	33
3.2. Rancangan Penelitian	33
3.3. Populasi dan Sampel	33
3.4. Jenis dan Sumber Data	34
3.5. Metode Pengumpulan Data	34
3.6. Metode Analisis Data dan Interpretasi Hasil Penelitian Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
4.1. Kabupaen Malang	36
4.1.1. Penduduk Kabupaten Malang Menurut Umur dan	

Jenis Kelamin	37
4.1.2.Penduduk Kabupaten Malang Menurut Lapangan Usaha.....	39
4.1.3.Penduduk Kabupaten Malang Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	40
4.2. Kabupaten Ponorogo.....	41
4.2.1. Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Umur dan Jenis Kelamin	43
4.2.2.Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha	44
4.2.3.Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	45
4.3Kabupaten Sampang	47
4.3.1. Penduduk Kabupaten Sampang Menurut Umur dan Jenis Kelamin	48
4.3.2. Penduduk Kabupaten Sampang Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	49
4.3.3.Penduduk Kabupaten Sampang Menurut Lapangan Usaha	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN	52
5.1.Prakiraan Jumlah Penduduk & Jumlah Pemilih Pemula serta Profil Pemilih Pemula di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014	52
5.2.Identity Responden	58
5.3.Sikap Responden Terhadap Pemilihan Umum Legislatif	60
5.4.Sikap Responden Terhadap Pemilihan Umum Eksekutif	71
5.5.Harapan Responden Terhadap Pemenang PEMILU.....	85
5.6.Profil dan Afiliasi Organisasi Kepemudaan	106
BAB VI PENUTUP	121
6.1.Kesimpulan	121
6.2.Rekomendasi.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Pemilih Pemula

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	16
Tabel 4.1.	Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Malang	37
Tabel 4.2.	Penduduk Kabupaten Malang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	38
Tabel 4.3.	Penduduk Kabupaten Malang 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2011	39
Tabel 4.4.	Persentase Penduduk Kabupaten Malang Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Dirinci Menurut Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011	40
Tabel 4.5.	Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Ponorogo	42
Tabel 4.6.	Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	43
Tabel 4.7.	Penduduk Kabupaten Ponorogo 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2011	44
Tabel 4.8.	Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011	46
Tabel 4.9.	Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Sampang.....	47
Tabel 4.10.	Penduduk Kabupaten Sampang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	48
Tabel 4.11.	Persentase Penduduk Kabupaten Sampang Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Dirinci Menurut Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011	49
Tabel 4.12.	Penduduk Kabupaten Sampang 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2011	50
Tabel 5.1.	Prakiraan Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut UmurTunggaldan Jenis Kelamin Tahun 2014	53
Tabel 5.2.	Prakiraan Proporsi Pemilih Pemula di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014Dari Jumlah Pemilih Menurut Jenis Kelamin dan Dari Total Pemilih	57
Tabel 5.3.	Umur dan Jenis Kelamin Responden.....	58
Tabel 5.4.	Status Pernikahan Responden.....	59
Tabel 5.5.	Jenjang Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Responden	59
Tabel 5.6.	Aktifitas Rutin Responden.....	60
Tabel 5.7.	Komitmen Responden Terhadap Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014	61
Tabel 5.8.	Calon Legislatif Asal Partai Yang Berencana Dipilih Oleh RespondenPada Pemilu Legislatif Tahu 2014	61
Tabel 5.9.	Sikap Responden Yang Punya Komitmen Ikut Memilih Terhadap Calon Legislatif Yang Tidak Dikenal Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014	63
Tabel 5.10.	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Legislatif Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014	68
Tabel 5.11.	Komitmen Responden Terhadap Pemilukada Bupati dan Wakil BupatiSesudah Tahun 2014	72

Tabel 5.12.	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Sesudah Tahun 2014 ...	72
Tabel 5.13.	Komitmen Responden Terhadap Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sesudah Tahun 2014.....	76
Tabel 5.14.	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilukada Yang Akan Datang	77
Tabel 5.15.	Komitmen Responden Terhadap Pilpres Pada Tahun 2014	81
Tabel 5.16.	Hal-Hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pilpres Yang Akan Datang.....	81
Tabel 5.17.	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Partai Pemenang Pemilu Tahun 2014 Yang Akan Datang	85
Tabel 5.18.	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Anggota Legislatif Yang Terpilih Pada Tahun 2014 Yang Akan Datang.....	89
Tabel 5.19.	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Yang Akan Datang.....	93
Tabel 5.20.	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Terhadap Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil gubernur, dan Presiden/Wakil Presiden Terpilih Pada Pemilu Yang Akan Datang.....	98
Tabel 5.21.	Afiliasi Pemilih Pemula Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) .	108
Tabel 5.22.	Afiliasi Pemilih Pemula Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) ...	109
Tabel 5.23.	Afiliasi Pemilih Pemula Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)	113
Tabel 5.24.	Afiliasi Pemilih Pemula Taruna Merah Putih.....	115
Tabel 5.25.	Afiliasi Pemilih Pemula Garda Pemuda NasDem	117
Tabel 5.26.	Afiliasi Pemilih Pemula Karang Taruna	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	9
Gambar 2.1. Piramida Partisipasi Politik	17
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Malang.....	38
Gambar 4.2. Peta Kabupaten Ponorogo	41
Gambar 4.3. Reog Kesenian Asli dari Kabupaten Ponorogo	42
Gambar 4.4. Peta Kabupaten Sampang	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan konsep yang banyak dipergunakan untuk mencapai tujuan dalam konteks kehidupan politik mulai sejak zaman Plato sampai politik kontemporer dewasa ini. Proses demokratisasi dalam konteks sosial politik membutuhkan proses yang cukup panjang. Pemahaman konsep demokrasi pun beragam, namun sesungguhnya konsep demokrasi ini dapat dilihat apakah suatu pemerintahan dapat dikategorikan sebagai lebih dekat ke sistem kehidupan bermasyarakat yang demokratis atau ke sistem kehidupan bermasyarakat yang otoriter.

Suatu pemerintahan disebut demokratis apabila memiliki tiga komponen, yakni: **Pertama**, kompetisi antar kelompok tidak berdasarkan kekerasan atau tidak menggunakan kekerasan dan kekuatan. **Kedua**, partisipasi penuh dari warga negara dewasa dalam pemilihan umum untuk menempatkan seseorang dalam jabatan-jabatan politik. Tidak boleh ada warga negara dewasa yang dimarginalkan dalam proses pengangkatan maupun pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan politik yang dimaksud. **Ketiga**, kebebasan warga Negara dan/atau kebebasan politik warga Negara. Dengan demikian demokrasi memiliki makna, seperti: kedaulatan rakyat, konsultasi publik, kesetaraan politik, dan ukuran mayoritas yang tidak mengarah pada tirani. Kemajuan praktek demokrasi di suatu negara ditandai oleh seberapa jauh rakyat dan aspirasi mereka menjadi perumusan kebijakan publik sekaligus referensi utama bagi setiap lembaga yang bertugas meramu kepentingan publik.

Mewujudkan negara yang demokratis adalah cita-cita besar bangsa Indonesia. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, berarti rakyatlah yang harus menjadi pusat “grafitasi” dari keseluruhan aktifitas politik yang berkaitan dengan pengaturan negara. Wujud dari proses demokrasi di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam proses pemilihan umum (PEMILU), dan partisipasi rakyat dalam PEMILU adalah hal yang mutlak diperlukan. Berhasil tidaknya penyelenggaraan PEMILU sangat tergantung pada suara mayoritas rakyat, karena suara rakyat ini yang akan

menentukan nasib bangsa ke depan. Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu. Pemilu pertama yang diadakan di Indonesia pada masa pemerintahan presiden Soekarno, pemilu yang diselenggarakan tahun 1955 ini menggunakan sistem multipartai dan dilaksanakan dengan dua tahap, tahap pertama untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua untuk memilih anggota konstituante. Pemilu tahun 1955 ini merupakan pemilu satu-satunya yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Lama.

Awal masa pemerintahan Orde Baru pemilu diadakan pada tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik tetapi pada pemilu-pemilu berikutnya hanya diikuti oleh 3 partai yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesi (PDI). PPP dan PDI adalah hasil gabungan partai politik yang dikalahkan oleh Golkar pada pemilu tahun 1971. Pada pemilu Orde Baru ini, rakyat hanya memilih partai politik dan kemudian partai politik yang akan mengutus wakilnya untuk duduk sebagai anggota MPR/DPR, sedangkan Presiden dan wakil dipilih oleh anggota MPR/DPR.

Pada Pemilu tahun 2004 terjadi perubahan dalam sistem pemilu, pemilu tahun 2004 yang lalu adalah pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sebelumnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipercayakan kepada anggota MPR/DPR, sedangkan pada pemilu 2004 rakyatlah yang berdaulat memilih dan menentukan figure pemimpin negara untuk jangka lima tahun kedepan. Dengan begitu, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih mempunyai basis legitimasi yang kuat dari rakyat, sekaligus menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan pada rakyat.

Belajar dari keberhasilan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berjalan dengan baik, aman dan damai serta bermodalkan niat dan itikad baik untuk menuju perubahan maka dilaksanakan pula pemilihan Kepada Daerah secara langsung yang lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dilaksanakan secara langsung setelah diterbitkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi atas Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Perubahan Pemilihan Kepala Daerah yang tadinya tidak langsung (dipilih oleh DPRD) menjadi dipilih langsung oleh rakyat merupakan suatu kemajuan

yang luar biasa bagi bangsa Indonesia dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.

Memilih figur pemimpin negara ataupun daerah secara langsung merupakan momentum yang sangat krusial bagi suatu negara untuk itu harus dibarengi dengan tingginya tingkat partisipasi politik rakyat. Dalam hal ini partisipasi yang diinginkan bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya tetapi yang terpenting bagaimana hak pilih tersebut dapat diimplementasikan dengan pilihan rasional dalam rangka memberikan yang terbaik untuk negara. Pelajar dan/atau remaja adalah sebuah komunitas yang cukup besar dan cukup diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap pemilu. Komunitas pelajar dan/atau remaja yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum disebut pemilih pemula atau pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Sebagaimana tertuang dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 UU no. 10 tahun 2008 merupakan dasar hukum siapa yang dapat dikategorikan sebagai pemilih pemula. **Pemilih Pemula** merupakan warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Pemilih pemula usia SMA memang menjadi segmen yang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu saja menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat. Sebenarnya pemilih pemula bisa ditempatkan sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologi tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat. Kondisi tersebut tampak jika merunut perilaku pemilih pemula pada beberapa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Jumlah pemilih pemula di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemilih pemula yang ikut dalam pemilu 2009, berkisar 36 juta orang atau setara dengan 19-20% dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Jumlah ini sangat signifikan

karena setara dengan 20% dari total jumlah kekuatan suara nasional. Menurut Lembaga Survei Indonesia potensi yang dimiliki pemilih pemula dapat dicontohkan sebagai berikut :

1. Dengan 20% suara akan membuat suatu partai baru bisa lolos *electoral threshold* pada pemilu tahun 2004 yang lalu, sehingga bisa lolos pada pemilu 2009. Begitu pula dengan pemilu 2009, potensi 20% suara akan membawa ke pemilu berikutnya.
2. Dengan angka 20% itu juga bisa mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Karena persyaratan mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presidenitu hanya mendapatkan lima persen total suara DPRD nasional atau tiga persen kursi DPR secara nasional.
3. Dengan 20% suara, bisa menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Indonesia.

Dari data diatas menunjukkan pemilih pemula adalah komunitas yang memiliki potensi untuk menyumbangkan suara dalam pemilu atau pemilukada. Namun, jika hanya sebatas ikut-ikutan datang ke TPS, dalam pandangan Gabriel Almond dalam bukunya Mas'ood (1993:42) partisipasi pemilih pemula model ini bisa dikatakan masih tergolong parokial atau dengan kata lain kontribusinya masih minim dalam mengawal dan menyehatkan sistem demokrasi. Supaya sistem demokrasi semakin baik, Gabriel Almond menilai dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula hingga level partisipan bahkan level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilu.

Pemilu merupakan pintu penting yang berfungsi menghasilkan pemimpin dan/atau perumus kebijakan terbaik yang akan membangun bangsa dan daerah serta menyejahterakan rakyatnya di masa mendatang. Pemilu adalah wujud implementasi kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pemilu merupakan mekanisme melakukan rotasi kepemimpinan yang relatif damai tanpa perlu melakukan kudeta bersenjata atau revolusi sebagaimana terjadi di negara-negara monarki, diktator, atau yang dikuasai rezim militer. Pemilu yang dilaksanakan dengan baik, yakni dengan LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil) merupakan tolok ukur kualitas berlangsungnya kehidupan demokrasi dan politik di suatu negara.

Pada tataran ini, pemilih pemula perlu memahami bahwa mewujudkan pemilu yang baik membutuhkan kerja sama dan partisipasi semua pihak. Pemilu memang melibatkan banyak pihak, mulai dari partai politik, masyarakat, calon anggota legislatif dan pasangan kandidat, panitia penyelenggara (KPU, PPK, KPPS), panitia pengawas, Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), Pemerintah dan Pemerintah Daerah, DPR dan DPRD, pemantau, saksi, pers, dan para pemilih sendiri.

Mengingat pemilih pemula secara kuantitas merupakan komunitas yang memiliki potensi untuk menyumbangkan suara dalam pemilu dan/atau pilukada, dan mengingat pemilih pemula merupakan komunitas yang memiliki keunikan perilaku politik, maka dipandang perlu melakukan penelitian ini, dengan judul: **Pemetaan Pemilih Pemula Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu 2014.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan penelitian atau pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Bagaimanakah estimasi proporsi, profil, dan perilaku politik pemilih pemula di daerah lokasi penelitian”?, maksudnya:

1. Bagaimana estimasi proporsi pemilih pemula terhadap jumlah konstituen pada pemilu 2014 mendatang?.
2. Bagaimanakah estimasi profil pemilih pemula pada pemilu 2014 mendatang?, menurut Usia dan Jenis Kelamin
3. Bagaimanakah komitmen pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan/atau pilukada di masa mendatang?
4. Bagaimanakah kecenderungan afiliasi politik pemilih pemula terhadap calon anggota legislatif menurut Partai atau kelompok yang mencalonkan?,
5. Bagaimanakah harapan pemilih pemula terhadap partai politik di masa kini dan masa mendatang?

6. Bagaimanakah harapan pemilih pemula terhadap calon anggota legislatif yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar menjadi anggota legislatif?
7. Bagaimanakah harapan pemilih pemula terhadap calon Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur) yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar menjadi Kepala Daerah?
8. Bagaimanakah harapan pemilih pemula terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar menjadi Presiden dan Wakil Presiden?
9. Apa harapan pemilih pemula terhadap penyelenggaraan pemilu dan/atau pilukada yang akan berlangsung di masa mendatang ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui estimasi profil dan perilaku politik pemilih pemula di daerah lokasi penelitian. Adapun secara khusus bertujuan :

1. Untuk mengetahui estimasi proporsi pemilih pemula terhadap jumlah konstituen pada pemilu 2014 mendatang.
2. Untuk mengetahui profil pemilih pemula pada pemilu 2014 mendatang, menurut: a. Usia, dan b. Jenis Kelamin.
3. Untuk mengetahui komitmen pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan/atau pilukada di masa mendatang (Tahun 2014 dan/atau sesudah tahun 2014).
4. Untuk mengetahui kecenderungan afiliasi politik pemilih pemula terhadap partai politik.
5. Untuk mengetahui harapan pemilih pemula terhadap partai politik pemenang pemilu yang akan datang.
6. Untuk mengetahui harapan pemilih pemula terhadap calon anggota legislatif yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar berhasil menjadi anggota legislatif
7. Untuk mengetahui harapan pemilih pemula terhadap Calon Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur) yang akan

mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar berhasil menjadi Kepala Daerah

8. Untuk mengetahui harapan pemilih pemula terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden
9. Untuk mengetahui harapan pemilih pemula terhadap penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilukada yang akan berlangsung di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan tentang langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu dan/atau Pemilukada di masa mendatang.

1.4. Hasil Yang Diharapkan

Secara administratif, hasil penelitian ini berupa :

1. Lapidan Pendahuluan
2. Draft Laporan Akhir
3. Laporan Akhir
4. Executive Summary

Secara substantif, penelitian ini menghasilkan pemetaan pemilih pemula yang berisi tentang estimasi profil dan sikap atau perilaku politik pemilih pemula, meliputi :

1. Estimasi profil pemilih pemula.
2. Komitmen pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan/atau pemilukada di masa mendatang.
3. Kecenderungan afiliasi politik pemilih pemula terhadap partai politik.
4. Harapan pemilih pemula terhadap : (i) partai politik, (ii) calon anggota legislatif, (iii) Calon Kepala Daerah, (iv) Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Harapan pemilih pemula terhadap penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilukada yang akan berlangsung di masa mendatang.

Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk memberi bahan masukan dalam menyusun kebijakan tentang langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu dan/atau pilukada di masa mendatang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Secara umum ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap profil dan perilaku politik pemilih pemula di daerah lokasi penelitian. Secara rinci ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

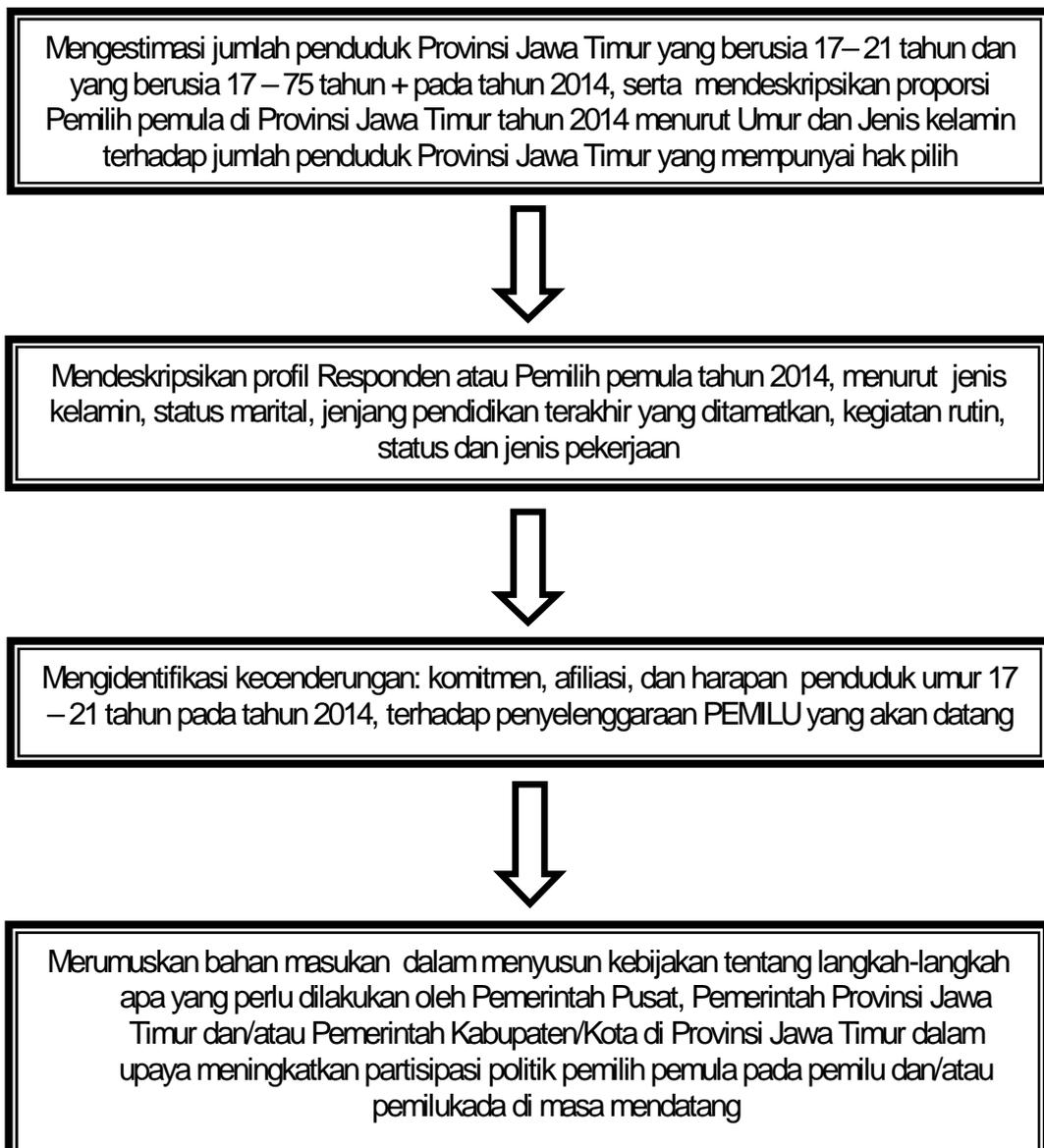
1. Mengidentifikasi estimasi proporsi pemilih pemula terhadap jumlah konstituen pada pemilu 2014 mendatang.
2. Mengidentifikasi profil pemilih pemula pada pemilu 2014 mendatang, menurut: a. Usia, dan b. Jenis Kelamin.
3. Mengidentifikasi komitmen pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan/atau pilukada di masa mendatang (Tahun 2014 dan/atau sesudah tahun 2014).
4. Mengidentifikasi kecenderungan afiliasi politik pemilih pemula terhadap partai politik.
5. Mengidentifikasi harapan pemilih pemula terhadap partai politik pemenang pemilu yang akan datang.
6. Mengidentifikasi harapan pemilih pemula terhadap calon anggota legislatif yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar berhasil menjadi anggota legislatif
7. Mengidentifikasi harapan pemilih pemula terhadap Calon Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur) yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar berhasil menjadi Kepala Daerah
8. Mengidentifikasi harapan pemilih pemula terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden
9. Mengidentifikasi harapan pemilih pemula terhadap penyelenggaraan pemilu dan/atau pilukada yang akan berlangsung di masa mendatang.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penyusunan rancangan penelitian ini serta pelaksanaan penelitian ini mengacu pada suatu pola pikir tertentu, yang dipakai sebagai pijakan filosofis, teoretis dan empiris tertentu, dengan harapan hasil penelitian ini akan bermakna dan/atau berguna bagi penentu kebijakan, guna merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara umum, dan khususnya partisipasi pemilih pemula di Provinsi Jawa Timur.

Secara skematis, kerangka pemikiran sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam gambar sebagai berikut.

Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Pemikiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Orientasi Politik

Orientasi seseorang terhadap kehidupan politik atau obyek-obyek politik yang ada merupakan bagian dari kajian budaya politik, yang merupakan salah satu aspek penting dalam sistem politik. Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (*behavioralism*). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.

Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerap kali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.

2.1.1. Budaya Politik

Ada beberapa definisi tentang budaya politik, yakni :

1. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba

Istilah budaya politik lebih mengacu pada orientasi politik sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut

2. Kay Lawson

Suatu budaya politik yaitu terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai-nilai politik, yang terdapat di seluruh bangsa.

3. Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

4. Alan R. Ball

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

5. Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

6. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan ketrampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi (Fathurrohman dan Wawan Sobari, 2002 : 231-232).

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa :

1. Konsep budaya politik lebih menekankan pada berbagai perilaku non aktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan.
2. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik.
3. Budaya politik menggambarkan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu (Fathurrohman dan Wawan Sobari, 2002 : 230-232)

2.1.2. Komponen Budaya Politik

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba (dalam Fathurrohman dan Wawan Sobari, 2002 : 233), Budaya politik mengandung tiga komponen orientasi, yakni :

1. Orientasi kognitif, yakni pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
2. Orientasi afektif, yakni perasaan terhadap sistem politik, peranan, keberadaan aktor dan penampilannya.

3. Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal itu. Oleh karena itu seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif.

Namun ia mungkin memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem. Itulah yang disebut dimensi afektif.

Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali norma-norma demokrasinya mendorong dia menilai sistem sebagai tidak cukup responsif terhadap tuntutan politik atas norma-norma etiknya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme. Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara.

2.1.3. Obyek-obyek Orientasi Politik

Obyek yang jadi orientasi politik adalah sistem politik secara keseluruhan, peran politik atau struktur tertentu, individu atau kelompok yang memikul peran tertentu, kebijakan publik yang khusus. Termasuk didalamnya adalah aktor politik dan ego dari aktor politik.

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki oleh seseorang, Almond menggolongkan orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya sendiri dalam tiga tipe budaya politik, yaitu :

1. Budaya Politik Partisipan

Orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (voting), dan memperoleh informasi yang cukup tentang kehidupan politik.

2. Budaya Politik Subyek

Orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

3. Budaya Politik Parokial

Orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Mereka ini mungkin buta huruf, tinggal di desa yang terpencil, atau mungkin nenek-nenek tua yang tidak tanggap terhadap hak pilih dan mengungkung diri dalam kesibukan keluarga (Mas'ood, 1989 : 41-42).

2.2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan cirikhas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 1989 : 1).

Untuk itu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan (Budiardjo, 1989 : 2-3).

2.2.1. Pengertian Partisipasi Politik

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Dasar inilah yang digunakan warga negara agar dapat ikut serta dalam menentukan partisipasi politik. Perilaku-perilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua

kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Menurut Budiarto, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiarto: 367)

Menurut Herbert McClosky seorang tokoh partisipasi berpendapat: “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*)” (Budiarto: 367)

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: “Political Participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi Politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”. (Budiarto: 368)

Pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Pemberian suara merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elit yang berkuasa. Penolakan untuk ikut memberikan suara dapat dianggap sebagai pernyataan protes secara diam-diam (Mas’oed dan Colin MacAndrews, 1989 : 47).

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2.2.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas siste politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warganegara. Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara (Maran, 2001:148)

Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi
- c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- h. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
- i. Voting (pemberian suara) (1995:124)

Sastroatmodjo (1995:77) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.

Sementara itu Maribath dan Goel (Rahman, 2007:29) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatitis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
- b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya: komunikator, aktifis partai da aktivis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007:287) kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidapuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan Almond (Mas' oed, 11993:47) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi non konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

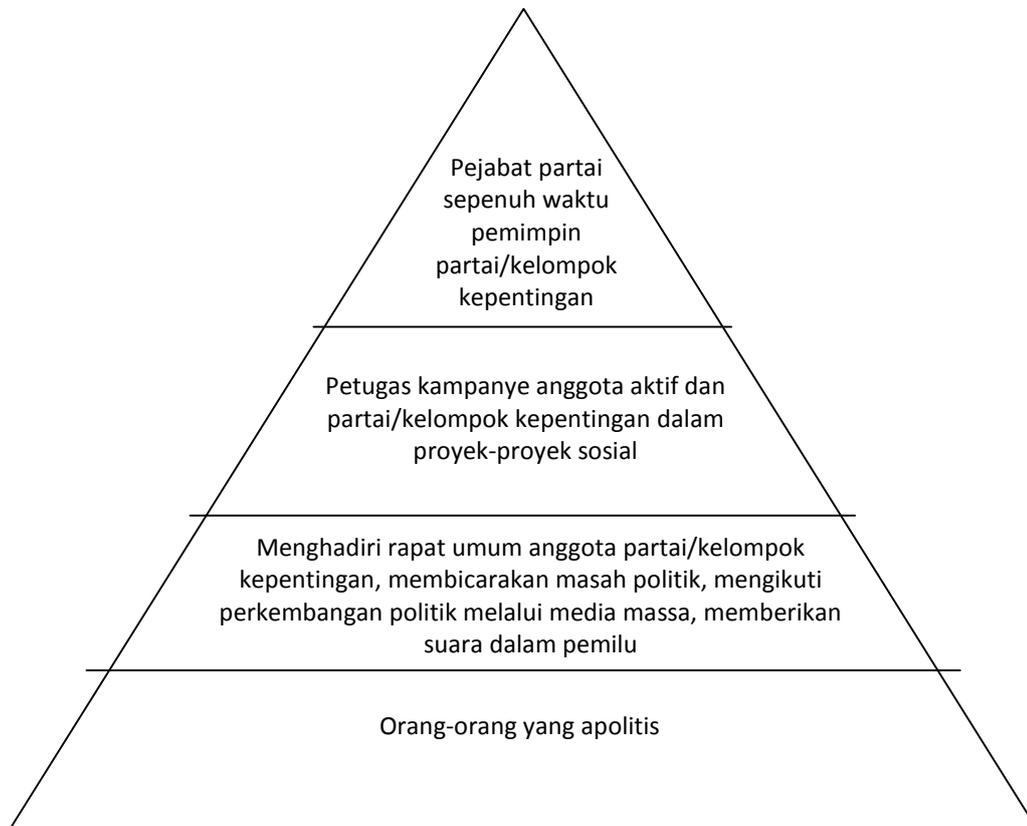
Tabel 2.1.
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi Politik	Berdemostrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda (perusakan, pengeboman, pembakaran)
	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
	Perang gerilya dan revolusi.

Sumber: Almond dalam Mas' oed,1989:47

Dalam perspektif lain, Roth dan Wilson (Suryadi, 2007:137) menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya, intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian di kenal dengan nama "Partisipasi Partisipasi Politik". Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah.

Gambar 2.1.
Piramida Partisipasi Politik



Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik ini adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang apolitis (Syarbaini, 2002:70). Kelompok yang berada di atas orang-orang apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemudian yang terletak di atas satu tingkat dari kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada jenjang ini, aktivitas politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan. Kelompok terakhir yang terletak di bagian atas piramida partisipasi politik adalah kelompok aktivis, warga yang termasuk kelompok aktivis ini tergolong sedikit jumlahnya dimana kelompok

aktivis terdiri dari pejabat partai sepenuh waktu, dan pemimpin partai/kelompok kepentingan.

Pendapat lain partisipasi merupakan kegiatan atau perilaku luar, bukan berupa pola sikap dan orientasi atau perilaku dalam. Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi :

1. Partisipasi Aktif

Adalah kegiatan yang sifatnya “mempengaruhi” proses input politik, seperti mengajukan petisi, demonstrasi, kontrak dengan pejabat pemerintah, anggota aktif atau pengurus partai politik, dan mengajukan alternatif keputusan politik yang berlainan yang dibuat oleh pemerintah (Surbakti : 104-105)

2. Partisipasi Pasif

Merupakan tindakan “melaksanakan” output politik, seperti mentaati hukum, membayar pajak, dan memelihara ketertiban dan keamanan (Surbakti : 105)

3. Partisipasi Tak aktif (inactive)

Merupakan tindakan untuk tak melakukan apa-apa, seperti tak memilih, tak membayar pajak, tak mentaati peraturan secara sengaja (civildisobedience), tak menghadiri kampanye politik, dan tak menjadi anggota aktif partai politik (Surbakti : 105)

Partisipasi politik dapat dibagi menjadi lima bentuk, yaitu :

1. Kegiatan yang berkenaan dengan pemilihan umum

Kegiatan yang termasuk kategori pemilihan umum antara lain menjadi calon dalam pemilihan umum, memilih dalam pemilihan umum, memberi sumbangan untuk dana kampanye partai atau calon tertentu, berkampanye dari rumah ke rumah untuk partai atau calon tertentu, bekerja pada salah satu unit kegiatan dalam proses pemilihan umum dan menjadi pendukung setia dan fanatik partai politik atau calon tertentu (memasang tanda gambar partai politik atau calon tertentu dalam mobil atau rumah sendiri) (Surbakti : 112).

2. *Lobbying*

Yang dimaksud dengan lobbying adalah kegiatan individu atau kelompok untuk mempengaruhi secara langsung (tatap muka) pejabat pemerintah atau pemimpin politik tertentu dalam rangka mendukung atau menentang suatu rancangan keputusan pemerintah tertentu.

3. Kegiatan organisasi partai politik

Keanggotaan seseorang dalam suatu partai politik tertentu secara aktif atau menjadi pengurus suatu organisasi partai politik merupakan bentuk partisipasi politik ketiga.

4. Kontak dengan pejabat pemerintah pembuatan dan pelaksanaan keputusan
Mengadakan kontak dengan pejabat pemerintah atau pemimpin politik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya. Yang mengadakan kontak ini biasanya seorang individu aktor politik. Kontak ini dapat dilakukan secara langsung, misalnya dengan mengirim surat secara langsung kepada pejabat yang bersangkutan, atau dilakukan secara tidak langsung melalui surat kabar yang isinya berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan (serta pengawasan) suatu kebijaksanaan umum oleh pemerintah.

5. Mempengaruhi proses politik dengan kekerasan

Kegiatan politik yang bersifat kekerasan secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, kegiatan politik yang bertujuan merubah atau mengganti pemimpin politik/ pemerintahan yang ada, seperti kudeta atau pembunuhan politik. Kedua, kegiatan politik yang bertujuan merubah kebijaksanaan umum yang ada, seperti protes, huru hara, demonstrasi, dan pemberontakan. Ketiga, kegiatan politik yang bertujuan mengganti seluruh sistem politik yang ada, seperti revolusi (Surbakti : 113-114).

Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, yaitu pendekatan kontekstual (lingkungan sosio-ekonomi dan politik) dan pendekatan individual-psikologik.

Pendekatan kontekstual (struktural) berasumsi bahwa tindakan politik seseorang dipengaruhi oleh status sosio-ekonomi dan politik masyarakat tempat individu tersebut hidup. Pendekatan ini melihat individu dalam melakukan partisipasi politik cenderung tidak otonom atau cenderung ditentukan, bukan menentukan. Faktor-faktor yang termasuk kategori ini antara lain status sosial, status ekonomi, kelas, kultur, dan tipe rezim yang berkuasa dalam suatu masyarakat (Surbakti : 122).

Sedangkan pendekatan individual-psikologik melihat partisipasi politik individu sebagai, 1) Kegiatan tak intensional (tak sadar tujuan) atau kegiatan pada peringkat bawah sadar (faktor kepribadian, seperti sikap dan kepercayaan, kebutuhan dan dorongan, serta bawaan); 2) Hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional) (Surbakti : 115-116).

Sedangkan Paige (dalam Surbakti : 121), melihat bahwa partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh faktor kesadaran politik serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Kesadaran politik diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan sosio-politik, dan minat serta perhatiannya akan lingkungan sosio-politik. Sikap dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik, khususnya terhadap pemerintah diartikan sebagai penilaian orang tersebut terhadap pemerintah (Surbakti : 121-122).

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor di atas, Jeffrey M. Paige membagi partisipasi menjadi empat tipe, aktif, apatis, militan radikal, dan pasif. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis). Tipe partisipasi militan radikal apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Sedangkan tipe partisipasi pasif apabila kesadaran politik masyarakat sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi (Surbakti, 1992 : 144).

Adapun bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemula, dimana para pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasa yang dilakukan pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilu yaitu dengan cara bergabung dengan salah satu parpol di daerahnya, mengikuti kegiatan kampanye, menghadiri diskusi politik di daerahnya.

Indikator utama yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang dianggap mendasari atau melatar belakangi tingkat partisipasi pemilih pemula adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam dinamika kehidupan politik. Kegiatan politik yang mencakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bentuk dan intensitas. Dalam konsep demikian termasuk dalam perbedaan jenis partisipasi. Partisipasi secara aktif tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali jumlahnya. Jumlah orang yang secara aktif dan penuh waktu melibatkan diri dalam politik (aktifis politik, pemimpin partai atau kelompok yang berkepentingan) relative jumlahnya lebih kecil.

Partisipasi seorang itu dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat (pendidikan dan kedudukan sosial) dan faktor keadaan alam sekitar atau lingkungannya (Budiarjo, 1998:47). Dalam konteks ini teori partisipasi masyarakat pemilih pemilu diarahkan pada berbagai bentuk dan jenis peran serta dan keikutsertaan masyarakat pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum pada pemilu tahun 2009.

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Di banyak negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik mungkin pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Juga di banyak negara, lembaga pendidikan dan kurikulumnya sengaja berusaha mempengaruhi proses sosialisasi politik anak-anak didiknya. Hal ini terjadi di semua negara, baik yang komunis, otoriter maupun demokratis.

Di samping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomik juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita; orang yang berstatus sosial-ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah. Berkaitan dengan status sosial ekonomi, Bryant dan White menyatakan bahwa, Partisipasi (P) adalah merupakan sebuah fungsi dari manfaat (B) yang akan diperoleh, dikalikan dengan probabilitas atau kemungkinan untuk benar-benar memetik manfaat itu (Pr), dikurangi dengan dua jenis biaya yakni biaya langsung (DC) dan biaya oportunitas

(Opportunity Cost = OC); semuanya itu dikalikan dengan besarnya resiko yang tanggung ditanggung (Risks = R). Formulasnya adalah sebagai berikut: $[(B \times Pr) - (DC + OC)] R$. (Bryant, Coralie and White Louise G., 1987: 285). Dalam konteks ini, kelompok miskin (berstatus sosial-ekonomi rendah) diasumsikan mempunyai kemungkinan yang lebih kecil untuk bias ikut berperanserta jika dibandingkan dengan kelompok kaya (berstatus sosial-ekonomi tinggi) yang kepemilikan sumber dayanya lebih besar.

2.2.3. Tujuan Partisipasi Publik

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu direfleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Myron Waimer (Sastroatmodjo, 1995:85) menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya pergerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu:

- a. **Modernisasi di segala bidang**, berimplikasi pada komersialisme pertanian, industry, perbaikan pendidikan pengembangan metode massa dan sebagainya.
- b. **Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial**. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja batu yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan-pembuatan keputusan-keputusan politik yang akhirnya membawa perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. Kelas menengah baru itu secara praktis menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang terkesan demokratis.
- c. **Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa** merupakan faktor meluasnya komunikasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisasi akan membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang luas

mempermudah penyebaran ide-ide seluruh masyarakat. Dengan masyarakat yang belum maju sekalipun akandapat menerima ide-ide politik tersebut secara tepat. Hal ini berimplikasi pada tuntutan-tuntutan rakyat dalam ikut serta menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

- d. **Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik.** Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam hal ini mereka beranggapan, adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memperjuangkan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers. Dengan demikian pertentangan dan perjuangan kelas menengah mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.
- e. **Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.** Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang berorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Davis (Sastroatmodjo, 1995:85) partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkat maupun dalam pengertian pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik ata pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung program-program pemerintha artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan (Sastroatmodjo, 1995:85).

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

2.3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Di Kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambing, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.

2.3.1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Syarbaini, 2002:80).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat (Kusnardi, 1994:329).

Dari pengertian diatas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat. Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2009 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya.

2.3.2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 22 tahun 2007 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemilu dan hasilnya, masyarakat mengharapkan perubahan yang berarti untuk memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari.

2.3.3. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengertian asas pemilu adalah:

- a. Langsung. Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum. Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas. Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.
- e. Jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilihserta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersifat dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil. Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.3.4. Sistem Politik Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: “*single member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik) dan *multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sistem Perwakilan Berimbang)” (Rahman; 2007:151)

- a. *Single member constituency* (Sistem Distrik)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik.

Dalam pemilihan umum legislating tahun 2009, untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan menggunakan sistem distrik.

b. *Multi-Member Constituency* (Sistem Perwakilan Berimbang)

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proporsional representation atau sistem perwakilan berimbang. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh satu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah yang diperolehnya. Untuk keperluan ini diperlukan suatu perimbangan. (Rahman, 2007:152)

Jumlah total anggota Dewan Perwakilan ditentukan atas dasar perimbangan dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu.

Indonesia merupakan satu negara demokratis dimana dengan adanya sistem pemilihan umum yang bebas untuk membentuk dan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantu di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 2009 dilakukan dua kali putaran dimana pemilu putaran pertama memilih anggota DPR, DPD dan DPRD (*legislatif*) kemudian pemilu putaran ke dua yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif). Dalam pemilu legislatif rakyat dapat memilih secara langsung wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilihan umum anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dimana dalam memilih, rakyat

dapat mengetahui siapa saja calon wakil-wakilnya yang akan mewakili daerahnya. Selain dilaksanakan sistem proporsional juga adanya sistem distrik dalam pemilihan untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dengan adanya sistem pemilihan umum yang terbuka inilah diharapkan dapat memilih wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selain menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden juga mengadakan pemilihan kepala daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota secara langsung. Untuk menyelenggarakan Pilkada, KPU sebagai penyelenggara melakukan berbagai tahapan seperti yang tertuang dalam UU no. 32 tahun 2005 pasal 65 sebagai berikut :

1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan.
2. Masa persiapan meliputi :
 - a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah
 - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
 - d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
4. Tahap pelaksanaan meliputi :
 - a. Penetapan daftar pemilih
 - b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - c. Kampanye
 - d. Pemungutan suara
 - e. Penghitungan suara
 - f. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

5. Tata cara pelaksanaan masa persiapan dan tahap pelaksanaan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

2.3.5. Macam-macam Pemilihan Umum

Macam-macam pemilihan Umum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan waktu pemilihnya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. Adapun peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2.4. Pemilih Pemula

Sebagaimana tertuang dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 UU no. 10 tahun 2008 merupakan dasar hukum siapa yang dapat dikategorikan sebagai pemilih pemula. Pemilih Pemula merupakan warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang

sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempeunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Dalam penelitian kali ini, peneliti memberikan batasan usia bagi pemilih pemula adalah mereka yang memiliki rentang usia antara 17 sampai 21 tahun atau bisa disetarakan dengan anak usia SMU kelas 3 hingga mahasiswa semester III-IV.

Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu :

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
2. Belum memiliki pengalaman memilih.
3. Memiliki antusias yang tinggi.
4. Kurang Rasional.
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu.
6. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
7. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dan semu.

2.5. Perilaku Memilih

Ada lima pendekatan untuk menjelaskan perilaku memilih, yaitu pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional (Surbakti, 1992 : 145). Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dan konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh partai. Struktur sosial dapat berupa kelas sosial dan perbedaan-perbedaan antara majikan-pekerja, agama, perbedaan kota-desa, dan bahasa dan nasionalisme.

Pendekatan sosiologis melihat kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Pilihan seseorang dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial

ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data hasil pemilihan umum untuk tingkat propinsi berbeda dengan karakteristik data kabupaten, atau karakteristik data kabupaten berbeda dengan karakteristik data tingkat kecamatan.

Pendekatan psikologi sosial melihat perilaku dan keputusan politik seseorang akan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal seperti kepercayaan dan faktor eksternal seperti pengalaman politik. Dalam pendekatan ini diyakini bahwa perilaku dan kepercayaan seseorang akan membentuk dan menentukan norma kelompok.

Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih dalam pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih (Surbakti, 1992 : 145-146).

Keempat pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa ada desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataannya di negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh keempat pendekatan di atas. Tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh

tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu (Surbakti, 1992 : 146- 147). Dengan demikian kelompok atau pemimpin mempunyai pengaruh terhadap perilaku memilih.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Materi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Kabupaten: Ponorogo, Sampang, dan Malang. Materi utama atau satuan analisisnya, meliputi : proporsi kuantitas, profil, opini politik, sikap politik, dan harapan pemilih pemula terhadap kehidupan politik di Indonesia pada umumnya dan daerahnya pada khususnya.

3.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, yakni penelitian yang diorientasikan untuk menguraikan data dan/atau informasi yang dapat dikumpulkan di lapangan. Ditinjau dari cakupannya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Survey, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel dari suatu populasi (pemilih pemula), dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian yang utama (Singarimbun, 1995). Penelitian survey dapat juga dikatakan sebagai penelitian berusaha memprediksi karakteristik populasi berdasarkan data sampel (Malotra, 2000).

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para pemilih pemula di lokasi penelitian ini, yakni mereka yang memiliki usia 17 – 21 tahun pada tahun 2014, yang jumlahnya lebih kurang 66.000 orang di Kabupaten Ponorogo, lebih kurang 92.000 orang di Kabupaten Sampang, dan lebih kurang 190.000 orang di Kabupaten Malang. Penetapan sampel penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik penetapan sampel secara kebetulan “accidental sampling”, maksudnya, orang yang ditetapkan sebagai sampel penelitian ini adalah penduduk Kabupaten: Ponorogo, Sampang, dan Malang yang usianya 15 – 19 tahun yang kebetulan dapat ditemui dan bersedia untuk mengisi atau menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan.

Berdasarkan perkembangan penelitian di lapangan ada tambahan sampel penelitian, yaitu kelompok pemilih pemula yang dipilih secara purposif, adalah mereka yang tergabung dan atau menjadi anggota/pengurus organisasi pemuda. Khusus kepada kelompok ini ditanya mengenai afiliasi politiknya.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan menjawab permasalahan penelitian ini adalah data sekunder atau data yang sudah dikumpulkan oleh pihak yang berkompeten, dan data primer atau data yang dikumpulkan langsung dari sampel penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan telaah atau studi dokumen, yakni pengumpulan data dengan mengumpulkan data hasil Sensus Penduduk 2010 dan data lain dari sejumlah lembaga di lokasi penelitian, seperti: Komisi Pemilihan Umum, Kantor Statistik, dan Kantor Catatan Sipil.

Untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

Pertama: mencari penduduk di lokasi penelitian ini yang usianya 15 – 19 tahun;

Kedua : meminta kesediaan penduduk di lokasi penelitian ini yang usianya 15 – 19 tahun dan yang bisa ditemui, untuk mengisi daftar pertanyaan yang telah disediakan;

Ketiga: bagi mereka yang menyatakan diri bersedia untuk mengisi daftar pertanyaan yang telah disediakan, mereka diberi daftar pertanyaan yang harus mereka isi sendiri.

Keempat: daftar pertanyaan yang telah diisi oleh atau jawaban dari penduduk di lokasi penelitian ini yang usianya 15 – 19 tahun dan yang bisa ditemui serta bersedia menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan, dihimpun kembali dan dijadikan sebagai data primer atau data yang dihimpun atau dikumpulkan dari sampel atau responden.

3.6. Metode Analisis Data dan Interpretasi Hasil Penelitian Data

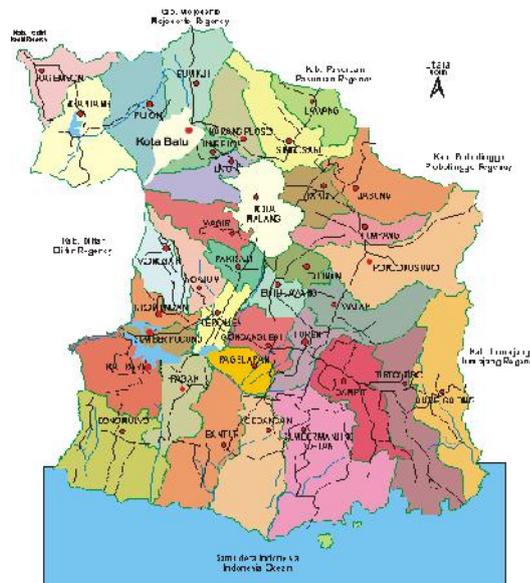
Guna menjawab kepentingan pemetaan data pemilih pemula sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian ini, maka digunakan metode analisis sebagai berikut :

1. Terhadap data kuantitatif akan dideskripsikan dengan mempergunakan metode analisis proporsi (persen), selanjutnya hasil analisis yang dimaksud diinterpretasikan berdasarkan kecenderungan pemusatan yakni dengan memetakan kecenderungan data.
2. Terhadap data kualitatif akan dideskripsikan dengan mempergunakan metode analisis substantive dan kritis-politis, selanjutnya hasil analisis yang dimaksud diinterpretasikan berdasarkan kecenderungan pemusatan opini, sikap, dan harapan politik responden yakni dengan memetakan kecenderungan opini, sikap, dan harapan responden yang dimaksud.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Malang



Gambar 4.1.

Peta Kabupaten Malang

Sumber: <http://www.malangkab.go.id>

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kapanen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kapanen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur.

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kapanen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari

Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. Ibukota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Lawang, Singosari, Dampit, dan Kepanjen. Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Malang

No	Kecamatan	No	Kecamatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
1	Ampel Gading	18	Pagak
2	Bantur	19	Pagelaran
3	Bululawang	20	Pakis
4	Dampit	21	Pakisaji
5	Dau	22	Poncokusumo
6	Donomulyo	23	Pujon
7	Gedangan	24	Sumbermanjing Wetan
8	Gondanglegi	25	Singosari
9	Jabung	26	Sumberpucung
10	Kalipare	27	Tajinan
11	Karangploso	28	Tirtoyudo
12	Kasemben	29	Tumpang
13	Kepanjen	30	Turen
14	Kromengan	31	Wagir
15	Lawang	32	Wajak
16	Ngajum	33	Wonosari
17	Ngantang		

Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang

4.1.1. Penduduk Kabupaten Malang Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Malang menurut Umur dan Jenis kelamin tahun 2011 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Penduduk Kabupaten Malang Menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0 - 4	101.696	96.471	198.167
2	5 - 9	108.977	95.736	204.713
3	10 - 14	105.151	105.665	210.816
4	15 - 19	91.082	98.923	190.005
5	20 - 24	96.759	91.690	188.449
6	25 - 29	98.363	99.413	197.776
7	30 - 34	96.389	93.161	189.550
8	35 - 39	100.338	96.716	197.054
9	40 - 44	89.971	88.871	178.842
10	45 - 49	92.316	87.278	179.594
11	50 - 54	74.791	73.916	148.707
12	55 - 59	60.968	45.723	106.691
13	60 - 64	40.604	48.052	88.656
14	65+	76.766	104.193	180.959
Jumlah/Total		1.234.171	1.225.808	2.459.979

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Malang paling banyak berada pada kelompok 5-9 tahun, sedangkan paling sedikit berada pada kelompok Usia 65+. Hal ini dapat diartikan angka kelahiran di Kabupaten Malang masih tinggi, dengan ditandai masih banyak penduduk yang terpusat pada kelompok 0-4 dan 5-9. Sedangkan untuk perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki menunjukkan angka yang sebanding tidak terpaut jauh selisihnya. Khususnya yang menjadi perhatian untuk kepentingan penelitian ini adalah kelompok umur 15-19. Dengan asumsi umur tersebut pada tahun 2011, maka pada tahun 2014 pada saat pemilu kelompok umur tersebut akan menjadi kelompok umur 18-22. Kelompok inilah yang nantinya akan mengikuti pemilu permata kali atau dapat juga disebut Pemilih pemilu. Pada kelompok usia 15-19 jumlah penduduk Kabupaten Malang sebesar 190.005. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia 15-19 lebih banyak berjenis kelamin perempuan sebesar 98.923 jiwa dibandingkan dengan berjenis kelamin laki-laki sebesar 91.082 jiwa. Hal merupakan salah satu indikator bahwa ada kecenderungan pemilih perempuan

lebih banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Berdasarkan teori perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi keaktifan seseorang dalam partisipasi politik.

4.1.2. Penduduk Kabupaten Malang Menurut Lapangan Usaha

Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri ekonomi Kabupaten Malang dapat diklasifikasikan menurut pekerjaan sebagai jenis kegiatan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Adapun data secara keseluruhan menurut lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Kabupaten Malang 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2011

No	Lapangan Pekerjaan Utama	L+P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pertanian dan Perikanan	524.372
2	Pertambangan dan Galian	4.950
3	Industri Pengolahan	209.633
4	Listrik, Gas dan Air	1.487
4	Konstruksi	88.050
5	Perdagangan	307.930
6	Angkutan dan Komunikasi	60.786
7	Jasa	95.376
8	Lainnya	148.178
Jumlah/Total		1.440.762

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka 2012

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa 3 besar pekerjaan utama penduduk Kabupaten Malang adalah: 1) Pertanian dan Perikanan (524.372); 2) Perdagangan (307.930); dan 3) Industri Pengolahan (209.633). Pertanian dan Perikanan menduduki ranking pertama mata pencaharian penduduk Malang sangatlah rasional mengingat Kabupaten Malang adalah daerah yang subur dan sangat cocok untuk tumbuhnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan Perdagangan dan Industri Pengolahan merupakan mata pencaharian utama ranking selanjutnya hal ini disebabkan Kabupaten termasuk salah satu daerah tujuan (*destination*) wisata di Jawa Timur. Tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Malang antara lain: Waduk Selorejo, Bendungan Sutami, Taman Ria

Sengkaling, Wendit Water Park, Pemandian Air Cangar, Air Terjun Coban Rondo dan lain sebagainya. Seiring majunya sektor pariwisata marak berkembang biro transportasi, penginapan, restoran, pusat oleh-oleh, pasar tradisional dan lain sebagainya. Data penduduk menurut lapangan pekerjaan diperlukan penelitian sebagai bahan analisis terkait dengan ada tidaknya hubungan antara pekerjaan seseorang dengan keaktifan dalam partisipasi politik (misalnya: partisipasi dalam pemberian suara/*voting*)

4.1.3. Penduduk Kabupaten Malang Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Komposisi penduduk dapat dikelompokkan/ diklasifikasikan secara sosial menurut pendidikan, status perkawinan dan sebagainya. Persentase penduduk Kabupaten Malang menurut pendidikan dan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Persentase Penduduk Kabupaten Malang Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Dirinci Menurut Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	L	P
1	2	3	4
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	4,01	10,62
2	Tidak/Belum Tamat SD	20,63	23,57
3	Sekolah Dasar	36,19	31,89
4	SLTP	20,14	17,41
5	SMU	8,74	8,48
6	SMK	6,25	4,21
7	Perguruan Tinggi	4,04	3,82
Jumlah/Total		100,00	100,00

Sumber: Hasil Susenas 2011 Provinsi Jawa Timur

Dengan melihat data tersebut diatas menunjukkan bahwa 3 besar pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kabupaten Malang baik penduduk berjenis kelamin perempuan dan laki-laki adalah: 1) Sekolah Dasar (L:36,14% dan P:31,89%); 2) Tidak/Belum Tamat SD (L:20,63%% dan P:23,57%); dan 3) SLTP ((L:20,14% dan P:17,41%). Data penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan diperlukan dalam penelitian ini karena di banyak

negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa, dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik.

4.2. Kabupaten Ponorogo



Gambar 4.2.

Peta Kabupaten Ponorogo

Sumber: <http://thereogponorogo.blogspot.com>

Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus, karena pada tanggal 11 Agustus 1496, Bathara Katong diwisuda/dinobatkan sebagai adipati pertama *Kadipaten Ponorogo*. Pada tahun 1837, *Kadipaten Ponorogo* pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga sekarang Kabupaten Ponorogo sudah berganti kepemimpinan sebanyak 16 kali.

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan *Kota Reog* atau *Bumi Reog* karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo juga dikenal sebagai *Kota Santri* karena memiliki banyak pondok pesantren, salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor, kecamatan Mlarak.



Gambar 4.3.
Reog Kesenian Asli dari Kabupaten Ponorogo
<http://www.ponorogo.go.id>

Kabupaten Ponorogo, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Kota Ponorogo. Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan, yang dibagi lagi atas 279 desa dan 26 kelurahan. Nama-nama 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	2	1	2
1	Ponorogo	12	Pudak
2	Siman	13	Sooko
3	Mlarak	14	Sawoo
4	Jetis	15	Sambit
5	Balong	16	Bungkal
6	Kauman	17	Ngrayun
7	Sukorejo	18	Slahung
8	Babadan	19	Jambon
9	Jenangan	20	Badegan
10	Ngebel	21	Sampung
11	Pulung		

Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo

Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2009-2014 sebanyak 49 orang yang berasal dari 11 partai yaitu, PDI-P, Partai Golkar, PKB, PAN, Partai

Demokrat, PPP, Partai Hanura, PKNU, PKS, PKPI, PNI-M. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2009-2014 adalah Agus Widodo dari PDI-P.

4.2.1. Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri biologis meliputi umur dan jenis kelamin. Penduduk Kabupaten Ponorogo menurut umur dan jenis kelamin disajikan pada data sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0 - 4	30.551	28.543	59.094
2	5 - 9	31.806	29.770	61.576
3	10 - 14	35.347	32.740	68.087
4	15 - 19	36.261	30.032	66.293
5	20 - 24	26.323	23.436	49.759
6	25 - 29	30.374	29.815	60.189
7	30 - 34	29.430	29.005	58.435
8	35 - 39	32.793	32.941	65.734
9	40 - 44	33.451	34.524	67.975
10	45 - 49	31.499	32.672	64.171
11	50 - 54	29.462	29.863	59.325
12	55 - 59	25.025	23.631	48.656
13	60 - 64	18.346	19.746	38.092
14	65+	39.658	53.049	92.707
Jumlah/Total		430.326	429.767	860.093

Sumber: Ponorogo Dalam Angka 2012

Menurut data di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan laki-laki dan perempuan hampir sebanding yaitu L:430.326 dan P:429.767 artinya selisih keduanya tidak terpaut terlalu banyak. Sedangkan jika dilihat dari per kelompok umur, jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur tua yaitu umur 65+ (92.707 jiwa), selanjutnya diikuti kelompok umur 10-14 (68.087 jiwa) dan kelompok umur 40-44 (67.975 jiwa). Hal ini menunjukkan program pengurangan jumlah penduduk melalui KB mulai menunjukkan hasilnya. Salah satu indikatornya jumlah penduduk usia balita lebih kecil dibanding kelompok umur di atasnya. Untuk

kelompok umur yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu 15-19 tahun berjumlah 66.293 dengan rincian laki-laki 36.261 jiwa dan perempuan 30.032 jiwa. Dengan asumsi pemilu tahun 2014 nanti akan masuk dalam kelompok usia 18-22 termasuk dalam kelompok pemilih pemula. Perbedaan jenis kelamin menurut teori partisipasi politik akan mengakibatkan perbedaan pula pada keaktifan seseorang dalam partisipasi politik termasuk di dalamnya partisipasi dalam pemberian suara (voting) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan legislatif (Pileg). Berdasarkan beberapa survei laki-laki lebih aktif daripada perempuan dalam partisipasi politik. Bagaimana dengan Kabupaten Ponorogo?

4.2.2. Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi penduduk menurut ekonomi meliputi penduduk aktif secara ekonomi, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Klasifikasi penduduk Kabupaten Ponorogo menurut jenis kelamin dan lapangan usaha utama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Penduduk Kabupaten Ponorogo 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2011

No	Lapangan Pekerjaan Utama	L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	143.326	87.570	230.896
2	Industri Pengolahan	27.999	15.331	43.330
3	Bangunan	31.091	1.102	32.193
4	Perdagangan Besar, Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	26.999	45.299	72.298
5	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	6.063	-	6.063
6	Keuangan dan Jasa-jasa	3.415	1.235	4.650
7	Pertambangan dan Penggalan: Listrik, Gas dan Air	34.656	27.364	62.020
Jumlah/Total		273.549	177.901	451.450

Sumber: Ponorogo Dalam Angka 2012

Data diatas menunjukkan bahwa 3 terbesar lapangan usaha/mata pencaharian penduduk Kabupaten Ponorogo adalah: 1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 230.896 jiwa; 2) Perdagangan Besar, Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel 72.298; dan 3) Pertambangan dan Penggalan: Listrik, Gas dan Air sebesar 62.020 jiwa. Sektor perkebunan dan pertanian merupakan komoditas unggulan Kabupaten Ponorogo. Sektor perkebunan komoditas unggulannya adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, dan jambu mete. Sektor Pertanian komoditas yang diunggulkan adalah tembakau.^[15] Beberapa komoditas pertanian dan perkebunan lainnya adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang kedelai, dan kacang tanah. Komoditas sektor perkebunan tahun 2009 menghasilkan tebu 12.985 ton, kelapa 3.915 ton, kopi 167 Ton.

Selanjutnya adalah lapangan usaha terbesar adalah pada sektor perdagangan. Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan Jenangan dan pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Di kabupaten ini juga terdapat pasar hewan terbesar di Karesidenan Madiun, yaitu Pasar Hewan Jetis yang buka setiap hari Pahing. Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam rangka menunjang kegiatan sistem koleksi–distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditi pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo. Sedangkan fasilitas perdagangan yang berupa pertokoan banyak berkembang di kabupaten ini terutama toko-toko swalayan. Menurut Teori di banyak negara partisipasi politik selain dipengaruhi oleh pendidikan dan perbedaan jenis kelamin juga dipengaruhi oleh status sosial ekonomi. Bagaimana dengan Kabupaten Ponorogo apakah status sosial ekonomi berdasarkan pekerjaan akan mempengaruhi partisipasi politik khususnya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemberian suara (*voting*) untuk pilkada dan maupun pileg tahun 2014.

4.2.3. Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Persentase penduduk Kabupaten Ponorogo menurut jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8.

Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	L	P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	4,41	11,38
2	Tidak/Belum Tamat SD	21,65	23,21
3	Sekolah Dasar	30,82	27,52
4	SLTP	20,75	18,96
5	SMU	11,37	10,66
6	SMK	6,51	4,85
7	Perguruan Tinggi	4,49	3,41
Jumlah/Total		100,00	100,00

Sumber: Hasil Susenas 2011 Provinsi Jawa Timur

Merujuk data di atas dapat dideskripsikan bahwa 3 besar pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Ponorogo baik penduduk berjenis kelamin perempuan dan laki-laki sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Malang yaitu: 1) Sekolah Dasar (L:30,82 % dan P:27,52%); 2) Tidak/Belum Tamat SD (L:21,65% dan P:23,21%); dan 3) SLTP (L:20,75% dan P:18,96%). Data penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan diperlukan dalam penelitian ini disebabkan menurut teori ada pengaruh antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik. Dalam hal ini partisipasi politik dalam bentuk pemberian suara pada Pilkada maupun Pileg.

4.3. Kabupaten Sampang



Gambar 4.4.
Peta Kabupaten Sampang

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 Km². Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuwates dengan luas 141,03 Km² atau 11,44 % yang merupakan Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarangan dengan luas hanya 42,7 Km² (3,46 %). Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Sampang:

Tabel 4.9.
Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Sampang

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Banyuwates	8	Pangarangan
2	Camplong	9	Rabatal
3	Irengik	10	Samapang
4	Karang Penang	11	Sreseh
5	Kedundung	12	Tambelangan
6	Ketapang	13	Torjun
7	Omben		

Sumber: Sampang Dalam Angka 2012

4.3.1. Penduduk Kabupaten Sampang Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri biologis meliputi umur dan jenis kelamin. Penduduk Kabupaten Sampang menurut umur dan jenis kelamin disajikan pada data sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Penduduk Kabupaten Sampang Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2011

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	37.319	36.586	73.905
2	5 - 9	46.342	44.096	90.438
3	10 - 14	51.698	47.796	99.494
4	15 - 19	47.283	44.508	91.791
5	20 - 24	35.363	39.204	74.567
6	25 - 29	35.978	39.636	75.614
7	30 - 34	30.366	32.879	63.245
8	35 - 39	29.384	31.807	61.191
9	40 - 44	25.589	29.458	55.047
10	45 - 49	24.026	27.044	51.070
11	50 - 54	20.919	22.060	42.979
12	55 - 59	14.689	15.129	29.818
13	60 - 64	11.398	13.725	25.123
14	65 - 69	7.075	9.488	16.563
15	70 - 74	5.447	8.041	13.488
16	75+	5.020	8.419	13.439
	Jumlah/Total	427.896	449.876	877.772

Sumber: Sampang Dalam Angka 2012

Menurut data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sampang secara keseluruhan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan cukup signifikan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki laki yaitu L:427.896 dan P:449.876. Sedangkan jika dilihat dari distribusi per kelompok umur, jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur tua yaitu umur 10-14 (99.494 jiwa), selanjutnya diikuti kelompok umur 15-19 (91.791 jiwa) dan kelompok umur 5-9 (90.438 jiwa). Trend distribusi penduduk 3 terbesar di Kabupaten Sampang berbeda dengan dua kabupaten sebelumnya (Kabupaten Malang dan Kabupaten Ponorogo). Yang mana pada dua kabupaten tersebut distribusi penduduk terbesar pada umur tua yaitu umur 65+ tetapi pada Kabupaten Sampang pada usia muda yaitu pada kelompok umur 10-14 tahun. Meskipun data yang disajikan berbeda dengan 2 kabupaten

sebelumnya (Kabupaten Malang dan Kabupaten Ponorogo) kelompok umur terakhir 65+ sedangkan di Kabupaten Sampang adalah 75+. Kelompok umur yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu 15-19 tahun berjumlah 91.791 jiwa dengan rincian laki-laki 47.283 jiwa dan perempuan 44.508 jiwa termasuk kelompok umur terbesar kedua. Dengan asumsi pemilu tahun 2014 nanti akan masuk dalam kelompok usia 18-22 termasuk dalam kelompok pemilih pemula. Dilihat dari jumlahnya penduduk laki-laki pada kelompok umur 15-19 tahun lebih besar/banyak daripada penduduk perempuan. Apakah hal ini memiliki korelasi yang signifikan terhadap partisipasi politik utamanya partisipasi dalam pemberian suara (*voting*) dalam pemilihan kepala daerah (*Pilkada*) maupun pemilihan legislatif (*Pileg*) di Kabupaten Sampang. Akan terbukti pada pemilu tahun 2014.

4.3.2. Penduduk Kabupaten Sampang Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Persentase penduduk Kabupaten Sampang menurut jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.11.

Persentase Penduduk Kabupaten Sampang Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Dirinci Menurut Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	L	P
1	2	3	4
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	18,01	35,38
2	Tidak/Belum Tamat SD	34,29	27,91
3	Sekolah Dasar	30,11	26,58
4	SLTP	7,76	6,20
5	SMU	6,56	1,74
6	SMK	0,74	0,27
7	Perguruan Tinggi	2,54	1,92
Jumlah/Total		100,00	100,00

Sumber: Hasil Susenas 2011 Provinsi Jawa Timur

Merujuk data di atas dapat dijelaskan bahwa 3 besar pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kabupaten Sampang berbeda dengan dua Kabupaten terdahulu (Kabupaten Malang dan Kabupaten Ponorogo). Untuk penduduk berjenis kelamin Laki-laki 3 terbesar pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah: 1) Tidak/ Belum Tamat SD sebesar 34,29%; 2) Sekolah Dasar

30,11%; dan 3) Tidak/belum Pernah Sekolah sebesar 18,01%. Sedangkan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan 3 terbesar pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah: 1) Tidak/Belum Pernah Sekolah 35,38%; 2) Tidak/Belum Tamat SD 27,91%; dan 3) Sekolah Dasar 26,58. Berdasarkan data diatas dapat diasumsikan bahwa sebagian besar pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Sampang adalah Sekolah Dasar ke bawah bahkan tidak tamat SD. Yang lebih memprihatinkan lagi khusus penduduk perempuan sebagian besar 35, 38% tidak pernah sekolah. Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keaktifan dalam partisipasi politik. Dengan melihat peta pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Sampang apakah hal ini juga akan berlaku?

4.3.3. Penduduk Kabupaten Sampang Menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi penduduk Kabupaten Sampang menurut jenis kelamin dan lapangan usaha utama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Penduduk Kabupaten Sampang 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2011

No	Lapangan Pekerjaan Utama	L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	137.309	109.562	246.871
2	Industri Pengolahan	20.622	19.535	40.157
3	Bangunan	17.585	512	18.097
4	Perdagangan Besar, Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	15.108	20.776	35.884
5	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	18.362	0	18.362
6	Keuangan dan Jasa-jasa	1.840	682	2.522
7	Pertambangan dan Penggalian: Listrik, Gas dan Air	28.611	13.542	42.153
Jumlah/Total		239.437	164.609	404.046

Sumber: Sampang Dalam Angka 2012

Data diatas menunjukkan bahwa 3 terbesar lapangan usaha/mata pencaharian penduduk laki-Laki Kabupaten Sampang adalah: 1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 286.871 jiwa; 2) Pertambangan dan Penggalian: Listrik, Gas dan Air sebesar 28.611; dan 3) Industri Pengolahan sebesar 20.622 jiwa. Sedangkan untuk penduduk perempuan 3 terbesar lapangan

usaha Utama /mata pencahariannya adalah: 1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 109.562 jiwa; 2) Perdagangan Besar, BesarEceran, Rumah Makan dan Hotel sebesar 20.776; dan 3) Pertambangan dan Penggalan: Listrik, Gas dan Air sebesar 13.542 jiwa. Seperti halnya dengan 2 kabupaten sebelumnya (Kabupaten Malang dan Ponorogo) pekerjaan utama penduduk Kabupaten Sampang sebagian besar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kabupaten Sampang merupakan daerah yang tergolong subur untuk pertanian, dekat dengan pantai dan laut cocok untuk mengembangkan usaha tambak maupun pengolahan ikan. Ikan yang berlimpah diolah menjadi beberapa produk makanan yang dijadikan oleh-oleh khas Sampang seperti rangginan lorjuk, krupuk terung, kerupung ikan dan lain sebagainya. Apakah status sosial ekonomi berdasarkan pekerjaan di Kabupaten Sampang akan mempengaruhi partisipasi politik khususnya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemberian suara (*voting*) untuk pilkada dan maupun pileg tahun 2014.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

5.1. Prakiraan Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih Pemula serta Profil Pemilih Pemula di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Dalam laporan penelitian ini, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, diprakirakan dan/atau dihitung dengan menggunakan rumus pertumbuhan penduduk secara Aritmatik ($P_n = P_o (1 + rn)$), dimana: P_o = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur menurut umur tunggal pada tahun 2000, P_n = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur menurut umur tunggal pada tahun 2010, r = angka pertumbuhan penduduk per tahun dalam persen, dan n = selisih antara P_n dengan P_o . Selanjutnya angka pertumbuhan (r) yang didapat digunakan untuk menghitung atau memprakirakan jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2014, dengan menggunakan rumus $P_{2014} = P_{2010} + (P_{2010} \times 4 \times r)$. Hasil penghitungan angka pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2000 sampai dengan 2010, dan prakiraan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur menurut umur tunggal pada tahun 2014 adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel 5.1. Dengan asumsi bahwa tidak ada penduduk Provinsi Jawa Timur yang menikah sebelum usia 17 tahun, maka berdasarkan Tabel 5.1., jumlah pemilih pemula di Jawa Timur atau penduduk Jawa Timur yang berusia 17 tahun sampai 21 tahun pada tahun 2014 adalah sekitar 2.714.847 orang, yang terdiri dari: 1.357.042 orang pemilih pemula laki-laki, 1.358.016 orang pemilih pemula perempuan. Selanjutnya, profil pemilih pemula di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 menurut umur atau yang usianya 17 sampai 21 tahun adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.1.
Prakiraan Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Umur Tunggal
dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Umur	Penduduk JATIM Thun 2000 Menurut Jenis Kelamin			Penduduk JATIM Tahun 2010 Menurut Jenis Kelamin			r (L)	r (P)	r (L+P)	Prakiraan Penduduk JATIM Tahun 2014 Menurut Jenis Kelamin		
	L	P	L + P	L	P	L + P				L	P	L + P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
0	240,021	231,245	471,266	287,086	273,233	560,319	1.96	1.82	1.89	309,604	293,078	602,671
1	272,918	262,110	535,028	292,546	278,095	570,641	0.72	0.61	0.67	300,962	284,879	585,834
2	294,268	282,340	576,608	298,600	285,438	584,038	0.15	0.11	0.13	300,358	286,691	587,048
3	310,133	297,593	607,726	309,507	294,490	603,997	-0.02	-0.10	-0.06	309,257	293,262	602,515
4	350,160	332,514	682,674	310,500	294,415	604,915	-1.13	-1.15	-1.14	296,433	280,922	577,354
5	313,238	296,525	609,763	298,573	283,429	582,002	-0.47	-0.44	-0.46	292,982	278,422	571,403
6	279,300	281,889	561,189	312,108	296,134	608,242	1.17	0.51	0.84	326,773	302,120	628,641
7	312,418	294,080	606,498	324,747	307,440	632,187	0.39	0.45	0.42	329,873	313,027	642,898
8	302,705	284,405	587,110	317,030	299,837	616,867	0.47	0.54	0.51	323,031	306,345	629,373
9	302,178	285,462	587,640	343,473	325,228	668,701	1.37	1.39	1.38	362,248	343,350	705,598
10	331,480	307,795	639,275	353,061	332,577	685,638	0.65	0.81	0.73	362,255	343,288	705,528
11	291,688	271,777	563,465	302,470	283,056	585,526	0.37	0.42	0.39	306,942	287,755	594,696
12	316,873	299,045	615,918	317,563	300,445	618,008	0.02	0.05	0.03	317,840	301,008	618,847
13	301,477	287,764	589,241	327,777	313,420	641,197	0.87	0.89	0.88	339,215	324,597	663,812
14	316,319	302,041	618,360	333,249	319,593	652,842	0.54	0.58	0.56	340,383	327,022	667,404
15	350,654	330,735	681,389	325,890	313,916	639,806	-0.71	-0.51	-0.61	316,684	307,531	624,188
16	332,486	323,620	656,106	308,219	297,971	606,190	-0.73	-0.79	-0.76	299,221	288,525	587,743

Umur	Penduduk JATIM Thun 2000 Menurut Jenis Kelamin			Penduduk JATIM Tahun 2010 Menurut Jenis Kelamin			r (L)	r (P)	r (L+P)	Prakiraan Penduduk JATIM Tahun 2014 Menurut Jenis Kelamin		
	L	P	L + P	L	P	L + P				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	364,838	354,360	719,198	312,818	304,454	617,272	-1.43	-1.41	-1.42	294,977	287,303	582,280
18	354,608	350,258	704,866	294,505	292,658	587,163	-1.69	-1.64	-1.67	274,539	273,407	547,944
19	316,020	323,769	639,789	278,304	281,805	560,109	-1.19	-1.30	-1.25	265,018	267,195	532,206
20	353,103	385,885	738,988	287,905	297,527	585,432	-1.85	-2.29	-2.08	266,641	270,277	536,773
21	285,021	303,538	588,559	263,743	271,346	535,089	-0.75	-1.06	-0.91	255,867	259,835	515,644
22	283,148	300,866	584,014	263,612	272,528	536,140	-0.69	-0.94	-0.82	256,337	262,260	518,560
23	277,995	293,440	571,435	265,914	275,526	541,440	-0.43	-0.61	-0.52	261,292	268,798	530,072
24	279,304	306,649	585,953	281,251	292,434	573,685	0.07	-0.46	-0.21	282,035	287,012	568,881
25	375,308	402,558	777,866	313,729	324,200	637,929	-1.64	-1.95	-1.80	293,139	298,958	592,024
26	265,862	289,182	555,044	290,970	303,394	594,364	0.94	0.49	0.71	301,962	309,358	611,206
27	316,537	332,528	649,065	322,085	333,844	655,929	0.18	0.04	0.11	324,343	334,372	658,704
28	287,909	308,994	596,903	301,450	313,170	614,620	0.47	0.14	0.30	307,121	314,863	621,917
29	290,320	310,637	600,957	309,498	316,676	626,174	0.66	0.19	0.42	317,676	319,139	636,684
30	413,404	434,633	848,037	338,794	342,765	681,559	-1.80	-2.11	-1.96	314,336	313,785	628,040
31	274,376	284,887	559,263	282,644	290,847	573,491	0.30	0.21	0.25	286,051	293,281	579,327
32	271,838	285,406	557,244	279,913	291,458	571,371	0.30	0.21	0.25	283,239	293,930	577,165
33	222,661	235,962	458,623	273,439	285,224	558,663	2.28	2.09	2.18	298,382	309,043	607,408
34	259,086	277,262	536,348	291,089	305,160	596,249	1.24	1.01	1.12	305,471	317,442	622,885
35	412,730	428,816	841,546	313,857	324,413	638,270	-2.40	-2.43	-2.42	283,782	292,819	576,600
36	244,569	257,113	501,682	274,327	285,491	559,818	1.22	1.10	1.16	287,679	298,095	585,767
37	262,601	272,859	535,460	308,372	315,537	623,909	1.74	1.56	1.65	329,872	335,278	665,133

Umur	Penduduk JATIM Thun 2000 Menurut Jenis Kelamin			Penduduk JATIM Tahun 2010 Menurut Jenis Kelamin			r (L)	r (P)	r (L+P)	Prakiraan Penduduk JATIM Tahun 2014 Menurut Jenis Kelamin		
	L	P	L + P	L	P	L + P				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	232,550	248,898	481,448	284,759	293,281	578,040	2.25	1.78	2.01	310,331	314,200	624,428
39	241,097	252,394	493,491	310,078	313,098	623,176	2.86	2.41	2.63	345,565	343,220	688,682
40	399,774	406,026	805,800	346,954	353,308	700,262	-1.32	-1.30	-1.31	328,618	334,959	663,576
41	230,893	220,406	451,299	291,928	299,890	591,818	2.64	3.61	3.11	322,796	343,149	665,527
42	225,659	213,335	438,994	269,725	281,037	550,762	1.95	3.17	2.55	290,793	316,712	606,852
43	196,428	187,251	383,679	231,372	248,309	479,681	1.78	3.26	2.50	247,836	280,696	527,690
44	182,808	177,455	360,263	287,327	307,165	594,492	5.72	7.31	6.50	353,038	396,973	749,098
45	305,441	290,920	596,361	294,235	316,288	610,523	-0.37	0.87	0.24	289,917	327,320	616,322
46	185,491	164,559	350,050	248,554	261,208	509,762	3.40	5.87	4.56	282,355	322,573	602,795
47	176,850	161,721	338,571	253,345	264,532	517,877	4.33	6.36	5.30	297,178	331,800	627,583
48	171,357	158,335	329,692	213,261	222,956	436,217	2.45	4.08	3.23	234,122	259,354	492,594
49	178,855	167,123	345,978	261,744	274,788	536,532	4.63	6.44	5.51	310,265	345,598	654,734
50	271,381	276,083	547,464	292,050	302,677	594,727	0.76	0.96	0.86	300,947	314,339	615,264
51	139,029	132,492	271,521	225,187	223,905	449,092	6.20	6.90	6.54	281,007	285,698	566,572
52	133,827	126,725	260,552	214,368	208,302	422,670	6.02	6.44	6.22	265,973	261,938	527,866
53	103,742	103,125	206,867	186,203	182,619	368,822	7.95	7.71	7.83	245,406	238,928	484,321
54	114,975	123,145	238,120	196,788	197,484	394,272	7.12	6.04	6.56	252,800	245,170	497,693
55	186,838	206,428	393,266	214,185	207,487	421,672	1.46	0.05	0.72	226,725	207,913	433,855
56	96,715	96,164	192,879	173,296	158,044	331,340	7.92	6.43	7.18	228,184	198,724	426,483
57	112,966	109,064	222,030	166,676	152,139	318,815	4.75	3.95	4.36	198,375	176,174	374,405
58	113,770	108,894	222,664	146,990	131,779	278,769	2.92	2.10	2.52	164,158	142,857	306,866

Umur	Penduduk JATIM Thun 2000 Menurut Jenis Kelamin			Penduduk JATIM Tahun 2010 Menurut Jenis Kelamin			r (L)	r (P)	r (L+P)	Prakiraan Penduduk JATIM Tahun 2014 Menurut Jenis Kelamin		
	L	P	L + P	L	P	L + P				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	105,646	113,390	219,036	172,290	168,320	340,610	6.31	4.84	5.55	215,764	200,936	416,231
60	218,917	272,994	491,911	172,338	189,227	361,565	-2.13	-3.07	-2.65	157,671	166,002	323,242
61	91,217	100,649	191,866	117,191	122,827	240,018	2.85	2.20	2.51	130,539	133,653	264,113
62	83,481	94,226	177,707	104,056	114,162	218,218	2.46	2.12	2.28	114,314	123,824	238,116
63	72,915	86,078	158,993	85,759	99,752	185,511	1.76	1.59	1.67	91,802	106,090	197,887
64	73,784	91,788	165,572	109,322	131,987	241,309	4.82	4.38	4.57	130,384	155,109	285,461
65	134,706	187,953	322,659	110,913	143,818	254,731	-1.77	-2.35	-2.11	103,077	130,310	233,280
66	50,669	60,128	110,797	72,735	82,454	155,189	4.35	3.71	4.01	85,405	94,700	180,060
67	61,064	72,141	133,205	102,506	109,690	212,196	6.79	5.20	5.93	130,333	132,527	262,529
68	54,329	69,342	123,671	82,193	90,071	172,264	5.13	2.99	3.93	99,055	100,841	199,338
69	60,277	77,818	138,095	96,353	121,902	218,255	5.99	5.67	5.80	119,420	149,525	268,931
70	138,367	186,821	325,188	110,766	158,673	269,439	-1.99	-1.51	-1.71	101,928	149,110	250,962
71	47,364	54,344	101,708	60,839	78,789	139,628	2.84	4.50	3.73	67,762	92,965	160,451
72	44,930	50,775	95,705	54,261	74,160	128,421	2.08	4.61	3.42	58,769	87,822	145,981
73	35,656	37,903	73,559	43,639	61,420	105,059	2.24	6.20	4.28	47,547	76,663	123,055
74	29,695	34,651	64,346	49,792	75,620	125,412	6.77	11.82	9.49	63,271	111,383	173,020
75+	242,255	340,640	582,895	338,920	530,899	869,819	3.99	5.59	4.92	393,015	649,509	1,041,083
Jumlah	17,175,272	17,572,726	34,747,998	18,503,516	18,973,241	37,476,757	0.77	0.80	0.79	19,075,901	19,578,094	38,653,976

**Keterangan: L = Laki-laki
P = Perempuan**

Tabel 5.2.
Prakiraan Proporsi Pemilih Pemula di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Dari Jumlah Pemilih Menurut Jenis Kelamin dan Dari Total Pemilih

Umur	Prakiraan Jumlah Pemilih Menurut Umur dan Jenis Kelamin			Prakiraan Proporsi Pemilih Pemula Dari Jumlah Pemilih Menurut Jenis Kelamin			Prakiraan Pemilih Pemula Dari Total Pemilih	
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	294,977	287,303	582,280	2.11	1.93	2.02	1.02	1.00
18	274,539	273,407	547,944	1.96	1.84	1.90	0.95	0.95
19	265,018	267,195	532,206	1.90	1.80	1.85	0.92	0.93
20	266,641	270,277	536,773	1.91	1.82	1.86	0.93	0.94
21	255,867	259,835	515,644	1.83	1.75	1.79	0.89	0.90
22+	12,619,159	13,497,699	26,097,321	90.29	90.86	90.58	43.80	46.85
Jumlah	13,976,201	14,855,715	28,812,168	100.00	100.00	100.00	48.51	51.56

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan

Tabel 5.2. di atas menunjukkan bahwa proporsi pemilih pemula di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pemilih pemula Laki-laki adalah sekitar 9,71 % (2,11% + 1,96% + 1,90% + 1,91% + 1,83%) dari jumlah keseluruhan pemilih Laki-laki atau 4,71% (1,02% + 0,95% + 0,92% + 0,93% + 0,89%) dari jumlah keseluruhan pemilih Laki-laki + Perempuan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014.
- b. Jumlah pemilih pemula Perempuan adalah sekitar 9,14 % (1,93% + 1,84% + 1,80% + 1,82% + 1,75%) dari jumlah keseluruhan pemilih Perempuan atau 4,71 % (1,00% + 0,95% + 0,93% + 0,94% + 0,90%) dari jumlah keseluruhan pemilih Laki-laki + Perempuan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014, dan
- c. Jumlah pemilih pemula Laki-laki + Perempuan adalah sekitar 9,42% (4,71% + 4,71%) dari jumlah keseluruhan pemilih Laki-laki + Perempuan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014.

Proporsi pemilih pemula di Jawa Timur pada tahun 2014 memang diestimasikan sekitar 9,42% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut diestimasikan 14,02 % dari jumlah konstituen (penduduk yang memiliki hak pilih). Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, diestimasikan pemilih pemula yang menggunakan hak pilih berkisar 18-20% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (artinya Golput dari kalangan Pemilih Pemula relative kecil).

5.2. Identifikasi Responden

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten: Ponorogo, Sampang dan Malang dengan jumlah responden sebanyak 170 orang, yang umur dan jenis kelaminnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.3.
Umur dan Jenis Kelamin Responden

No	Umur (dalam satuan tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (L + P)
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	
1	2	3	4	5 (3 + 4)
I.	Kabupaten Ponorogo			
1.1.	15	5	13	18
1.2.	16	5	29	34
1.3.	17	1	4	5
1.4.	18	0	1	1
1.5.	19	0	2	2
Jumlah I.		11	49	60
II.	Kabupaten Sampang			
2.1	15	2	9	11
2.2	16	4	15	19
2.3	17	6	6	12
2.4	18	2	5	7
2.5.	19	3	2	5
Jumlah II.		17	37	54
III.	Kabupaten Malang			
2.1	16	14	15	29
2.2	17	10	11	21
2.3	18	3	2	5
2.4	19	2	0	2
Jumlah III.		29	27	56
Jumlah keseluruhan (I + II + III)		57 (33,53%)	113 (66,47%)	170 (100,00%)

Tabel 5.3. di depan menunjukkan bahwa responden penelitian ini yang jumlahnya 170 orang, adalah mereka yang usianya antara 15 tahun sampai 19

tahun pada tahun 2012. Dari 170 orang tersebut, 33,53% adalah berjenis kelamin laki-laki, dan 66,47% adalah berjenis kelamin perempuan.

Jika ditinjau dari status pernikahan mereka, kondisi responden penelitian ini adalah sebagaimana yang tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 5.4.
Status Pernikahan Responden

No	Kabupaten	Status Pernikahan						Jumlah
		BM	M	JND	DD	C	TM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ponorogo	57	0	0	0	0	3	60
2.	Sampang	51	2	0	0	0	1	54
3.	Malang	55	0	0	0	0	1	56
Jumlah		163 (95,88%)	2 (1,18%)	0	0	0	5 (2,94%)	170 (100,00%)

Keterangan:

BM = Belum Menikah, **M** = Menikah, **JND** = Janda, **DD** = Duda, **C** = Cerai, dan **TM** = Tidak Menjawab.

Jika ditinjau dari jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan, kondisi pendidikan responden penelitian ini adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.5.
Jenjang Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Responden

No	Kabupaten	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		TTSD	TSD/S	TSMP/S	TSMA/S	Lainny a	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ponorogo	0	0	57	3	0	60
2.	Sampang	0	1	46	7	0	54
3.	Malang	0	0	49	7	0	56
Jumlah		0	1 (0,58%)	142 (83,52%)	17 (10,00%)	0	170 (100,00%)

Keterangan:

TTSD = Tidak Tamat Sekolah Dasar atau Sederajat, **TSD/S** = Tamat Sekolah Dasar atau Sederajat, **TSM P/S** = Tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat, **TSMA/S** = Tamat Sekolah Menengah Atas atau Sederajat.

Jika ditinjau dari aktifitas rutin mereka sehari-hari, aktifitas responden penelitian ini adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.6.
Aktifitas Rutin Responden

No	Kabupaten	Aktifitas Rutin			Jumlah
		S/K	BKRJ	SMP	
1	2	3	4	5	6
1.	Ponorogo	47	9	3	60
2.	Sampang	40	11	3	54
3.	Malang	39	15	3	56
Jumlah		126 (74,12%)	35 (20,59%)	9 (5,29%)	170 (100,00%)

Keterangan: S/K = Sekolah atau Kuliah, BKRJ = Bekerja. SMP = Sedang mencari pekerjaan.

Menurut pernyataan responden, dari 126 orang yang aktifitas rutinya adalah sekolah/kuliah, semuanya sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Diantara 35 orang yang menyatakan diri sudah bekerja, 11 orang bekerja pada sector pertanian dalam arti luas, dan 3 orang bekerja pada sector industri, 18 orang bekerja pada sector perdagangan, 1 orang pada sector bangunan, 2 orang pada sector jasa lainnya. Bila ditinjau dari status pekerjaan mereka, 4 orang bekerja dengan mempekerjakan orang lain, 3 orang bekerja sendiri tanpa dibantu oleh orang lain, 21 orang bekerja membantu keluarga, dan 7 orang bekerja ikut orang lain.

5.3. Sikap Responden Terhadap Pemilihan Umum Legislatif

Sebagai penduduk yang mempunyai hak pilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif tahun 2014, responden penelitian ini menyatakan komitmennya atau “janjinya” yakni sebagai berikut: 88,24% menyatakan akan ikut memilih; 5,88% menyatakan akan tidak ikut memilih; 4,71% menyatakan belum tahu/ belum menentukan sikap; dan 1,18% tidak menjawab, sebagaimana yang tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 5.7.
Komitmen Responden Terhadap Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014

No	Kabupaten	Komitmen				Jumlah
		IM	TIM	BT	TM	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ponorogo	58	0	1	1	60
2.	Sampang	40	8	6	0	54
3.	Malang	52	2	1	1	56
Jumlah		150 (88,23%)	10 (5,88%)	8 (4,71%)	2 (1,18%)	170 (100,00%)

Keterangan: IM = Ikut memilih, TIM = Tidak ikut memilih, BT = Belum tahu, TM = Tidak menjawab.

Calon Legislatif asal partai yang rencananya dipilih oleh responden ikut memilih dalam penyelenggaraan PEMILU Legislatif tahun 2014 mendatang adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.8.
Calon Legislatif Asal Partai Yang Rencananya Dipilih Oleh Responden
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Calon Legislatif Asal Partai Pilihan Responden Kabupaten		
	Ponorogo	Sampang	Malang
1	2	3	4
1	Belum tahu	Belum tahu	Belum tahu
2	Belum tahu	Belum tahu	Belum tahu
3	Belum tahu	Belum tahu	Demokrat
4	Belum tahu	Belum tahu	Demokrat
5	Belum tahu	Belum tahu	Demokrat
6	Belum tahu	Belum tahu	Demokrat
7	Belum tahu	Belum tahu	Demokrat
8	Belum tahu	Belum tahu	Demokrat
9	Belum tahu	Demokrat	Demokrat
10	Demokrat	Demokrat	Demokrat
11	Demokrat	Demokrat	Demokrat
12	Demokrat	Demokrat	Demokrat
13	Demokrat	Demokrat	Demokrat
14	Demokrat	Gerindra	Demokrat
15	Demokrat	Gerindra	Demokrat
16	Demokrat	Gerindra	Demokrat
17	Demokrat	GOLKAR	Demokrat
18	Demokrat	GOLKAR	Demokrat
19	Demokrat	GOLKAR	Demokrat
20	Demokrat	Grindra	Demokrat
21	Demokrat	Nasdem	Demokrat

No	Calon Legislatif Asal Partai Pilihan Responden Kabupaten		
	Ponorogo	Sampang	Malang
1	2	3	4
22	Demokrat	Nasdem	Demokrat
23	Demokrat	Nasdem	Demokrat
24	Demokrat	Nasdem	Demokrat/ GOLKAR
25	Demokrat	Nasdem	Gerindra
26	Demokrat	Nasdem	Gerindra
27	Demokrat	Nasdem	GOLKAR
28	Demokrat	Nasdem	GOLKAR
29	Demokrat	Nasdem	GOLKAR
30	Demokrat	Nasdem	GOLKAR
31	Demokrat	Nasdem	GOLKAR
32	Demokrat	PAN	GOLKAR
33	Demokrat	PAN	GOLKAR
34	Demokrat / Nasdem	PDIP	GOLKAR
35	Gerindra	PDIP	GOLKAR
36	Gerindra	PDIP	GOLKAR
37	Gerindra	PDIP	GOLKAR
38	Gerindra	PDIP	GOLKAR
39	Gerindra	PKS	GOLKAR
40	GOLKAR	PKS	Nasdem
41	GOLKAR		Nasdem
42	GOLKAR		Nasdem
43	GOLKAR		Nasdem
44	Hati Nurani Rakyat		PAN
45	Nasdem		PDIP
46	Nasdem		PDIP
47	Nasdem		PDIP
48	PAN		PDIP
49	PDIP		PKB
50	PDIP		PKB
51	PDIP		PKB
52	PDIP		PKB
53	PDIP		
54	PDIP		
55	PDIP		
56	PDIP		
57	PDIP		
58	PKS		

Tabel di depan menunjukkan bahwa dari 150 orang calon pemilih pemula yang menyatakan diri akan ikut memilih pada PEMILU Tahun 2014, proporsi afiliasi politik responden penelitian ini adalah pada Calon Legislatif dari Partai:

- a. Demokrat dipilih atau disukai oleh 50 orang atau 33,33%,
- b. GOLKAR dipilih atau disukai oleh 20 orang atau 13,33%,
- c. NASDEM dipilih atau disukai oleh 18 orang atau 12,00%,
- d. PDIP dipilih atau disukai oleh 18 orang atau 12,00%,
- e. GERINDRA dipilih atau disukai oleh 11 orang atau 7,33%
- f. PAN dipilih atau disukai oleh 4 orang atau 2,67%,
- g. PKB dipilih atau disukai oleh 4 orang atau 2,67%,
- h. PKS dipilih atau disukai oleh 3 orang atau 2,00%
- i. Demokrat/ NASDEM dipilih atau disukai oleh 1 orang atau 0,67%,
- j. Demokrat/GOLKAR dipilih atau disukai oleh 1 orang atau 0,67%, dan
- k. Yang menyatakan belum tahu/ belum punya pilihan 19 orang atau 12,67%.

Sebagai calon pemilih pemula, besar kemungkinan bahwa mereka tidak kenal dengan masing-masing calon Legislatif yang dipasang dalam lembar pilihan. Dalam hal calon pemilih pemula tidak kenal dengan calon Legislatif yang akan mereka pilih, maka sikap mereka dalam rangka menentukan pilihan adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.9.

Sikap Responden Yang Punya Komitmen Ikut Memilih Terhadap Calon Legislatif Yang Tidak Dikenal Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Sikap Responden Terhadap Calon Legislatif Yang Tidak Dikenal
<i>1</i>	<i>2</i>
I. RESPONDEN DI KABUPATEN PONOROGO	
1.1.	Bertanya kepada Orang Tua dan sahabat dekat
1.2.	Berusaha mencari tahu dari berbagai media
1.3.	Memilih berdasarkan firasat saat memilih
1.4.	Memilih calon dari Gerindra
1.5.	Memilih calon dari Gerindra
1.6.	Memilih calon dari Nasdem
1.7.	Memilih wakil dari Partai yang saya sukai
1.8.	Memilih wakil dari PDIP
1.9.	Memilih wakil dari PDIP

No	Sikap Responden Terhadap Calon Legislatif Yang Tidak Dikenal
1	2
1.10.	Memilih yang berpengalaman dan bebas KKN
1.11.	Memilih yang berpengalaman dan bebas dari dugaan KKN
1.12.	Memilih yang berpengalaman dan bebas dari dugaan KKN
1.13.	Memilih yang berpihak kepada rakyat kecil dan bebas KKN
1.14.	Memilih yang dicalonkan PDIP
1.15.	Memilih yang dicalonkan PDIP
1.16.	Memilih yang jejak kariernya baik
1.17.	Memilih yang kira-kira tidak ingkar janji
1.18.	Memilih yang mewakili Demokrat
1.19.	Memilih yang mewakili Nasdem
1.20.	Memilih yang Partainya tidak terlibat KKN
1.21.	Memilih yang saya sukai
1.22.	Memilih yang saya sukai
1.23.	Memilih yang terbaik menurut saya
1.24.	Memilih yang tidak pernah kena isu KKN
1.25.	Memilih yang visinya memperbaiki nasib rakyat
1.26.	Memilih yang yang punya visi memajukan Bangsa dan Negara
1.27.	Mencari info dari berbagai media
1.28.	Mencari info dari berbagai media dan teman dekat
1.29.	Mencari Info di Internet
1.30.	Mencari info di Internet atau media
1.31.	Mencari tahu dari Media
1.32.	Mencari tahu dari Media Massa
1.33.	Mencari tahu dari Media Massa
1.34.	Mencari tahu dari orang yang berpengalaman memilih
1.35.	Mencari tahu dari orang yang pernah ikut kampanye
1.36.	Mencari tahu dari teman-teman dekat
1.37.	Mencari tahu dulu agar tidak salah pilih
1.38.	Mencari tahu info tentang calon yang akan saya pilih
1.39.	Mencari tahu karakter mereka dari media
1.40.	tetap memilih berdasarkan firasat
1.41.	Tetap memilih calon dari Demokrat
1.42.	Tetap memilih Calon Legislatif dari Gerindra
1.43.	Tetap memilih walaupun agak ngawur
1.44.	Tetap memilih yang baik menurut saya
1.45.	Tetap memilih yang berpenampilan simpatik
1.46.	Tetap memilih yang mewakili PDIP
1.47.	Tetap mendukung calon dari Demokrat
1.48.	Tetap mendukung calon dari Demokrat
1.49.	Tetap mendukung calon dari PDIP

No	Sikap Responden Terhadap Calon Legislatif Yang Tidak Dikenal
1	2
1.50.	Tetap mendukung calon Demokrat
1.51.	Tidak menjawab
1.52.	Tidak menjawab
1.53.	Tidak menjawab
1.54.	Tidak menjawab
1.55.	Tidak menjawab
1.56.	Tidak menjawab
1.57.	Tukar pendapat dengan orang-orang dekat
1.58.	Yang penting calon Demokrat
II. RESPONDEN DI KABUPATEN SAMPANG	
2.1.	Bertanya kepada orang dekat saya
2.2.	Memilih calon dari GOLKAR
2.3.	Memilih yang baik menurut saya
2.4.	Memilih yang dicalonkan oleh Gerindra
2.5.	Memilih yang dicalonkan oleh Gerindra
2.6.	Memilih yang mewakili Nasdem
2.7.	Memilih yang mewakili Nasdem
2.8.	Memilih yang mewakili Nasdem
2.9.	Memilih yang saya sukai
2.10.	Memilih yang saya sukai atau berwajah simpatik
2.11.	Memilih yang serius memperjuangkan nasib rakyat
2.12.	Memilih yang simpatik
2.13.	Mencari banyak Info di Media Massa
2.14.	Mencari info dari Internet atau Koran atau TV
2.15.	Mencari tahu dari berbagai jejak karier mereka dari media
2.16.	Mencari tahu dari Internet atau TV atau Koran
2.17.	Mencari tahu dari kader PDIP
2.18.	Mencari tahu dari Orang Tua
2.19.	Mencari tahu dari orang-orang yang saya kenal
2.20.	Mencari tahu yang terbaik dari yang calon yang ada dari teman-teman
2.21.	Mencari tahun dari Media Massa
2.22.	Mencari tauhu dari orang Tua atau kenalan atau sahabat
2.23.	Mencari tuhu latar belakang karier masing-masing calon
2.24.	Mencari yang mau menyampaikan aspirasi rakyat
2.25.	Saya percaya wakil Gerindra pasti baik
2.26.	Tak masalah yang penting bebas KKN
2.27.	Tanya kepada Orang Tua atau sahabat
2.28.	Tetap memilih calon dari Gerindra
2.29.	Tetap memilih calon dari partai Nasdem
2.30.	Tetap memilih yang dari PKS

No	Sikap Responden Terhadap Calon Legislatif Yang Tidak Dikenal
1	2
2.31.	Tidak memilih yang tidak saya kenal
2.32.	Tidak memilih yang tidak saya kenal
2.33.	Tidak memilih yang tidak saya kenal
2.34.	Tidak menjawab
2.35.	Tidak menjawab
2.36.	Tidak menjawab
2.37.	Tidak menjawab
2.38.	Tidak menjawab
2.39.	Tidak menjawab
2.40.	Tidak menjawab
III. RESPONDEN DI KABUPATEN MALANG	
3.1.	Akan memilih calon dari PKB
3.2.	Akan memilih calon dari PKB
3.3.	Bertanya kepada Orang Tua dan cari info di Internet
3.4.	Bertanya kepada orang yang lebih tahu atau browsing di Internet
3.5.	Bertanya kepada orang-orang dekat saya
3.6.	Bertanya kepada orang-orang dekat saya
3.7.	Berusaha mencari info tentang calon Legislatif yang akan saya pilih
3.8.	Berusaha mencari karakter masing-masing calon tersebut
3.9.	Browsing di Internet
3.10.	Browsing di Internet dan mencari atau memilih yang terbaik
3.11.	Browsing di Internet dan mencari karakter
3.12.	Browsing di Internet untuk mencari yang terbaik
3.13.	Memilih calon dari PKB
3.14.	Memilih yang punya visi dan misi memajukan Bangsa dan Negara
3.15.	Memilih yang punya visi dan misi menyejahterakan rakyat
3.16.	Memilih yang terbaik
3.17.	Mencari atau menelusuri Berita di Media Massa
3.18.	Mencari banyak informasi
3.19.	Mencari beberapa info
3.20.	Mencari dan memilih yang punya hati-nurani
3.21.	Mencari info agar tidak salah pilih
3.22.	Mencari info dan memilih yang terbaik
3.23.	Mencari info dari berbagai media
3.24.	Mencari info dari berbagai sumber
3.25.	Mencari info dari Orang Tua atau Media Massa
3.26.	Mencari info dari Orang Tua atau Media Massa
3.27.	Mencari info dari orang-orang dekat atau media
3.28.	Mencari info dari teman dan keluarga
3.29.	Mencari info di Internet

No	Sikap Responden Terhadap Calon Legislatif Yang Tidak Dikenal
1	2
3.30.	Mencari info di Media
3.31.	Mencari info di Media atau Internet
3.32.	Mencari info mengenai kualitas masing-masing calon
3.33.	Mencari info sebanyak-banyaknya agar tidak salah pilih
3.34.	Mencari info tentang calon Legislatif yang terbaik
3.35.	Mencari info tentang calon-calon tersebut dan memilih yang terbaik
3.36.	Mencari info tentang jejak karier mereka
3.37.	Mencari info terlebih dahulu
3.38.	Mencari info untuk mendapatkan yang terbaik
3.39.	Mencari info yang banyak
3.40.	Mencari info yang beredar
3.41.	Mencari jejak karier mereka di Media Massa
3.42.	Mencari pendapat orang terdekat supaya tak salah pipih
3.43.	Mencari tahu dari berbagai sumber berita
3.44.	Mencari tahu dari orang-orang yang saya kenal
3.45.	Mencari tahu dari teman-teman dekat
3.46.	Mencari yang beriman dan tawaqal
3.47.	Mencoba mencari tahu dari berbagai sumber
3.48.	Mengikuti kampanye masing-masing calon
3.49.	Menilai pengabdian mereka kepada Bangsa dan Negara
3.50.	Santai saja besok mereka pasti mengenalkan diri saat kampanye
3.51.	Tetap memilih calon yang mewakili PDIP
3.52.	Tidak menjawab

Tabel 5.9. di depan menunjukkan bahwa calon pemilih pemula di tiga kabupaten yang dimaksud sebagian besar punya sikap yang baik atau antusias untuk menyukseskan Pemilu Legislatif pada tahun 2014. Hal tersebut dapat kita cermati dari upaya positif mereka yakni mencari informasi yang akan mereka lakukan sebelum menetapkan pilihan, seandainya mereka tidak kenal dengan calon Legislatif yang nama dan fotonya tercantum dalam lembar pilihan atau calon Legislatif yang akan mereka pilih.

Menurut pernyataan responden, hal-hal yang memotivasi mereka untuk ikut memilih pada pelaksanaan pemilihan calon Legislatif pada PEMILU tahun 2014 adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.10.
Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Legislatif
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Legislatif
1	2
I. RESPONDEN DI KABUPATEN PONOROGO	
1.1.	Agar bangsa Indonesia menjadi lebih maju
1.2.	Cari pengalaman
1.3.	Diri sendiri
1.4.	Diri sendiri
1.5.	Diri sendiri
1.6.	Diri sendiri
1.7.	Diri sendiri
1.8.	Ikut Orang Tua
1.9.	Ikut teman
1.10.	Ingin DPR yang baik dan Jujur
1.11.	Ingin ikut memilih
1.12.	Ingin ikut mendukung calon yang baik dan jujur
1.13.	Ingin memenangkan pilihannya
1.15.	Ingin menjadi generasi muda yang baik
1.14.	Ingin menjadi generasi muda yang
1.16.	Ingin menjadi generasi muda yang baik
1.17.	Ingin menjadi warga negara yang baik
1.18.	Ingin mentakan pendapat memalui pilihan dalam pemilu
1.19.	Kebiasaan keluarga selalu ikut memilih
1.20.	Keinginan sendiri
1.21.	Keinginan untuk memajukan bangsa dan negara
1.22.	Keinginan untuk memajukan bangsa dan negara
1.23.	Keluarga dan saudara
1.24.	Kemauan diri sendiri, tak ada yang mendorong
1.25.	Kemauan diri sendiri, tak ada yang mendorong
1.26.	Kemauan sendiri
1.27.	Kemauan sendiri
1.28.	Kemauan sendiri
1.29.	Kemauan sendiri
1.30.	Kemauan sendiri
1.31.	Kemauan sendiri
1.32.	Kemauan sendiri
1.33.	Kemauan sendiri
1.34.	Kemauan sendiri
1.35.	Kemauan sendiri
1.36.	Memenangkan calon yang baik dan jujur
1.37.	Sikap, visi, dan misi calon Legislatif

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Legislatif
<i>1</i>	<i>2</i>
1.38.	Supaya bangsa kita berubah nasibnya menjadi lebih baik
1.39.	Supaya calon yang saya sukai bisa menang
1.40.	Supaya Indonesia lebih maju
1.41.	Teman dan keluarga
1.42.	Teman dan keluarga
1.43.	Teman dan keluarga
1.44.	Tidak menjawab
1.45.	Tidak menjawab
1.46.	Tidak menjawab
1.47.	Tidak menjawab
1.48.	Tidak menjawab
1.49.	Tidak menjawab
1.50.	Tidak menjawab
1.51.	Tidak menjawab
1.52.	Tidak menjawab
1.53.	Untuk memilih yang jujur
1.54.	Untuk menambah suara dari calon yang saya pilih
1.55.	Untuk mendukung dan memenangkan calon yang jujur
1.56.	Untuk mendukung orang yang saya anggap bertanggung jawab
1.57.	Untuk menggunakan hak pilih
1.58.	Untuk menyukseskan demokrasi
II. RESPONDEN DI KABUPATEN SAMPANG	
2.1.	Agar DPR mendatang tidak dari orang yang suka bolos kerja
2.2.	Harapan agar Anggota Legislatif yang akan datang lebih baik
2.3.	Harapan agar Indonesia menjadi semakin maju
2.4.	Harapan agar negara kita lebih maju dari sebelumnya
2.5.	Harapan punya anggota DPR yang bertanggung jawab kepada rakyat
2.6.	Harapan punya Anggota Legislatif yang tidak bolosan
2.7.	Ingin berpartisipasi dalam pemilu
2.8.	Ingin DPR yang lebih baik dari sebelumnya
2.9.	Ingin DPR yang pandai mengatur bangsa
2.10.	Ingin ikut memenangkan calon Legislatif yang bijak
2.11.	Ingin Indonesia dan daerah saya menjadi lebih baik dari sebelumnya
2.12.	Ingin Indonesia menjadi semakin maju dan rakyatnya sejahtera semua
2.13.	Ingin memenangkan calon Legislatif pilihan saya
2.14.	Ingin memilih calon Legislatif yang baik dan jujur
2.15.	Ingin memilih calon Legislatif yang baik menurut saya
2.16.	Ingin memilih calon Legislatif yang memperjuangkan perubahan
2.17.	Ingin memilih calon Legislatif yang menjanjikan perubahan
2.18.	Ingin memilih Legislatif yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Legislatif
1	2
2.19.	Ingin mendukung calon Legislatif yang jujur dan bebas KKN
2.20.	Ingin menggunakan hak pilih
2.21.	Ingin menggunakan hak pilih
2.22.	Ingin menggunakan hak pilih secara tepat
2.23.	Ingin perubahan besar dalam pembangunan bangsa dan negara
2.24.	Ingin punya anggota Legislatif yang layak dan mumpuni
2.25.	Ingin punya DPR yang lebih baik dari sebelumnya
2.26.	Ingin punya DPR yang mampu bekerja sama dengan Pemerintah
2.27.	Ingin punya DPR yang memperjuangkan aspirasi rakyat
2.28.	Ingin punya DPR yang memperjuangkan kemajuan bangsa
2.29.	Ingin punya DPR yang tidak KKN
2.30.	Ingin punya Legislatif yang bertanggung jawab kepada pemilihnya
2.31.	Ingin punya Legislatif yang bijak dan bertanggung jawab
2.32.	Ingin punya Legislatif yang bijak dan tidak KKN
2.33.	Ingin punya Legislatif yang mengembangkan kesejahteraan rakyat
2.34.	Ingin punya Legislatif yang peduli dengan nasib rakyat
2.35.	Mengharapkan punya Legislatif yang berwibawa
2.36.	Rasa bertanggung jawab untuk ikut melakukan perubahan
2.37.	Supaya calon DPR pilihan saya bisa menang
2.38.	Tidak menjawab
2.39.	Untuk memenangkan calon legislatif yang sesuai dengan harapan
2.40.	Untuk menunjukkan partisipasi dan aspirasi politik saya
III. RESPONDEN DI KABUPATEN MALANG	
3.1.	Berharap Indonesia menjadi lebih baik
3.2.	Diri sendiri
3.3.	Diri sendiri
3.4.	Diri sendiri
3.5.	Diri sendiri
3.6.	Diri sendiri
3.7.	Diri sendiri
3.8.	Diri sendiri
3.9.	Diri sendiri
3.10.	Diri sendiri dan usia yang telah memenuhi syarat
3.11.	Hak sebagai warga negara
3.12.	Hak sebagai warga negara untuk ikut memilih dalam pemilu
3.13.	Ingin berpartisipasi dalam mewujudkan perubahan menjadi lebih baik
3.14.	Ingin ikut berpartisipasi dalam proses politik
3.15.	Ingin memilih calon Legislatif yang mau menyuarakan suara rakyat
3.16.	Ingin memilih calon yang pantas mewakili rakyat
3.17.	Ingin memilih DPR yang memperjuangkan aspirasi rakyat

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Legislatif
<i>1</i>	<i>2</i>
3.18.	Ingin memilih DPR yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat
3.19.	Ingin menggunakan hak pilih dan tidak apatis
3.20.	Ingin menggunakan hak pilih dan tidak golput
3.21.	Ingin menjadi masyarakat yang partisipatif
3.22.	Ingin menjadi warga negara yang baik atau tidak golput
3.23.	Ingin menjadi warga negara yang partisipatif
3.24.	Ingin menjadi warga negara yang taat menggunakan hak pilih
3.25.	Ingin menjadi warga negara yang tidak apatis
3.26.	Ingin menyaksikan perubahan kondisi pemerintahan
3.27.	Ingin menyaksikan pesta demokrasi
3.28.	Ingin punya DPR yang baik dan mampu menyelesaikan tugasnya
3.29.	Ingin punya DPR yang mau menampung/menyuarakan suara rakyat
3.30.	Ingin punya DPR yang memperjuangkan kemakmuran bangsa
3.31.	Ingin punya DPR yang memperjuangkan kemakmuran bangsa
3.32.	Ingin punya Legislatif yang berjuang untuk kemajuan bangsa
3.33.	Ingin situasi dan kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik
3.34.	Ingin tidak menyia-nyiakan hak yang saya miliki
3.35.	Keinginan menjadikan DPR di Indonesia menjadi lebih baik
3.36.	Keinginan punya pengalaman memilih
3.37.	Keinginan untuk menciptakan negara yang lebih baik
3.38.	Kesadaran dari hati nurani
3.39.	Kesadaran pribadi untuk ikut memilih calon Legislatif
3.40.	Pengabdian yang diberikan oleh para calon Legislatif
3.41.	Rasa peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara
3.42.	Tidak menjawab
3.43.	Tidak menjawab
3.44.	Tidak menjawab
3.45.	Untuk memajukan negara Indonesia
3.46.	Untuk memanfaatkan hak pilih
3.47.	Untuk memilih caleg yang bisa mengendalikan pemerintahan
3.48.	Untuk memilih caleg yang memperjuangkan kemajuan daerah saya
3.49.	Untuk mendukung caleg yang programnya baik
3.50.	Untuk menyaksikan demokrasi
3.51.	Untuk menyaksikan pemilu Legislatif
3.52.	Untuk mewujudkan kebaikan bersama

5.4. Sikap Responden Terhadap Pemilihan Umum Eksekutif

Sebagai penduduk yang mempunyai hak pilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Bupati dan Wakil Bupati sesudah tahun 2014, responden penelitian ini menyatakan komitmennya atau “janjinya” yakni sebagai berikut: 81,76% menyatakan akan ikut memilih; 3,53% menyatakan akan tidak ikut memilih; 8,82% menyatakan belum tahu/ belum menentukan sikap; dan 5,88% tidak menjawab, sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.11.
Komitmen Responden Terhadap Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati
Sesudah Tahun 2014

No	Kabupaten	Komitmen				Jumlah
		IM	TIM	BT	TM	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ponorogo	44	1	10	5	60
2.	Sampang	40	5	5	4	54
3.	Malang	55	0	0	1	56
Jumlah		139 (81,76%)	6 (3,53%)	15 (8,83)	10 (5,88%)	170 (100,00%)

Keterangan: IM = Ikut memilih, TIM = Tidak ikut memilih, BT = Belum tahu, TM = Tidak menjawab.

Menurut pernyataan responden, hal-hal yang memotivasi mereka untuk ikut memilih pada pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati pada PEMILUKADA sesudah tahun 2014 adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.12.
Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Bupati
dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Sesudah Tahun 2014

No	Hal-Hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	2
I. RESPONDEN DI KABUPATEN PONOROGO	
1.1.	Agar ada yang memimpin daerah saya
1.2.	Agar ada yang memimpin daerah saya
1.3.	Agar daerah saya menjadi lebih maju dari sekarang
1.4.	Cari pengalaman
1.5.	Diri sendiri
1.6.	Diri sendiri
1.7.	Diri sendiri
1.8.	Diri sendiri

No	Hal-Hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	2
1.9.	Diri sendiri
1.10.	Diri sendiri
1.11.	Diri sendiri
1.12.	Ikut teman
1.13.	Ikut teman
1.14.	Ikut teman
1.15.	Ikut teman
1.16.	Ingin daerah saya bisa maju
1.17.	Ingin daerah saya lebih maju
1.18.	Ingin memenangkan calon Bupati yang saya sukai
1.19.	Ingin memilih Bupati yang baik menurut saya
1.20.	Ingin memilih Bupati yang mampu membuat daerah saya lebih baik
1.21.	Ingin menggunakan hak pilih secara baik
1.22.	Ingin menyalurkan hak pilih
1.23.	Ingin punya Bupati yang baik
1.24.	Ingin punya Bupati yang baik
1.25.	Ingin punya Bupati yang baik, jujur, dan bertanggung jawab
1.26.	Ingin punya Bupati yang berjuang memakmurkan warganya
1.27.	Ingin punya Bupati yang bertanggung jawab
1.28.	Ingin punya Bupati yang berupaya mensejahterakan rakyatnya
1.29.	Ingin punya Bupati yang bisa memajukan daerah saya
1.30.	Ingin punya Bupati yang lebih baik
1.31.	Ingin punya Bupati yang membuat hidup rakyat lebih baik
1.32.	Ingin punya Bupati yang peduli terhadap warganya
1.33.	Karena ada ongkosnya
1.34.	Kemauan sendiri
1.35.	Kemauan sendiri
1.36.	Kemauan sendiri
1.37.	Kemauan sendiri
1.38.	Teman dan keluarga
1.39.	Tidak menjawab
1.40.	Tidak menjawab
1.41.	Untuk ikut memenangkan calon pilihan saya
1.42.	Untuk memenangkan calon Bupati pilihan saya
1.43.	Untuk memenangkan calon Bupati yang terbaik
1.44.	Visi dan Misi yang disampaikan
II. RESPONDEN DI KABUPATEN SAMPANG	
2.1.	Agar daerah saya menjadi lebih maju dan makmur
2.2.	Agar daerah saya menjadi lebih maju dari sekarang
2.3.	Agar daerah saya menjadi lebih maju dari sekarang

No	Hal-Hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	2
2.4.	Agar pilihan saya bisa menang dalam pemilukada
2.5.	Ingin daerah saya lebih maju dari sekarang
2.6.	Ingin dipimpin oleh Bupati yang baik dan amanah
2.7.	Ingin ikut menyukseskan pemilukada
2.8.	Ingin memenangkan calon Bupati pilihan saya
2.9.	Ingin memilih calon Bupati pilihan saya
2.10.	Ingin memilih calon Bupati yang saya sukai
2.11.	Ingin memilih calon Bupati yang terbaik
2.12.	Ingin menambah dukungan calon Bupati pilihan saya
2.13.	Ingin menambah dukungan calon Bupati pilihan saya
2.14.	Ingin mendukung calon Bupati yang saya sukai
2.15.	Ingin menggunakan hak pilih
2.16.	Ingin menggunakan hak pilih
2.17.	Ingin menjadi warga negara yang baik
2.18.	Ingin menjadi warga negara yang baik
2.19.	Ingin menyumbangkan aspirasi dan menggunakan hak pilih
2.20.	Ingin punya Bupati yang memperhatikan nasib rakyat miskin
2.21.	Ingin punya Bupati yang amanah
2.22.	Ingin punya Bupati yang berjiwa membangun
2.23.	Ingin punya Bupati yang berjuang keras memberantas KKN
2.24.	Ingin punya Bupati yang berjuang mewujudkan harapan rakyat
2.25.	Ingin punya Bupati yang bertindak adil dan jujur
2.26.	Ingin punya Bupati yang berusaha memajukan daerah saya
2.27.	Ingin punya Bupati yang bijak
2.28.	Ingin punya Bupati yang bisa merakyat
2.29.	Ingin punya Bupati yang bisa merakyat
2.30.	Ingin punya Bupati yang dekat dengan rakyat
2.31.	Ingin punya Bupati yang jujur dan bertanggung jawab
2.32.	Ingin punya Bupati yang lebih baik dari sebelumnya
2.33.	Ingin punya Bupati yang lebih baik dari sekarang
2.34.	Ingin punya Bupati yang lebih bertanggung jawab
2.35.	Ingin punya Bupati yang lebih merakyat
2.36.	Ingin punya Bupati yang lebih merakyat dan lebih amanah
2.37.	Ingin punya Bupati yang merakyat dan peduli orang bawah
2.38.	Ingin punya Bupati yang pintar dan ramah
2.39.	Untuk mendukung calon Bupati pilihan saya agar bisa menang
2.40.	Untuk punya Bupati yang berjuang memajukan daerah saya
III. RESPONDEN DI KABUPATEN MALANG	
3.1.	Diri sendiri
3.2.	Diri sendiri
3.3.	Diri sendiri

No	Hal-Hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	2
3.4.	Diri sendiri
3.5.	Diri sendiri
3.6.	Diri sendiri
3.7.	Diri sendiri
3.8.	Harapan untuk memperbaiki daerah di masa depan
3.9.	Harapan untuk memperbaiki keadaan daerah
3.10.	Ingin berpartisipasi dalam pemilukada
3.11.	Ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi
3.12.	Ingin berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan
3.13.	Ingin berpartisipasi memperbaiki masa depan bangsa
3.14.	Ingin bupati yang bisa membuat daerah saya menjadi lebih baik
3.15.	Ingin daerah saya menjadi lebih baik
3.16.	Ingin dipimpin oleh putra daerah asli
3.17.	Ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah saya
3.18.	Ingin ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah
3.19.	Ingin ikut dalam proses politik
3.20.	Ingin ikut menciptakan kondisi daerah menjadi lebih baik
3.21.	Ingin memajukan daerah
3.22.	Ingin memajukan daerah
3.23.	Ingin memajukan daerah dan menjadi warga negara yang baik
3.24.	Ingin memajukan daerah saya
3.25.	Ingin memanfaatkan hak pilih
3.26.	Ingin memilih bupati yang tidak membatili rakyat
3.27.	Ingin memilih calon yang menjanjikan perubahan menjadi lebih baik
3.28.	Ingin memilih pemimpin secara demokratis
3.29.	Ingin memiliki bupati yang baik
3.30.	Ingin memperbaiki kondisi daeah agar menjadi lebih baik
3.31.	Ingin menggunakan hak pilih
3.32.	Ingin menggunakan hak pilih
3.33.	Ingin menggunakan hak pilih
3.34.	Ingin menggunakan hak pilih
3.35.	Ingin menggunakan hak pilih
3.36.	Ingin menggunakan hak pilih dalam memilih calon bupati
3.37.	Ingin menggunakan hak pilih dan memilih calon bupati idaman
3.38.	Ingin menjadi warga negara yang partisipatif
3.39.	Ingin menjadi warga negara yang tidak apatis
3.40.	Ingin menyalurkan aspirasi
3.41.	Ingin menyukkseskan pemilukada
3.42.	Ingin merubah kondisi daerah agar semakin maju
3.43.	Ingin perubahan yang kearah yang lebih baik
3.44.	Ingin perubahan yang kearah yang lebih baik

No	Hal-Hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	2
3.45.	Ingin punya bupati yang lebih baik dari sebelumnya
3.46.	Ingin punya bupati yang membuat perubahan menjadi lebih baik
3.47.	Ingin punya pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat
3.48.	Ingin punya pemimpin yang jujur dan bijak
3.49.	Keinginan diri sendiri
3.50.	Kepedulian terhadap perbaikan kondisi daerah
3.51.	Kesadaran sebagai warga negara
3.52.	Memanfaatkan hak pilih
3.53.	Pingin punya pengalaman memilih
3.54.	Tidak menjawab
3.55.	Visi dan misi para calon Bupati

Sebagai penduduk yang mempunyai hak pilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur sesudah tahun 2014, responden penelitian ini menyatakan komitmennya atau “janjinya” yakni sebagai berikut: 84,12% menyatakan akan ikut memilih; 4,12% menyatakan akan tidak ikut memilih; 10,00% menyatakan belum tahu/ belum menentukan sikap; dan 1,76% tidak menjawab, sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.13.
Komitmen Responden Terhadap Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2014

No	Kabupaten	Komitmen				Jumlah
		IM	TIM	BT	TM	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ponorogo	49	1	9	1	60
2.	Sampang	40	5	8	1	54
3.	Malang	54	1	0	1	56
Jumlah		143 (84,12%)	7 (4,12%)	17 (10,00%)	3 (1,76%)	170 (100,00%)

Keterangan: IM = Ikut memilih, TIM = Tidak ikut memilih, BT = Belum tahu, TM = Tidak menjawab.

Menurut pernyataan responden, hal-hal yang memotivasi mereka untuk ikut memilih pada pelaksanaan pemilihan calon Gubernur dan wakil Gubernur pada PEMILUKADA sesudah tahun 2014 adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.14.
Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilu yang Akan Datang

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1	2
I. RESPONDEN DI KABUPATEN PONOROGO	
1.1.	Belum tahu
1.2.	Belum tahu
1.3.	Belum tahu
1.4.	Belum tahu
1.5.	Belum tahu
1.6.	Belum tahu
1.7.	Belum tahu
1.8.	Didorong oleh rasa ingin melihat kemajuan Jatim
1.9.	Diri sendiri
1.10.	Diri sendiri
1.11.	Diri sendiri
1.12.	Diri sendiri
1.13.	Diri sendiri
1.14.	Diri sendiri
1.15.	Diri sendiri
1.16.	Ikut teman
1.17.	Ikut teman
1.18.	Ikut teman
1.19.	Ingin cari pengalaman memilih
1.20.	Ingin cari pengalaman memilih
1.21.	Ingin Gubernur yang membuat rakyat lebih sejahtera
1.22.	Ingin ikut teman-teman
1.23.	Ingin Jatim aman dan damai
1.24.	Ingin Jatim menjadi lebih baik dari sekarang
1.25.	Ingin Jatim menjadi lebih makmur dan tentram
1.26.	Ingin Jatim semakin maju
1.27.	Ingin masyarakat Jatim menjadi sejahtera
1.28.	Ingin menggunakan hak pilih secara baik
1.29.	Ingin menggunakan hak pilih secara baik
1.30.	Ingin menggunakan hak pilih secara baik
1.31.	Ingin menggunakan hak pilih secara baik
1.32.	Ingin menggunakan hak pilih secara baik
1.33.	Ingin menyalurkan aspirasi politik
1.34.	Ingin punya Gubernur yang berjuang menyejahterakan warganya
1.35.	Ingin punya Gubernur yang bisa membuat Jatim menjadi lebih baik
1.36.	Ingin punya Gubernur yang bisa memimpin Jatim dengan baik
1.37.	Ingin punya Gubernur yang jujur dan bijaksana

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1	2
1.38.	Ingin punya Gubernur yang jujur, bertanggung jawab dan merakyat
1.39.	Ingin punya Gubernur yang mampu meningkatkan kesejahteraan
1.40.	Ingin punya Gubernur yang membangun untuk kesejahteraan rakyat
1.41.	Ingin punya Gubernur yang merakyat
1.42.	Ingin punya Gubernur yang punya visi memakmurkan rakyat Jatim
1.43.	Ingin punya pengalaman memilih
1.44.	Kemauan sendiri
1.45.	Kemauan sendiri
1.46.	Teman dan keluarga
1.47.	Tidak menjawab
1.48.	Untuk ikut memenangkan calon pilihan saya
1.49.	Untuk menambah pengalaman
II. RESPONDEN DI KABUPATEN SAMPANG	
2.1.	Agar Jawa Timur berkembang dan maju
2.2.	Ingin dipimpin oleh Gubernur yang baik dan jujur
2.3.	Ingin Gubernur yang mampu membuat Jatim lebih maju dan makmur
2.4.	Ingin Gubernur Jatim menjadi lebih jujur dari sebelumnya
2.5.	Ingin ikut menyukseskan pemilukada Jatim
2.6.	Ingin Jatim saya lebih maju dari sekarang
2.7.	Ingin memberikan suara kepada calon Gubernur pilihan saya
2.8.	Ingin memenangkan calon Gubernur pilihan saya
2.9.	Ingin memilih calon Gubernur yang punya semangat membangun Jatim
2.10.	Ingin memilih calon Gubernur yang terbaik
2.11.	Ingin memilih calon Gubernur yang tidak suka main curang
2.12.	Ingin menambah dukungan calon Gubernur pilihan saya
2.13.	Ingin menambah dukungan pada calon Gubernur pilihan saya
2.14.	Ingin menggunakan hak pilih
2.15.	Ingin menggunakan hak pilih
2.16.	Ingin menggunakan hak pilih
2.17.	Ingin menjadi warga negara yang baik
2.18.	Ingin menyampaikan pilihan dengan menggunakan hak pilih
2.19.	Ingin punya Gubernur yang mampu mengatasi masalah di Jatim
2.20.	Ingin punya Gubernur yang adil dan bijaksana
2.21.	Ingin punya Gubernur yang berjiwa membangun
2.22.	Ingin punya Gubernur yang berjuang keras memberantas KKN
2.23.	Ingin punya Gubernur yang bertanggung jawab
2.24.	Ingin punya Gubernur yang berusaha memajukan Jatim
2.25.	Ingin punya Gubernur yang bijaksana
2.26.	Ingin punya Gubernur yang bijaksana
2.27.	Ingin punya Gubernur yang jujur dan bertanggung jawab

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1	2
2.28.	Ingin punya Gubernur yang lebih baik dari sebelumnya
2.29.	Ingin punya Gubernur yang lebih bertanggung jawab
2.30.	Ingin punya Gubernur yang mam[pu menyejahterakan rakyat di Jatim
2.31.	Ingin punya Gubernur yang mampu mengatasi masalah di Jatim
2.32.	Ingin punya Gubernur yang menyejahterakan rakyat
2.33.	Ingin punya Gubernur yang merakyat dan peduli orang bawah
2.34.	Ingin punya Gubernur yang sesuai harapan rakyat
2.35.	Ingin punya Gubernur yang tegas
2.36.	Tidak menjawab
2.37.	Untuk mendukung calon Gubernur pilihan saya agar bisa menang
2.38.	Untuk punya Gubernur yang berjuang untuk memberantas KKN
2.39.	Visi dan Misi calon Gubernur yang akan datang
2.40.	Visi dan Misi calon Gubernur yang akan datang
III. RESPONDEN DI KABUPATEN MALANG	
3.1.	Diri sendiri
3.2.	Diri sendiri
3.3.	Diri sendiri
3.4.	Diri sendiri
3.5.	Diri sendiri
3.6.	Diri sendiri
3.7.	Diri sendiri
3.8.	Diri sendiri
3.9.	Ingin ada perubahan kearah yang lebih baik
3.10.	Ingin berpartisipasi dalam proses politik
3.11.	Ingin Gubernur yang merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik
3.12.	Ingin ikut berpartisipasi dalam memilih Gubernur Jatim
3.13.	Ingin ikut berpartisipasi dalam proses membangun Jatim
3.14.	Ingin Jatim berubah menjadi lebih baik
3.15.	Ingin Jatim menjadi lebih baik
3.16.	Ingin Jatim menjadi lebih baik dan lebih maju dari sekarang
3.17.	Ingin Jatim menjadi lebih maju
3.18.	Ingin Jatm menjadi lebih baik
3.19.	Ingin Jawa Timur lebih makmur
3.20.	Ingin melihat Jatim menjadi lebih maju
3.21.	Ingin memajukan Jatim agar menjadi lebih baik
3.22.	Ingin memajukan Jatim dan menjadi warga negara yang baik
3.23.	Ingin memanfaatkan hak pilih
3.24.	Ingin memperbaiki keadaan masyarakat
3.25.	Ingin memperbaiki kondisi Jatim agar menjadi lebih baik
3.26.	Ingin memperbaiki masa depan bangsa

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1	2
3.27.	Ingin mendukung calon Gubernur yang pintar
3.28.	Ingin menggunakan hak pilih
3.29.	Ingin menggunakan hak pilih
3.30.	Ingin menggunakan hak pilih
3.31.	Ingin menggunakan hak pilih
3.32.	Ingin menggunakan hak pilih dan memilih calon Gubernur idaman
3.33.	Ingin menggunakan hak pilih dan mencari pengalaman
3.34.	Ingin menggunakan hak pilih demi kemajuan Jatim
3.35.	Ingin menggunakan hak pilih secara baik
3.36.	Ingin mengikuti proses politik atau menggunakan hak pilih
3.37.	Ingin menjadi warga negara yang baik
3.38.	Ingin menjadi warga negara yang partisipatif
3.39.	Ingin menjadi warga negara yang partisipatif
3.40.	Ingin menyalurkan aspirasi demi kemajuan Jatim
3.41.	Ingin menyampaikan aspirasi
3.42.	Ingin menyukkseskan pemilukada Jatim
3.43.	Ingin pemerintahan berjalan lancar
3.44.	Ingin perubahan di Jatim kearah yang lebih baik
3.45.	Ingin Provinsi Jatim menjadi lebih maju
3.46.	Ingin punya Gubernur yang baik
3.47.	Ingin punya Gubernur yang bisa mengatasi masalah di Jatim
3.48.	Ingin punya Gubernur yang memajukan Jatim
3.49.	Ingin punya Gubernur yang memperbaiki kondisi pendidikan bangsa
3.50.	Keinginan sendiri
3.51.	Kesadaran ingin sebagai warga negara yang baik
3.52.	Pingin punya Gubernur yang baik dan jujur
3.53.	Program kerja calon Gubernur yang akan datang
3.54.	Rasa peduli terhadap daerah Jatim

Sebagai penduduk yang mempunyai hak pilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) sesudah tahun 2014, responden penelitian ini menyatakan komitmennya atau “janjinya” yakni sebagai berikut: 81,18% menyatakan akan ikut memilih; 5,88% menyatakan akan tidak ikut memilih; 10,59% menyatakan belum tahu/ belum menentukan sikap; dan 2,35% tidak menjawab, sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.15.
Komitmen Responden Terhadap Pilpres Pada Tahun 2014

No	Kabupaten	Komitmen				Jumlah
		IM	TIM	BT	TM	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ponorogo	41	3	14	2	60
2.	Sampang	42	7	4	1	54
3.	Malang	55	0	0	1	56
Jumlah		138 (81,18%)	10 (5,88%)	18 (10,59%)	4 (2,35%)	170 (100,00%)

Keterangan: IM = Ikut memilih, TIM = Tidak ikut memilih, BT = Belum tahu, TM = Tidak menjawab.

Menurut pernyataan responden, hal-hal yang memotivasi mereka untuk ikut memilih pada pelaksanaan PILPRES pada tahun 2014 adalah sebagaimana yang tersebut dalam Tabel berikut.

Tabel 5.16.
Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pilpres Yang Akan Datang

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden
1	2
I. RESPONDEN DI KABUPATEN PONOROGO	
1.1.	Belum tahu
1.2.	Berharap Indonesia menjadi negara yang aman dan sejahtera
1.3.	Ingin Presiden yang punya semangat memberantas KKN
1.4.	Ingin Presiden yang tegas dalam memberantas KKN
1.5.	Ingin ikut berpartisipasi dalam pilpres
1.6.	Ingin indonesia aman dan sejahtera
1.7.	Ingin Indonesia berubah menjadi negara yang maju
1.8.	Ingin Indonesia damai dan tentram
1.9.	Ingin Indonesia dipimpin presiden yang membuat Indonesia maju
1.10.	Ingin Indonesia lebih maju
1.11.	Ingin Indonesia lebih maju
1.12.	Ingin Indonesia menjadi bebas dari bentrok antar penduduk
1.13.	Ingin Indonesia menjadi lebih makmur
1.14.	Ingin Indonesia menjadi lebih makmur
1.15.	Ingin Indonesia menjadi negara yang aman dan sejahtera rakyatnya
1.16.	Ingin Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan maju
1.17.	Ingin Indonesia semakin maju
1.18.	Ingin Indonesia yang aman tentram damai sejahtera
1.19.	Ingin memenangkan calon Presiden pilihan saya

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden
1	2
1.20.	Ingin menggunakan hak pilih
1.21.	Ingin menggunakan hak pilih dan cari pengalaman
1.22.	Ingin menghilangkan KKN
1.23.	Ingin menyalurkan aspirasi
1.24.	Ingin presiden yang lebih baik dan tegas
1.25.	Ingin Presiden yang peduli dengan nasib rakyat kecil
1.26.	Ingin Presiden yang tegas dalam KKN memberantas
1.27.	Ingin punya Presiden yang jujur dan mampu membuat Indonesia maju
1.28.	Ingin punya presiden yang mau mendengar jeritan rakyat miskin
1.29.	Ingin punya Presiden yang tegas dan bijaksana
1.30.	Ingin punya Presiden yang bertanggung jawab
1.31.	Ingin punya presiden yang cerdas dan tegas
1.32.	Ingin punya Presiden yang jujur dan tegas
1.33.	Ingin punya Presiden yang lebih peduli kepada rakyat
1.34.	Ingin punya presiden yang memajukan kesejahteraan rakyat
1.35.	Ingin punya Presiden yang membangun kesejahteraan rakyat
1.36.	Ingin punya Presiden yang peduli dengan rakyat miskin
1.37.	Ingin punya Presiden yang punya semangat memberantas KKN
1.38.	Ingin punya Presiden yang tegas dalam menindak koruptor
1.39.	Ingin punya presiden yang tegas dalam menindak pelanggaran HAM
1.40.	Tidak menjawab
1.41.	Visi misi calon Presiden mendatang
II. RESPONDEN DI KABUPATEN SAMPANG	
2.1.	Agar Indonesia berkembang dan maju
2.2.	Ingin dipimpin oleh Presiden yang baik dan jujur
2.3.	Ingin ikut menyukseskan pemilu pada Indonesia
2.4.	Ingin Indonesia saya lebih maju dari sekarang
2.5.	Ingin memberikan suara kepada calon Presiden pilihan saya
2.6.	Ingin memenangkan calon Presiden pilihan saya
2.7.	Ingin memilih calon Presiden yang punya semangat membangun Indonesia
2.8.	Ingin memilih calon Presiden yang terbaik
2.9.	Ingin memilih calon Presiden yang tidak suka main curang
2.10.	Ingin menambah dukungan calon Presiden pilihan saya
2.11.	Ingin menambah dukungan pada calon Presiden pilihan saya
2.12.	Ingin menggunakan hak pilih
2.13.	Ingin menggunakan hak pilih
2.14.	Ingin menggunakan hak pilih
2.15.	Ingin menjadi warga negara yang baik
2.16.	Ingin menyampaikan pilihan dengan menggunakan hak pilih
2.17.	Ingin punya Presiden yang mampu mengatasi masalah di Indonesia

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden
1	2
2.18.	Ingin Presiden yang mampu membuat Indonesia lebih maju dan makmur
2.19.	Ingin Presiden Indonesia menjadi lebih jujur dari sebelumnya
2.20.	Ingin punya Presiden yang adil dan bijaksana
2.21.	Ingin punya Presiden yang berjiwa membangun
2.22.	Ingin punya Presiden yang berjuang keras memberantas KKN
2.23.	Ingin punya Presiden yang bertanggung jawab
2.24.	Ingin punya Presiden yang berusaha memajukan Indonesia
2.25.	Ingin punya Presiden yang bijaksana
2.26.	Ingin punya Presiden yang diusung oleh Partai yang bebas KKN
2.27.	Ingin punya Presiden yang jujur dan bertanggung jawab
2.28.	Ingin punya Presiden yang lebih baik dari sebelumnya
2.29.	Ingin punya Presiden yang lebih bertanggung jawab
2.30.	Ingin punya Presiden yang mampu menyejahterakan rakyat di Indonesia
2.31.	Ingin punya Presiden yang mampu mengatasi masalah di Indonesia
2.32.	Ingin punya Presiden yang mendengarkan suara rakyat
2.33.	Ingin punya Presiden yang menyejahterakan rakyat
2.34.	Ingin punya Presiden yang merakyat dan peduli orang bawah
2.35.	Ingin punya Presiden yang sesuai harapan rakyat
2.36.	Ingin punya Presiden yang tegas
2.37.	Ingin punya Presiden yang tegas menindak koruptor
2.38.	Tidak menjawab
2.39.	Untuk mendukung calon Presiden pilihan saya agar bisa menang
2.40.	Untuk punya Presiden yang berjuang untuk memberantas KKN
2.41.	Visi dan Misi calon Presiden untuk memajukan Indonesia
2.42.	Visi dan Misi calon Presiden yang akan datang
III. RESPONDEN DI KABUPATEN MALANG	
3.1.	Belum tahu
3.2.	Diri sendiri
3.3.	Diri sendiri
3.4.	Diri sendiri
3.5.	Diri sendiri
3.6.	Diri sendiri
3.7.	Diri sendiri
3.8.	Ingin ada perubahan di Indonesia menuju kearah yang lebih baik
3.9.	Ingin berpartisipasi dalam proses politik
3.10.	Ingin ikut berpartisipasi dalam memilih Presiden Indonesia
3.11.	Ingin ikut berpartisipasi dalam proses membangun Indonesia
3.12.	Ingin Indonesia berubah menjadi lebih baik
3.13.	Ingin Indonesia lebih makmur
3.14.	Ingin Indonesia menjadi lebih maju

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden
1	2
3.15.	Ingin Indonesia menjadi lebih maju
3.16.	Ingin Indonesia menjadi lebih maju
3.17.	Ingin Indonesia punya Presiden yang baik dan jujur
3.18.	Ingin melakukan perubahan sehingga Indonesia menjadi lebih baik
3.19.	Ingin melihat Indonesia menjadi lebih adil dan makmur
3.20.	Ingin memanfaatkan hak pilih dengan sebaik-baiknya
3.21.	Ingin memanfaatkan hak pilih sebagai pemilih pemula
3.22.	Ingin membangun budaya demokrasisia
3.23.	Ingin memenangkan calon Presiden yang anti KKN
3.24.	Ingin memperbaiki masa depan bangsa
3.25.	Ingin menambah pengalaman di bidang politik praktis
3.26.	Ingin menggunakan hak pilih
3.27.	Ingin menggunakan hak pilih
3.28.	Ingin menggunakan hak pilih
3.29.	Ingin menggunakan hak pilih
3.30.	Ingin menggunakan hak pilih
3.31.	Ingin menggunakan hak pilih dan memilih calon Presiden idaman
3.32.	Ingin menggunakan hak pilih dan mencari pengalaman
3.33.	Ingin menggunakan hak pilih demi kemajuan Indonesia
3.34.	Ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3.35.	Ingin menjadi warga negara yang baik
3.36.	Ingin menjadi warga negara yang baik
3.37.	Ingin menjadi warga negara yang baik dan tidak Golput
3.38.	Ingin menjadi warga negara yang partisipatif
3.39.	Ingin menyalurkan aspirasi demi kemajuan Indonesia
3.40.	Ingin menyampaikan Presiden yang memperhatikan rakyat kecil
3.41.	Ingin menyukseskan Pilpres
3.42.	Ingin perubahan di Indonesia kearah yang lebih baik
3.43.	Ingin perubahan menjadi baik dari sekarang
3.44.	Ingin Presiden yang lebih baik dari yang sekarang
3.45.	Ingin punya Presiden yang bisa mengatasi kemiskinan di Indonesia
3.46.	Ingin punya Presiden yang mampu membuat Indonesia maju
3.47.	Ingin punya Presiden yang meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil
3.48.	Ingin punya Presiden yang serius mewujudkan cita-cita bangsa
3.49.	Keinginan sendiri
3.50.	Kesadaran ingin sebagai warga negara yang baik
3.51.	Pingin punya Presiden yang baik dan jujur
3.52.	Rasa cinta pada bangsa dan negara
3.53.	Rasa peduli terhadap Indonesia yang belum maju-maju
3.54.	Rasa prihatin dengan masalah bentrok antar warga di beberapa daerah

No	Hal-hal Yang Memotivasi Responden Ikut Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden
1	2
3.55.	Visi misi calon Presiden

5.5. Harapan Responden Terhadap Pemenang Pemilu

Sebagai penduduk yang mempunyai hak pilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan/atau Eksekutif pada tahun 2014 dan sesudahnya, responden penelitian ini menyatakan harapannya kepada para pemenang PEMILU dan penyelenggaraan PEMILU yakni sebagaimana yang tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 5.17.
Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Partai Pemenang Pemilu Tahun 2014 Yang Akan Datang

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Partai Pemenang Pemilu
1	2
I.	RESPONDEN DI KABUPATEN PONOROGO
1.1.	Adil dan bertanggung jawab
1.2.	Adil dan jujur
1.3.	Adil dan jujur
1.4.	Adil, jujur dan bisa menanggulangi KKN
1.5.	Anti KKN
1.6.	Belum tahu
1.7.	Belum tahu
1.8.	Belum tahu
1.9.	Belum tahu
1.10.	Belum tahu
1.11.	Belum tahu
1.12.	Berjuang memajukan bangsa dan negara
1.13.	Berjuang memberantas bentrokan antar warga
1.14.	Berjuang menentramkan kehidupan rakyat
1.15.	Berjuang untuk kemakmuran rakyat
1.16.	Berjuang untuk kesejahteraan rakyat
1.17.	Berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
1.18.	Bertanggung jawab dan mengayomi rakyat
1.19.	Bertanggung jawab dan tidak diskriminatif
1.20.	Bertanggung jawab dan tidak KKN

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Partai Pemenang Pemilu
<i>1</i>	<i>2</i>
1.21.	Bertanggung jawab dan tidak KKN
1.22.	Bertanggung jawab, jujur dan tidak KKN
1.23.	Berusaha mewujudkan janjinya
1.24.	Bisa memajukan bangsa dan negara
1.25.	Bisa memajukan bangsa dan negara
1.26.	Bisa memberantas KKN
1.27.	Bisa menjadikan Indonesia lebih maju
1.28.	Bisa mensejahterakan rakyat
1.29.	Bisa menyejahterakan rakyat
1.30.	Buktikan janji yang pernah diucapkan
1.31.	Dapat menjadikan Indonesia lebih maju
1.32.	Jangan bohong
1.33.	Jangan hanya berjanji yang penting bukti prestasi
1.34.	Jujur dan adil
1.35.	Jujur dan tidak ada yang KKN
1.36.	Lebih baik dan maju
1.37.	Lebih jujur lagi
1.38.	Mampu merubah nasib rakyat kecil
1.39.	Menepati dan membuktikan janjinya
1.40.	Menepati janji
1.41.	Mengerti kepada harapan rakyat
1.42.	Meningkatkan mutu, bertanggung jawab, dan tidak KKN
1.43.	Menjadi lebih baik lagi
1.44.	Menjadi lebih baik lagi
1.45.	Menjadi partai yang melindungi semua warga negara
1.46.	Peduli kepada rakyat kecil
1.47.	Selalu berusaha menjadi partai yang dipercaya rakyat
1.48.	Selalu memperbaiki kualitasnya
1.49.	Serius memberantas KKN
1.50.	Serius menanggulangi KKN
1.51.	Tidak curang dan tidak menggunakan politik uang
1.52.	Tidak hanya memberi janji tapi juga harus memberi bukti
1.53.	Tidak KKN dan merakyat
1.54.	Tidak KKN dan merakyat
1.55.	Tidak KKN dan merakyat
1.56.	Tidak memberi janji tapi memberi bukti
1.57.	Tidak menjawab
1.58.	Tidak money politik
II.	RESPONDEN DI KABUPATEN SAMPANG
2.1.	Berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Partai Pemenang Pemilu
1	2
2.2.	Berjuang sesuai dengan aspirasi rakyat
2.3.	Berjuang untuk kepentingan bangsa bukan hanya kepentingan partai
2.4.	Berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kelompok
2.5.	Berjuang untuk memajukan bangsa dan negara
2.6.	Berjuang untuk mensejahterakan rakyat
2.7.	Berpihak kepada kepentingan rakyat
2.8.	Bersih dari KKN
2.9.	Bersikap adil
2.10.	Bersikap tegas dan adil
2.11.	Bisa mengendalikan keributan
2.12.	Lebih amanah dan tidak berdusta
2.13.	Lebih baik dari partai pemenang pemilu sebelumnya
2.14.	Lebih baik dari sebelumnya
2.15.	Mau berjuang untuk menambah lapangan kerja
2.16.	Mau dan bisa mendengar suara rakyat
2.17.	Mau mencari dan memperjuangkan aspirasi rakyat
2.18.	Mau mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat
2.19.	Memberi contoh yang baik kepada pihak lain
2.20.	Memberikan dampak positif kepada proses pembangunan
2.21.	Memenuhi atau menepati janji saat kampanye
2.22.	Menepati janji
2.23.	Meningkatkan kualitas Kader partai
2.24.	Menonaktifkan atau memecat anggotanya yang kena isu KKN
2.25.	Menunjukkan bukti atas janji yang disampaikan waktu kampanye
2.26.	Selalu dekat dengan rakyat dan tidak hanya waktu pemilu
2.27.	Serius memberantas KKN
2.28.	Serius memberantas KKN dan memperjuangkan nasib rakyat kecil
2.29.	Setelah pemilu tidak lupa dengan harapan rakyat yang memilihnya
2.30.	Tegas menindak Anggotanya yang KKN
2.31.	Tidak diskriminatif terhadap semua warga negara Indonesia
2.32.	Tidak KKN
2.33.	Tidak melindungi kadernya yang KKN
2.34.	Tidak melupakan janji yang disampaikan waktu kampanye
2.35.	Tidak mementingkan kelompoknya sendiri
2.36.	Tidak mementingkan kepentingan sendiri
2.37.	Tidak mengingkari janjinya kepada rakyat
2.38.	Tidak menjawab
2.39.	Tidak menjawab
2.40.	Tidak suka mengumbar janji
III.	RESPONDEN DI KABUPATEN MALANG

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Partai Pemenang Pemilu
1	2
3.1.	Anti KKN
3.2.	Bekerja maksimal untuk mewujudkan janjinya saat kampanye
3.3.	Bekerja sesuai janji saat kampanye
3.4.	Benar-benar pro rakyat
3.5.	Berbuat sesuai slogan dari rakyat untuk rakyat
3.6.	Berjuang memberantas KKN
3.7.	Berjuang untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju
3.8.	Bertanggung jawab menepati janjinya
3.9.	Berusaha membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik
3.10.	Berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu
3.11.	Berusaha mensejahterakan rakyat
3.12.	Berusaha merubah nasib rakyat kecil
3.13.	Berusaha mewujudkan visi dan melaksanakan misinya dengan baik
3.14.	Bisa berubah menjadi lebih baik
3.15.	Bisa memajukan bangsa
3.16.	Bisa memajukan negara dan membawa ke arah yang lebih baik
3.17.	Bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju
3.18.	Bisa membawa Indonesia semakin maju
3.19.	Bisa menepati janji dan adil terhadap rakyat
3.20.	Bisa mengubah Indonesia menjadi negara yang maju
3.21.	Dapat mengamalkan pancasila
3.22.	Jujur dan bertanggungjawab
3.23.	Jujur dan dapat mensejahterakan rakyat
3.24.	Konsekuen dengan janjinya kepada rakyat saat kampanye
3.25.	Konsisten menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat
3.26.	Lebih memperhatikan rakyat
3.27.	Lebih peka dalam menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat
3.28.	Mampu menepati janjinya
3.29.	Mau mendengar dan menerima serta memperjuangkan aspirasi rakyat
3.30.	Melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik
3.31.	Melaksanakan tugas dengan baik agar bisa menepati janjinya
3.32.	Membawa perubahan ke arah yang lebih baik
3.33.	Memenuhi janjinya
3.34.	Memperhatikan aspirasi rakyat
3.35.	Memperhatikan aspirasi rakyat
3.36.	Mendengar dan menerima aspirasi rakyat
3.37.	Menepati janji agar tercapai masyarakat yang makmur
3.38.	Menepati janji, mensejahterakan rakyat dan menghapus KKN
3.39.	Menjalankan tugas dengan baik
3.40.	Menjalankan tugas yang demi terwujudnya kesejahteraan rakyat

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Partai Pemenang Pemilu
<i>1</i>	<i>2</i>
3.41.	Menyiapkan kader yang berkualitas
3.42.	Peduli dengan rakyat kecil
3.43.	Peduli terhadap kelangsungan hidup rakyat dan bangsa
3.44.	Rukun
3.45.	Semoga sukses
3.46.	Serius untuk menepati janjinya
3.47.	Terus berjuang untuk menjadi partai yang dipilih rakyat
3.48.	Tidak diskriminatif dalam mengemban dan menjalankan tugas negara
3.49.	Tidak mengecewakan para pemilihnya
3.50.	Tidak mengumbar janji palsu
3.51.	Tidak menjawab
3.52.	Tidak menjawab

Tabel 5.18.

Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Anggota Legislatif Yang Terpilih Pada Tahun 2014 Yang Akan Datang

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Anggota Legislatif
<i>1</i>	<i>2</i>
I.	RESPONDEN DI KABUPATEN PONOROGO
1.1.	Adil dan jujur
1.2.	Adil dan jujur
1.3.	Belum tahu
1.4.	Belum tahu
1.5.	Belum tahu
1.6.	Belum tahu
1.7.	Belum tahu
1.8.	Belum tahu
1.9.	Belum tahu
1.10.	Belum tahu
1.11.	Belum tahu
1.12.	Berjuang menentramkan kehidupan rakyat
1.13.	Berjuang menyejahterakan masyarakat yang diwakili
1.14.	Berjuang untuk kesejahteraan dan ketentraman rakyat
1.15.	Berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
1.16.	Bertanggung jawab atas tugas yang harus dilaksanakan
1.17.	Bertanggung jawab dan tidak KKN
1.18.	Bertanggung jawab dan tidak KKN
1.19.	Bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Anggota Legislatif
1	2
1.20.	Bertanggung jawab pada tugasnya
1.21.	Bertanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara
1.22.	Berusaha membuktikan janji yang pernah diucapkan
1.23.	Berusaha mewujudkan janjinya
1.24.	Berwibawa dan tidak korupsi
1.25.	Bijaksana dan anti KKN
1.26.	Bisa dipercaya atau jujur
1.27.	Bisa lebih baik
1.28.	Bisa memajukan bangsa dan negara
1.29.	Bisa memajukan bangsa dan negara
1.30.	Bisa mensejahterakan rakyat kecil
1.31.	Bisa menyejahterakan dan menentramkan masyarakat
1.32.	Dapat dipercaya dan anti KKN
1.33.	Dapat memajukan bangsa dan negara
1.34.	Dekat dengan rakyat
1.35.	Jangan hanya memanfaatkan rakyat untuk dapat kursi
1.36.	Jangan terlalu banyak ngomong tanpa bukti
1.37.	Jujur dan bijaksana
1.38.	Jujur dan tidak korupsi
1.39.	Jujur, bijaksana dan tidak korupsi
1.40.	Lebih cerdas dan tidak korupsi
1.41.	Lebih bersemangat mensejahterakan rakyat
1.42.	Lebih bertanggung jawab dalam memperjuangkan nasib para pemilihnya
1.43.	Lebih jujur lagi dan tidak korupsi
1.44.	Lebih pandai dan cerdas
1.45.	Peduli kepada rakyat kecil dan bertanggung jawab
1.46.	Serius memberantas KKN
1.47.	Serius memperjuangkan nasib rakyat
1.48.	Tidak curang dan tidak korupsi
1.49.	Tidak KKN dan merakyat
1.50.	Tidak KKN, jujur dan merakyat
1.51.	Tidak korupsi
1.52.	Tidak korupsi
1.53.	Tidak korupsi
1.54.	Tidak korupsi
1.55.	Tidak lupa dengan janjinya saat kampanye
1.56.	Tidak melakukan korupsi
1.57.	Tidak memicu terjadinya bentrokan antar warga masyarakat
1.58.	Tidak menjawab
II.	RESPONDEN DI KABUPATEN SAMPANG

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Anggota Legislatif
1	2
2.1.	Anti KKN
2.2.	Bebas dari KKN
2.3.	Bebas dari korupsi
2.4.	Bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara
2.5.	Berjuang menentramkan masyarakat
2.6.	Berjuang sesuai dengan aspirasi rakyat dan tidak semena-mena
2.7.	Berjuang untuk kepentingan bangsa bukan hanya kepentingan partai
2.8.	Berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk diri sendiri
2.9.	Berjuang untuk memajukan bangsa dan negara
2.10.	Berpihak kepada kepentingan rakyat
2.11.	Bersih dari KKN
2.12.	Bersikap adil dan bijaksana
2.13.	Berusaha menepati janji dan tidak korupsi
2.14.	Lebih amanah dan tidak berdusta
2.15.	Lebih baik dari anggota legislatif sebelumnya
2.16.	Lebih cerdas dari yang sebelumnya
2.17.	Mau berjuang untuk menambah lapangan kerja
2.18.	Mau dan bisa mendengar suara rakyat dan tidak korupsi
2.19.	Mau memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili
2.20.	Mau mencari dan memperjuangkan aspirasi rakyat
2.21.	Memberi contoh yang baik dalam membangun kemajuan bangsa
2.22.	Memberikan sumbangan yang positif kepada proses pembangunan
2.23.	Memenuhi atau menepati janji saat kampanye dan tidak korup
2.24.	Mengerti dengan keinginan rakyat
2.25.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2.26.	Menunjukkan bukti atas janji yang disampaikan waktu kampanye
2.27.	Selalu dekat dengan rakyat dan tidak hanya waktu pemilu
2.28.	Serius memberantas KKN
2.29.	Serius memberantas KKN dan memperjuangkan nasib rakyat kecil
2.30.	Setelah dapat kursi tidak lupa dengan harapan rakyat yang memilihnya
2.31.	Tidak KKN
2.32.	Tidak korupsi
2.33.	Tidak lupa dengan janjinya saat kampanye
2.34.	Tidak melakukan korupsi
2.35.	Tidak melupakan janji yang disampaikan waktu kampanye
2.36.	Tidak mementingkan kepentingan sendiri dan partainya
2.37.	Tidak mengingkari janjinya kepada rakyat
2.38.	Tidak menjawab
2.39.	Tidak menjawab
2.40.	Tidak menjawab

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Anggota Legislatif
1	2
III.	RESPONDEN DI KABUPATEN MALANG
3.1.	Anti KKN
3.2.	Bekerja maksimal untuk mewujudkan janjinya saat kampanye
3.3.	Bekerja untuk mewujudkan janji saat kampanye
3.4.	Benar-benar memperjuangkan nasib rakyat kecil
3.5.	Berbuat sesuai slogan dari rakyat untuk rakyat
3.6.	Berjuang memberantas KKN
3.7.	Berjuang untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju
3.8.	Bertanggung jawab menepati janjinya
3.9.	Berusaha melaksanakan tugas dengan baik
3.10.	Berusaha memperbaiki kesalahan atau kekurangan para pendahulunya
3.11.	Berusaha mensejahterakan rakyat
3.12.	Berusaha merubah nasib rakyat kecil
3.13.	Bisa memajukan bangsa
3.14.	Bisa memajukan negara ke arah yang lebih baik
3.15.	Bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju
3.16.	Bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik
3.17.	Bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat
3.18.	Bisa menepati janji dan adil terhadap rakyat
3.19.	Bisa mengubah Indonesia menjadi negara yang maju
3.20.	Cerdas dalam menyelesaikan masalah bangsa dan negara
3.21.	Jujur dan berjuang mensejahterakan rakyat
3.22.	Konsekuen memperjuangkan janjinya kepada rakyat saat kampanye
3.23.	Konsisten menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat
3.24.	Lebih memperhatikan rakyat
3.25.	Lebih peka dalam menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat
3.26.	Mampu menepati janjinya dan tidak KKN
3.27.	Mau mendengar dan menerima serta memperjuangkan aspirasi rakyat
3.28.	Melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik
3.29.	Melaksanakan tugas dengan baik agar bisa menepati janjinya
3.30.	Membawa perubahan ke arah yang lebih baik
3.31.	Memenuhi janjinya
3.32.	Memperhatikan aspirasi rakyat
3.33.	Memperhatikan aspirasi rakyat
3.34.	Mendengar dan menerima aspirasi rakyat
3.35.	Mendengarkan suara rakyat dan dapat mengamalkan pancasila
3.36.	Menepati janji agar tercapai masyarakat yang makmur
3.37.	Menepati janji, mensejahterakan rakyat dan menghapus KKN
3.38.	Menjalankan tugas demi terwujudnya kesejahteraan rakyat
3.39.	Menjalankan tugas dengan baik

No	Harapan Responden Yang Ikut Memilih Kepada Anggota Legislatif
1	2
3.40.	Menyiapkan kader yang berkualitas
3.41.	Peduli dengan rakyat kecil
3.42.	Peduli terhadap kelangsungan hidup rakyat dan bangsa
3.43.	Serius untuk menepati janjinya
3.44.	Terus berjuang untuk menjadi partai yang dipilih rakyat
3.45.	Tidak diskriminatif dalam mengemban dan menjalankan tugas negara
3.46.	Tidak KKN
3.47.	Tidak korupsi
3.48.	Tidak mengecewakan para pemilihnya daan tidak KKN
3.49.	Tidak mengumbar janji palsu
3.50.	Tidak menjawab
3.51.	Tidak menjawab
3.52.	Tidak menjawab

Tabel 5.19.

Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Yang Akan Datang

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014
1	2
I.	RESPONDEN DI KABUPATEN PONOROGO
1.1.	Belum tahu
1.2.	Belum tahu
1.3.	Belum tahu
1.4.	Belum tahu
1.5.	Belum tahu
1.6.	Belum tahu
1.7.	Belum tahu
1.8.	Belum tahu
1.9.	Belum tahu
1.10.	Belum tahu
1.11.	Belum tahu
1.12.	Berdampak positif pada perbaikan masa depan bangsa
1.13.	Berjalan dengan baik
1.14.	Berjalan sesuai asas pemilu
1.15.	Berjalan sesuai aturan yang ada
1.16.	Berjalan sesuai dengan asas pemilu
1.17.	Bersih dan tidak ada kecurangan
1.18.	Bisa menghasilkan anggota legislatif dan pemimpin bangsa yang amanah

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014
1	2
1.19.	Bisa menghasilkan Anggota legislatif dan pemimpin yang bijaksana
1.20.	Bisa menghasilkan pemimpin yang amanah
1.21.	Dilaksanakan secara sportif dan tidak pakai uang sogokan
1.22.	Jujur dan adil
1.23.	Jujur dan adil
1.24.	Jujur dan tidak ada jual beli suara
1.25.	Jujur dan tidak ada yang main uang
1.26.	Jujur dan tidak main uang
1.27.	Jujur, aman dan tertib
1.28.	Jujur, aman dan tertib
1.29.	Jujur, aman dan tertib
1.30.	Jujura, aman, dan tertib
1.31.	Kontestan/pendukungnya tidak memicu terjadinya kericuhan/kekacauan
1.32.	L abik dari yang lampau
1.33.	Lebih bagus dari yang dulu
1.34.	Lebih baik dari sebelumnya
1.35.	Lebih baik dari sebelumnya
1.36.	Lebih baik dari sebelumnya
1.37.	Lebih baik dari yang dulu-dulu
1.38.	Lebih baik dari yang sebelumnya
1.39.	Lebih jujur dan tak ada manipulasi
1.40.	Mengakibatkan terjadinya perubahan di Indonesia menjadi lebih baik
1.41.	Menghasilkan pemimpin yang jujur, tegas dan bijaksana
1.42.	Pemenangnya adalah calon yang terbaik
1.43.	Pemenangnya harus jujur
1.44.	Semoga sukses
1.45.	Tidak ada politik uang
1.46.	Tidak ada sogokan
1.47.	Tidak ada sogok-sogokan
1.48.	Tidak ada yang membeli suara pemilih
1.49.	Tidak ada yang membeli suara rakyat
1.50.	Tidak dikotori oleh politik uang
1.51.	Tidak menjawab
1.52.	Tidak menjawab
1.53.	Tidak menjawab
1.54.	Tidak menjawab
1.55.	Tidak menjawab
1.56.	Tidak menjawab
1.57.	Tidak menjawab
1.58.	Tidak menjawab

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014
1	2
II.	RESPONDEN DI KABUPATEN SAMPANG
2.1.	Bebas dari politik uang
2.2.	Bebas dari politik uang
2.3.	Berdampak positif bagi perbaikan demokrasi
2.4.	Berjalan dengan lancar
2.5.	Berjalan lancar
2.6.	Berjalan sebagaimana mestinya
2.7.	Berani menindak tegas orang yang melanggar
2.8.	Jujur adil dan tidak pakai politik uang
2.9.	Jujur, adil dan sukses
2.10.	Jujur, adil dan tidak ada politik uang
2.11.	Lancar sesuai harapan masyarakat banyak
2.12.	Lebih bagus dari penyelenggaraan pemilu yang lalu
2.13.	Lebih bagus dari sebelumnya
2.14.	Lebih baik dari sebelumnya
2.15.	Lebih baik dari sebelumnya
2.16.	Para kontestan berjuang secara sportif
2.17.	Pelaksananya jujur dan adil
2.18.	Semoga sukses
2.19.	Sukses
2.20.	Sungguh-sungguh dilakukan secara adil dan jujur
2.21.	Tidaak ada kecurangan dan jujur
2.22.	Tidak ada jual beli suara
2.23.	Tidak ada keributan atau kericuhan
2.24.	Tidak ada manipulasi suara
2.25.	Tidak ada manipulasi suara
2.26.	Tidak ada politik uang
2.27.	Tidak ada politik uang atau jual beli suara
2.28.	Tidak ada politik uang dan serangan pajar
2.29.	Tidak ada politik uang untuk mendapatkan suara
2.30.	Tidak ada serangan pajar
2.31.	Tidak ada serangan pajar atau jual beli suara
2.32.	Tidak ada yang golput dan yang pakai politik uang
2.33.	Tidak ada yang pakai politik uang
2.34.	Tidak memihak kepada kontestan tertentu
2.35.	Tidak menjawab
2.36.	Tidak menjawab
2.37.	Tidak menjawab
2.38.	Tidak menjawab
2.39.	Tidak menjawab

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014
1	2
2.40.	Tidak menjawab
III.	RESPONDEN DI KABUPATEN MALANG
3.1.	Adil dan jujur
3.2.	Adil, jujur, dan tak ada kecurangan
3.3.	Aman, terbit dan sukses
3.4.	Bebas dari kecurangan
3.5.	Berjalan lancar dan tak ada kecurangan
3.6.	Betul-betul demokratis
3.7.	Bisa meminimalkan kecurangan
3.8.	Bisa menghilangkan segala kekurangan
3.9.	Dapat menghasilkan anggota legislatif yang bermutu
3.10.	Harus lebih jujur dan adil
3.11.	Harus LUBER dan JURDIL
3.12.	Jujur dan adil
3.13.	Jujur dan adil
3.14.	Jujur dan adil
3.15.	Jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia
3.16.	Lebih baik dan tak banyak yang golput
3.17.	Lebih baik dan tidak banyak golputnya
3.18.	Lebih baik dari yang sebelumnya
3.19.	Lebih baik dari yang sebelumnya
3.20.	Lebih baik dari yang sebelumnya
3.21.	Lebih demokratis dan tidak ada yang golput
3.22.	Lebih demokratis dan tidak ada yang golput
3.23.	Lebih demokratis dan tidak ada yang golput
3.24.	Lebih jujur dan adil
3.25.	Lebih jujur dan adil
3.26.	Lebih jujur dan tidak pakai politik uang
3.27.	Lebih LUBER dan JURDIL
3.28.	Lebih LUBER dan JURDIL
3.29.	Membawa perubahan yang lebih baik
3.30.	Para pemenangnya berjuang untuk memajukan bangsa
3.31.	Pelanggaran semakin berkurang
3.32.	Pihak yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas atau dihukum
3.33.	Semua yang berhak didaftar sebagai pemilih dan tidak ada manipulasi
3.34.	Semua yang berhak memilih ikut memilih atau tidak ada yang golput
3.35.	Sosialisasinya harus dilakukan secara intensip supaya tak banyak golputnya
3.36.	Terbuka dan jujur
3.37.	Tertib dan tidak banyak terjadi pelanggaran
3.38.	Tidak ada kecurangan dan kericuhan

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014
<i>1</i>	<i>2</i>
3.39.	Tidak ada kecurangan dan kericuhan
3.40.	Tidak ada kecurangan yang terjadi
3.41.	Tidak ada kecurangan yang terjadi
3.42.	Tidak ada kecurangan yang terjadi
3.43.	Tidak ada penyelewengan dan pelanggaran
3.44.	Tidak ada politik uang
3.45.	Tidak ada politik uang
3.46.	Tidak banyak golputnya
3.47.	Tidak banyak yang golpuJujur dan adilt
3.48.	Tidak menjawab
3.49.	Tidak menjawab
3.50.	Tidak menjawab
3.51.	Tidak menjawab
3.52.	Tidak menjawab

Tabel 5.20.
Harapan Responden Yang Ikut Memilih Terhadap Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur dan Presiden/Wakil Presiden Terpilih Pada Pemilu Yang Akan Datang

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Calon		
	Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih	Presiden/Wakil Presiden Terpilih
1	2	3	4
I.	RESPONDEN DI KABUPATEN PONOROGO		
1.1.	Adil dan jujur	Adil dan jujur	Adil dan jujur
1.2.	Adil dan jujur	Adil dan jujur	Adil dan jujur
1.3.	Adil dan tidak korupsi	Adil dan tidak korupsi	Adil dan tidak korupsi
1.4.	Belum tahu	Belum tahu	Belum tahu
1.5.	Belum tahu	Belum tahu	Belum tahu
1.6.	Belum tahu	Belum tahu	Belum tahu
1.7.	Berani berantas KKN	Belum tahu	Berani membrantas korupsi
1.8.	Beriman dan bertanggung jawab	Berani berantas KKN	Berani membrantas korupsi
1.9.	Bijaksana dan tidak korupsi	Beriman dan bertanggung jawab	Berani membrantas korupsi
1.10.	Bijaksana dan tidak korupsi	Bijaksana dan tidak korupsi	Beriman dan bertanggung jawab
1.11.	Bijaksana dan tidak korupsi	Bijaksana dan tidak korupsi	Bijaksana dan tidak korupsi
1.12.	Bijaksana dan tidak korupsi	Bijaksana dan tidak korupsi	Bijaksana dan tidak korupsi
1.13.	Bisa berhasil	Bijaksana, jujur dan tidak korupsi	Bijaksana, adil dan tidak korupsi
1.14.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa berhasil	Bijaksana, tegas dan tidak korupsi
1.15.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa berhasil
1.16.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa memajukan bangsa dan negara

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Calon		
	Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih	Presiden/Wakil Presiden Terpilih
1	2	3	4
1.17.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa memajukan Indonesia
1.18.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa memajukan Indonesia
1.19.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa memajukan Indonesia
1.20.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa memajukan Indonesia
1.21.	Bisa memakmurkan hidup rakyat	Bisa memakmurkan hidup rakyat	Bisa memajukan Indonesia
1.22.	Bisa memakmurkan rakyat	Bisa memakmurkan hidup rakyat	Bisa memakmurkan hidup rakyat
1.23.	Bisa membawa perubahan yang baik	Bisa membawa perubahan yang baik	Bisa memakmurkan hidup rakyat
1.24.	Bisa membuat rasa tentram	Bisa membuat rakyat hidup damai	Bisa membawa perubahan yang baik
1.25.	Bisa menjadi panutan	Bisa membuat rasa tentram	Bisa memberantas Korupsi
1.26.	Bisa menjadi panutan	Bisa menjadi panutan	Bisa menciptakan ketentraman
1.27.	Bisa menjadi panutan	Bisa menjadi panutan	Bisa menjadi panutan
1.28.	Bisa menjadi pemimpin yang bijak	Bisa menjadi panutan	Bisa menjadi panutan
1.29.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menjadi pemimpin yang bijak	Bisa menjadi panutan
1.30.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menjadi pemimpin yang bijak
1.31.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat
1.32.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat
1.33.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat
1.34.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat
1.35.	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat
1.36.	Cerdas dan berwibawa	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa menyejahterakan rakyat
1.37.	Dekat dengan rakyat	Cerdas dan berwibawa	Bisa menyejahterakan rakyat

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Calon		
	Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih	Presiden/Wakil Presiden Terpilih
1	2	3	4
1.38.	Dekat dengan rakyat	Dekat dengan rakyat	Bisa mewujudkan visi dan misinya
1.39.	Jujur dan adil	Dekat dengan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat
1.40.	Jujur tidak korupsi	Jujur dan adil	Cerdas, berwibawa dan tegas
1.41.	Jujur tidak korupsi	Jujur dan tidak korupsi	Tidak menjawab
1.42.	Lebih bertanggung jawab	Jujur dan tidak korupsi	
1.43.	Membuat perubahan lebih baik	Lebih bertanggung jawab	
1.44.	Memperhatikan rakyat kecil	Membuat perubahan lebih baik	
1.45.		Memperhatikan rakyat kecil	
1.46.		Mengayomi rakyat	
1.47.		Peduli rakyat kecil	
1.48.		Sanggup memajukan Jatim	
1.49.		Tidak korupsi	
II.	RESPONDEN DI KABUPATEN SAMPANG		
2.1.	Bebas dari KKN	Bebas dari KKN	Bebas dari KKN
2.2.	Belum tahu	Belum tahu	Belum tahu
2.3.	Berani berantas KKN	Berani berantas KKN	Berani melakukan perubahan
2.4.	Berani melakukan perubahan	Berani melakukan perubahan	Berani membrantas korupsi
2.5.	Beriman dan bertanggung jawab	Beriman dan bertanggung jawab	Beriman dan bertanggung jawab
2.6.	Berpihak pada rakyat kecil	Berpihak pada rakyat kecil	Berpihak pada rakyat kecil
2.7.	Bersih dari KKN	Bersih dari KKN	Bersih dari KKN
2.8.	Bertanggung jawab dan jujur	Bertanggung jawab dan jujur	Bertanggung jawab dan jujur

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Calon		
	Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih	Presiden/Wakil Presiden Terpilih
1	2	3	4
2.9.	Bijaksana dalam memimpin	Bijaksana dalam memimpin	Bijaksana dalam memimpin
2.10.	Bijaksana dan tegas	Bijaksana dan tegas	Bijaksana dan tegas
2.11.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa memajukan Indonesia
2.12.	Bisa memakmurkan hidup rakyat	Bisa memakmurkan hidup rakyat	Bisa memakmurkan hidup rakyat
2.13.	Bisa memberantas kemiskinan	Bisa memberantas kemiskinan	Bisa memberantas kemiskinan
2.14.	Bisa membuat kemajuan daerah saya	Bisa membuat kemajuan Jatim	Bisa memberantas Korupsi
2.15.	Bisa membuat rasa tentram	Bisa membuat rasa tentram	Bisa membuat kemajuan Indonesia
2.16.	Bisa membuktikan janjinya	Bisa membuktikan janjinya	Bisa memenuhi harapan rakyat
2.17.	Bisa memenuhi harapan rakyat	Bisa memenuhi harapan rakyat	Bisa menambah lapangan kerja
2.18.	Bisa menambah lapangan kerja	Bisa menambah lapangan kerja	Bisa menciptakan ketentraman
2.19.	Bisa menepati janji waktu kampanye	Bisa menepati janjinya waktu kampanye	Bisa menepati janjinya waktu kampanye
2.20.	Bisa menjadi teladan	Bisa menjadi teladan	Bisa menepati janjinya waktu kampanye
2.21.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menjadi teladan
2.22.	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa menyejahterakan rakyat
2.23.	Jujur dan adil	Jujur dan adil	Bisa mewujudkan visi dan misinya
2.24.	Jujur tidak korupsi	Jujur dan tidak korupsi	Jujur adil tidak korupsi
2.25.	Jujur tidak korupsi	Jujur dan tidak korupsi	Jujur dan adil
2.26.	Lebih baik dan merakyat	Lebih baik dan merakyat	Lebih baik dan peduli merakyat
2.27.	Lebih baik dan peduli rakyat kecil	Lebih baik dan peduli rakyat kecil	Lebih baik dan peduli rakyat kecil
2.28.	Lebih baik dari sebelumnya	Lebih baik dari sebelumnya	Lebih baik dari sebelumnya
2.29.	Lebih baik dari yang sekarang	Lebih baik dari yang sekarang	Lebih baik dari yang sekarang

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Calon		
	Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih	Presiden/Wakil Presiden Terpilih
1	2	3	4
2.30.	Lebih merakyat	Lebih merakyat	Lebih merakyat
2.31.	Lebih merakyat	Lebih merakyat	Lebih merakyat
2.32.	Mengerti harapan rakyat kecil	Mengerti harapan rakyat kecil	Mengerti harapan rakyat kecil
2.33.	Mengerti harapan rakyat kecil	Mengerti harapan rakyat kecil	Mengerti harapan rakyat kecil
2.34.	Peduli rakyat kecil	Peduli pada rakyat kecil	Peduli pada rakyat kecil
2.35.	Peduli terhadap rakyat kecil	Peduli rakyat kecil	Peduli rakyat kecil
2.36.	Semoga bisa memajukan daerah saya	Semoga bisa memajukan Jatim	Semoga bisa memajukan Indonesia
2.37.	Tidak korupsi	Tidak Korupsi	Tegas berantas Korupsi
2.38.	Tidak korupsi	Tidak korupsi	Tegas dan anti korupsi
2.39.	Tidak menjawab	Tidak menjawab	Tidak menjawab
2.40.	Tidak punya harapan	Tidak punya harapan	Tidak menjawab
2.41.			Tidak menjawab
2.42.			Tidak punya harapan
III.	RESPONDEN DI KABUPATEN MALANG		
3.1.	Berani berantas KKN	Berani berantas KKN	Berani membrantas korupsi
3.2.	Beriman dan bertanggung jawab	Beriman dan bertanggung jawab	Beriman dan bertanggung jawab
3.3.	Beriman dan bertanggung jawab	Beriman dan bertanggung jawab	Beriman dan bertanggung jawab
3.4.	Beriman dan bertanggung jawab	Beriman dan bertanggung jawab	Beriman dan bertanggung jawab
3.5.	Berusaha memakmurkan daerah	Berusaha memakmurkan Jatim	Berusaha memakmurkan Indonesia
3.6.	Bijaksana dan tidak korupsi	Bijaksana dan tidak korupsi	Bijaksana, adil dan tidak korupsi
3.7.	Bijaksana dan tidak korupsi	Bijaksana, jujur dan tidak korupsi	Bijaksana, tegas dan tidak korupsi

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Calon		
	Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih	Presiden/Wakil Presiden Terpilih
1	2	3	4
3.8.	Bisa berhasil	Bisa berhasil	Bisa berhasil
3.9.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa mebuat Indonesia jadi lebih baik
3.10.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa memajukan Indonesia
3.11.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa memajukan Indonesia
3.12.	Bisa memajukan daerah saya	Bisa memajukan Jatim	Bisa memajukan Indonesia
3.13.	Bisa memakmurkan hidup rakyat	Bisa memakmurkan hidup rakyat	Bisa memajukan Indonesia
3.14.	Bisa memakmurkan hidup rakyat	Bisa memakmurkan hidup rakyat	Bisa memajukan Indonesia
3.15.	Bisa memberantas kemiskinan	Bisa memberantas kemiskinan	Bisa memakmurkan hidup rakyat
3.16.	Bisa membuat daerah jadi lebih baik	Bisa membuat Jatim jadi lebih baik	Bisa memakmurkan hidup rakyat
3.17.	Bisa membuat daerah lebih baik	Bisa membuat Jatim lebih baik	Bisa memberantas kemiskinan
3.18.	Bisa membuat rasa tentram	Bisa membuat rasa tentram	Bisa memberantas Korupsi
3.19.	Bisa membuat rasa tentram	Bisa membuat rasa tentram	Bisa membuat Indonesia lebih baik
3.20.	Bisa memperbaiki kondisi daerah	Bisa memperbaiki kondisi Jatim	Bisa menambah lapangan kerja
3.21.	Bisa menambah lapangan kerja	Bisa menambah lapangan kerja	Bisa mencapai visi dan misinya
3.22.	Bisa mencapai misi dan misinya	Bisa mencapai visi dan misinya	Bisa menciptakan ketentraman
3.23.	Bisa mengurangi pengangguran	Bisa mengurangi pengangguran	Bisa menciptakan ketentraman
3.24.	Bisa menjadi panutan	Bisa menjadi panutan	Bisa mengurangi pengangguran
3.25.	Bisa menjadi pemimpin yang bijak	Bisa menjadi pemimpin yang bijak	Bisa menjadi panutan
3.26.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menjadi pemimpin yang bijak
3.27.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat
3.28.	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat	Bisa menyejahterakan rakyat

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Calon		
	Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih	Presiden/Wakil Presiden Terpilih
1	2	3	4
3.29.	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa menyejahterakan rakyat
3.30.	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa mewujudkan visi dan misinya
3.31.	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa mewujudkan visi dan misinya	Bisa mewujudkan visi dan misinya
3.32.	Cerdas dan berwibawa	Cerdas dan berwibawa	Bisa mewujudkan visi dan misinya
3.33.	Dekat dengan rakyat	Dekat dengan rakyat	Cerdas, berwibawa dan tegas
3.34.	Jujur dan adil	Jujur dan adil	Jujur adil tidak korupsi
3.35.	Jujur dan adil	Jujur dan adil	Jujur adil tidak korupsi
3.36.	Jujur tidak korupsi	Jujur dan tidak korupsi	Jujur dan adil
3.37.	Jujur tidak korupsi	Jujur dan tidak korupsi	Jujur dan adil
3.38.	Jujur tidak korupsi	Jujur dan tidak korupsi	Lebih merakyat
3.39.	Jujur tidak korupsi	Jujur dan tidak korupsi	Membuat perubahan lebih baik
3.40.	Lebih merakyat	Lebih merakyat	Mengayomi rakyat
3.41.	Membuat perubahan lebih baik	Membuat perubahan lebih baik	Mengayomi rakyat
3.42.	Mengayomi rakyat	Mengayomi rakyat	Peduli dengan rakyat kecil
3.43.	Mengayomi rakyat	Mengayomi rakyat	Peduli rakyat kecil
3.44.	Peduli dengan rakyat kecil	Peduli dengan rakyat kecil	Peduli rakyat kecil
3.45.	Peduli rakyat kecil	Peduli rakyat kecil	Peduli rakyat kecil
3.46.	Peduli rakyat kecil	Peduli rakyat kecil	Sanggup memajukan Indonesia
3.47.	Peduli rakyat kecil	Peduli rakyat kecil	Tegas berantas Korupsi
3.48.	Sanggup memajukan daerah saya	Sanggup memajukan Jatim	Tegas dan anti korupsi
3.49.	Tidak korupsi	Tidak menjawab	Tegas dan anti korupsi

No	Harapan Responden Yang ikut Memilih Terhadap Calon		
	Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih	Presiden/Wakil Presiden Terpilih
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3.50.	Tidak korupsi	Tidak korupsi	Tegas dan anti korupsi
3.51.	Tidak melakukan KKN	Tidak Korupsi	Tegas memberantas KKN
3.52.	Tidak menjawab	Tidak melakukan KKN	Tidak menjawab
3.53.	Tidak menjawab	Tidak menjawab	Tidak menjawab
3.54.	Tidak menjawab	Tidak menjawab	Tidak menjawab
3.55.	Tidak menjawab		Tidak menjawab

5.6. Profil dan Pola Afiliasi Organisasi Kepemudaan

5.6.1. Ikatan Pelajar Nahdlatul Utama (IPNU)

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah organisasi yang berada di bawah naungan jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU). IPNU merupakan tempat berhimpun, wadah komunikasi, aktualisasi dan kaderisasi Pelajar-Pelajar NU. Selain itu IPNU juga merupakan bagian integral dari potensi generasi muda Indonesia yang menitikberatkan bidang garapannya pada pembinaan dan pengembangan remaja, terutama kalangan pelajar (siswa dan santri).

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda Indonesia, IPNU senantiasa berpedoman pada nilai-nilai serta garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan Islam *ahlusunnah wal jamaah*. Dalam konteks kebangsaan, IPNU memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk melakukan fungsi dan mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, IPNU harus merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dengan senantiasa memperhatikan dinamika internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, kepentingan dan keterkaitan IPNU dengan banyak pihak (*stakeholders*) juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Garis-garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU disusun dengan maksud agar setiap aktivitas IPNU senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan dan pengabdian; dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

GBPPP IPNU merupakan kerangka pemikiran dalam meletakkan arah bagi penyelenggaraan kegiatan organisasi, sehingga pencapaian sasaran utamanya dapat dilakukan dengan baik dan tepat. GBPPP IPNU menjadi kerangka acuan untuk menetapkan kebijakan organisasi dan menjadi panduan dalam merumuskan program-programnya, dengan tujuan:

1. Memantapkan keberadaan dan peran organisasi dalam memenuhi kepentingan anggota dan masyarakat untuk menopang perjuangan IPNU.

2. Mengembangkan potensi anggota secara kritis dan kreatif dalam mewujudkan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Meletakkan kerangka landasan bagi perjuangan organisasi berikutnya, secara berencana dan berkesinambungan.

Rumusan yang tercantum dalam GBPPP IPNU mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu: dasar pengembangan program, visi dan misi, analisis strategis pengembangan, dan pokok-pokok program pengembangan.

Dasar pengembangan program terdiri atas mandat organisasi, nilai-nilai yang menjadi pedoman serta azas-azas pengembangan. Visi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai IPNU ke depan, sedangkan untuk mencapai visi tersebut IPNU mengemban misi. Analisis strategis pengembangan mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, analisis SWOT serta analisis jaringan. Sedangkan pokok-pokok program pengembangan terdiri atas isu-isu strategis yang selanjutnya memunculkan rumusan program-program dasar pengembangan.

Sebagai sebuah organisasi, IPNU memiliki visi, yakni gambaran terhadap apa yang ingin dicapai. Visi IPNU adalah *terwujudnya pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar ajaran Islam ahlussunah wal jamaah.*

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka IPNU mempunyai misi melakukan pembinaan dan pemberdayaan para pelajar (siswa dan santri), serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan pada pelajar tersebut.

Tabel 5.21.
Afiliasi Pemilih Pemula Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
n = 10

No	Pola Afiliasi	Jumlah
1	2	3
1	Pola Afiliasi Partai Politik	9
2	Popularitas	8
3	Merujuk pendapat teman	4
4	Merujuk pendapat guru	3
5	Merujuk pendapat orang tua/keluarga	5
6	Jenis kelamin	8
7	Usia	8
8	Track Record	9
9	Pengalaman berpolitik	7

5.6.2. Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM)

Organisasi ini bernama Ikatan Remaja Muhammadiyah disingkat IRM adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma`ruf nahi mungkar di kalangan remaja, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Ikatan Remaja Muhammadiyah merupakan pergantian nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang didirikan di Surakarta pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Miladiyah, berkedudukan di tempat Pimpinan Pusat.

Maksud dan Tujuan IRM yaitu “Terbentuknya remaja muslim yang berakhlaq mulia dan berilmu dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT”.

Anggota Ikatan Remaja Muhammadiyah adalah :

1. Remaja muslim yang bersekolah di perguruan Muhammadiyah tingkat SLTP/ sederajat dan atau SMU/ sederajat.
2. Remaja muslim yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 21 tahun

3. Mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan huruf a dan b, dan atau seseorang yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal 24 tahun.

Usaha yang dijalankan oleh IRM adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlaq
2. Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran-Nya.
3. Memperdalam, memajukan dan meningkatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Budaya.
4. Membimbing, membina dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran IRM sebagai kader persyarikatan, umat dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju terbentuknya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta`ala.
5. Meningkatkan amal shalih dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
6. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.

Tabel 5.22.

Afiliasi Pemilih Pemula Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) n = 10

No	Pola Afiliasi	Jumlah
1	2	3
1	Pola Afiliasi Partai Politik	9
2	Popularitas	9
3	Merujuk pendapat teman	3
4	Merujuk pendapat guru	0
5	Merujuk pendapat orang tua/keluarga	2
6	Jenis kelamin	8
7	Usia	8
8	Track Record	9
9	Pengalaman berpolitik	7

5.6.3. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia disingkat dengan nama AMPI, didirikan pada hari Sabtu, 28 Juni 1978 di Pandaan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

AMPI, mempunyai bertujuan membentuk kader-kader bangsa pelopor pembaharuan dan pembangunan yang berorientasi karya dan kekaryaan, serta memiliki jiwa dan semangat patriotisme untuk mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai perwujudan dari pemikiran yang mendasar mengenai keberadaan dan Pedoman Perjuangan AMPI maka LANDASAN PERJUANGAN ini memuat hal-hal yang menyangkut masalah motivasi Keberadaan AMPI, hakekat Keberadaan AMPI dan strategi Perkembangan AMPI.

Sejak awal kebangkitan Orde Baru, makin terasa kebutuhan akan adanya suatu kekuatan sosial politik yang kuat dan dominan serta efektif untuk melaksanakan pembaharuan dan pembangunan berdasarkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, halmana tidak memperoleh dukungan kondisi di dalam system politik pada masa sebelumnya.

Kekuatan politik semacam itu haruslah cukup kuat dan efektif serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang sehingga efektif pula untuk menunjang adanya stabilitas politik yang dinamis sebagai prasyarat bagi kelangsungan pertumbuhan dan pembangunan yang mantap.

Di dalam kerangka dan konfigurasi politik di Indonesia seperti itulah Golongan Karya tampak sebagai alternatif dengan membawa suatu orientasi baru yang menjelma di dalam pemikiran-pemikiran serta tindakan-tindakan dalam memecahkan problem bangsa disegala aspek kehidupan.

Dalam beberapa kali Pemilihan Umum dimasa Orde Baru Golongan Karya telah berhasil memperoleh kepercayaan rakyat untuk memegang peranan yang dominan dalam kehidupan Bangsa dan Negara.

Peranan yang dominan itu perlu dan harus dipertahankan sehingga Golongan Karya cukup mempunyai waktu dan kesempatan untuk merealisasikan

cita-cita dan programnya. Misi untuk mengisi dan mempertahankan peranan yang dominan Golongan Karya itu menyebabkan peranan kekuatan generasi muda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya yaitu generasi muda yang menyalurkan aspirasi politik melalui Golongan Karya, sekaligus sebagai pewaris cita-cita perjuangan Golongan Karya menjadi sangat penting untuk ditumbuhkan, dibina dan diperkembangkan.

Sejak awal kebangkitan Orde Baru secara nyata terdapat adanya keragaman pertumbuhan, pembinaan dan perkembangan generasi muda yang berorientasi kepada Kekaryaannya atau tegasnya generasi muda Golongan Karya baik dalam bentuk maupun modus operasionalnya, sehingga generasi muda dalam tubuh Golongan Karya belum menampilkan secara nyata solidaritas serta kekuatan pokok dalam mendukung perjuangan Golongan Karya pada umumnya serta menumbuhkan persamaan dan persatuan yang mendasar dalam visi persepsi serta sikap-sikap politik dalam dirinya. Dapat dilihat kenyataan dimasa-masa lalu bahwa meskipun berbagai organisasi pemuda menyatakan diri dan memberikan pengakuan bernaung di bawah Golongan Karya akan tetapi masih jelas kelihatan faksi-faksi struktural berdasarkan sumber asalnya masing-masing, sehingga kurang memungkinkan adanya pembinaan yang terpadu dan sistematis.

Sebelum terbentuknya AMPI keorganisasi Golongan Karya melakukan pembinaan/pengembangan generasi muda dalam bentuk operasional tidak langsung, sebagai konsekwensi logis dari system Keanggotaan “masa mengambang” yang dianut oleh Golongan Karya. Dengan demikian, berkembanglah Organisasi-organisasi Kepemudaan Golongan Karya yang mengambil sumber penggugah jiwa perjuangan nasionalnya pada kebangsaan Daerah seperti: Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Angkatan Muda Brawijaya (AMUBRA), Angkatan Muda Diponegoro (AMD), Angkatan Muda Sriwijaya (AMSRI) dan sebagainya, sedangkan Unsur-unsur Organisasi Kepemudaan yang lain bersumber dari Kino-Kino seperti : Generasi Muda SOKSI, Generasi Muda MKGR, Generasi Muda KOSGORO, Eksponen Angkatan 66 dan lain-lain terkadang menimbulkan kurangnya keterpaduan pemikiran, program serta komunikasi antara organisasi-organisasi tersebut tadi.

Kondisi semacam ini pada gilirannya akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pembinaan dan keterpaduan peranan generasi muda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar sebagai generasi penerus dan penerus perjuangan Golongan Karya.

Kenyataan-kenyataan seperti di atas menyebabkan tumbuhnya kesadaran dan pemikiran baru dikalangan Golongan Karya khususnya generasi mudanya, bahwa generasi muda yang menyalurkan aspirasi politik melalui Golongan Karya perlu menumbuhkan dan mengembangkan kebersamaan dan kekuatan yang lebih kukuh berdasarkan persamaan-persamaan yang mendasar dalam visi, persepsi, sikap serta program-program perjuangannya, sehingga generasi muda yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya itu akan mempunyai peranan yang berarti dan strategis sesuai dengan aspirasi politiknya dalam gerak perjuangan Golongan Karya khususnya Bangsa dan Negara pada umumnya.

Untuk itu maka perlu diwujudkan suatu wadah kebersamaan dan persatuan yang utuh bagi generasi muda yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya itu terutama dalam aspek social/politiknya. Wadah itu harus pula mampu menambahkan dan mengembangkan kepeloporan generasi muda berorientasi Karya dan Kekaryaannya dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan, serta menyiapkan kader-kader yang berkualitas dan berkepribadian dalam menyongsong tugas-tugas yang akan dipikulnya dalam rangka regenerasi.

Sadar akan kepentingan tersebut, maka melalui suatu proses pendekatan dan komunikasi antar generasi muda yang dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, maka tanggal 28 Juni 1978 di Pandaan, Jawa Timur, atau dasar kesepakatan bersama segenap generasi muda yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya, yang sadar akan tuntutan dan kebutuhan perjuangan dewasa ini maupun masa depan, melalui kebulatan tekad yang terkenal dengan "KEBULATAN TEKAD PANDAAN" berdirilah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dengan tujuan idealnya yakni turut serta memperjuangkan pembaharuan, pembangunan, keadilan dan kebenaran melalui pengabdian Kekaryaannya yang didasarkan atas jenis kerja dan atau lingkungan kerja, dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, ketajaman akal serta keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani.

Wadah inilah yang dilahirkan secara sadar oleh segenap generasi muda yang berorientasi kepada Karya dan Kekaryaannya sebagai wadah kebersamaan dan persatuan yang utuh bagi keterpaduan perjuangan yang akan diberi fungsi serta peranan secara keseluruhan, khususnya peranan social politiknya.

Kelahiran AMPI pada waktu itu merupakan hasil kesadaran dan kemauan politik bersama dari segenap generasi muda Golongan Karya sebagai wadah kebersamaan dan persatuan yang utuh bagi perjuangan pembaharuan dan pembangunan.

Perkembangan AMPI sejak kelahirannya hingga sekarang telah melalui tahapan-tahapan sesuai perkembangan sosio kultural maupun perkembangan politik dan perkembangan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut adalah merupakan keharusan karena AMPI sebagai Organisasi Kepemudaan mempunyai tanggung jawab politik untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya.

Sejalan dengan upaya penataan kehidupan social politik dan kemasyarakatan terutama dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1985 dan UU No. 8 Tahun 1985, maka AMPI menegaskan kembali Motivasi Keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya dalam rangka menciptakan kader bangsa dan pembinaan peranan social politik anggotanya.

Tabel 5.23.
Afiliasi Pemilih Pemula Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
n = 10

No	Pola Afiliasi	Jumlah
1	2	3
1	Pola Afiliasi Partai Politik	9
2	Popularitas	9
3	Merujuk pendapat teman	5
4	Merujuk pendapat guru	1
5	Merujuk pendapat orang tua/keluarga	2
6	Jenis kelamin	9
7	Usia	7
8	Track Record	8
9	Pengalaman berpolitik	7

5.6.4. Taruna Merah Putih

Taruna Merah Putih didirikan sejumlah orang muda yang punya semangat dan kepedulian mewujudkan “masyarakat Indonesia yang berjiwa merdeka.” Merdeka dari kemiskinan, kebodohan... dan merdeka dari keterbelakangan dalam tatanan masyarakat global.

Taruna Merah Putih terdiri dari anak-anak muda dari berbagai latar belakang suku, agama dan profesi yang melambangkan keragaman budaya Nusantara yang amat kaya. Pada tanggal 10 Januari 2008, organisasi ini resmi mendeklarasikan diri sebagai sayap perjuangan resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).

Visi bersama yang hendak diraih... Sejarah dunia dan sejarah negeri kita sendiri menunjukkan bahwa perubahan nasib suatu bangsa selalu dimotori kaum muda. Keterpurukan suatu bangsa pun tak lain hanya bisa terjadi karena terlelanya jiwa kaum muda.

Kemandirian dalam bidang ekonomi, kedaulatan dalam politik dan kepribadian kolektif bangsa sebagai pembentuk budaya Indonesia – yang didasarkan pada pondasi kokoh kelima sila dalam Pancasila – akan lebih cepat terwujud dengan partisipasi aktif kaum muda.

Semua dapat kita mulai lewat mimpi-mimpi yang sama.

Taruna Merah Putih, karenanya, hendak menjadi wadah bagi kebangkitan dan peran pro-aktif kaum muda untuk mewujudkan mimpi kita bersama akan sebuah Indonesia yang damai, sejahtera dan maju. Indonesia yang tidak inferior, tapi membanggakan. Indonesia, The Great Archipelago!

Visi dan Misi Taruna Merah Putih

VISI

Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mewujudkan masyarakat yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

MISI

Mengajak dan membina pelajar, mahasiswa, karang taruna, profesional muda, dan pemuda kader PDI Perjuangan kepada pengenalan yang menyeluruh

tentang dinamika dan peran dalam perubahan sosial dan politik bangsa, serta mengenali sejarah pendirian dan eksistensi bangsa di tengah perubahan dunia yang cepat dan kompleks.

Bersama-sama menjadi sarana dalam memperjuangkan aspirasi pelajar, mahasiswa, karang taruna, profesional muda, dan pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan asas, jati diri dan watak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Mempersiapkan penggerak dan pemimpin yang berkarakter, bertanggung jawab, progresif, dan terampil untuk memperhaharui masyarakat, negara, dan bangsa.

Tabel 5.24.
Afiliasi Pemilih Pemula Taruna Merah Putih
n = 10

No	Pola Afiliasi	Jumlah
1	2	3
1	Pola Afiliasi Partai Politik	9
2	Popularitas	8
3	Merujuk pendapat teman	8
4	Merujuk pendapat guru	1
5	Merujuk pendapat orang tua/keluarga	1
6	Jenis kelamin	9
7	Usia	9
8	Track Record	9
9	Pengalaman berpolitik	8

5.6.5. Garda Pemuda NasDem

Gerakan perubahan restorasi Indonesia disambut oleh antusiasme yang tinggi dari kalangan muda. Karena itu, sesuai amanat Rapimnas Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat 2011 tentang pendirian sayap-sayap organisasi, Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh menugaskan Wakil Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat Martin Manurung untuk merintis pembentukan Garda Pemuda NasDem.

Menyambut geliat arus bawah Nasional Demokrat yang terus menggelora, termasuk menghimpun diri dalam gerakan perubahan di bidang politik melalui Partai NasDem, maka Martin Manurung menggandeng Wakil Sekretaris Jenderal

DPP Partai NasDem Saiful Haq untuk bersama-sama menjalankan tugas pembentukan Garda Pemuda NasDem.

Sambutan yang luas dari kalangan muda membuat pembentukan Garda Pemuda NasDem berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sehingga resmi dideklarasikan di Balai Kartini Jakarta pada 14 Juli 2011. Dalam deklarasi itu, Dewan Pimpinan Pusat beserta 560 anggota Barisan Reaksi Cepat (BARET) dilantik oleh Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Garda Pemuda NasDem.

Gerakan perubahan restorasi Indonesia disambut oleh antusiasme yang tinggi dari kalangan muda. Karena itu, sesuai amanat Rapimnas Nasional Demokrat 2011 tentang pendirian sayap-sayap organisasi, Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh menugaskan Wakil Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat Martin Manurung untuk merintis pembentukan Garda Pemuda Nasdem.

Menyambut geliat arus bawah Nasional Demokrat yang terus menggelora, termasuk menghimpun diri dalam gerakan perubahan di bidang politik melalui Partai NasDem, maka Wakil Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat Martin Manurung menggandeng Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Saiful Haq untuk bersama-sama menjalankan tugas pembentukan Garda Pemuda NasDem.

Sambutan yang luas dari kalangan muda membuat pembentukan Garda Pemuda NasDem berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sehingga resmi dideklarasikan di Balai Kartini Jakarta pada 14 Juli 2011. Dalam deklarasi yang dihadiri ribuan anak muda se Jakarta Raya itu, Dewan Pimpinan Pusat beserta 560 anggota Barisan Reaksi Cepat dilantik oleh Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Garda Pemuda NasDem.

Sejarah perubahan dituliskan dengan tinta dari keringat dan darah pemuda. Kubangan kediktatoran telah dikubur oleh pemuda, namun reformasi sampai kini belum menawarkan arah dan tujuan yang jelas bagi bangsa. Keberanian mengambil tindakan, kekayaan inovasi gagasan, kreatifitas yang kompetitif dan energi progresif seakan lumpuh dan membisu di panggung politik Indonesia. Pemuda Indonesia tak boleh berpangku tangan, kini saatnya bersuara lantang dan turut mengambil keputusan.

Garda Pemuda NasDem mendeklarasikan diri sebagai gerakan pemuda Indonesia dan mengambil pilihan untuk berperan aktif mengeluarkan kita dari

kubangan krisis, melalui jalan Restorasi Indonesia. Garda Pemuda NasDem meyakini, bahwa hanya dengan mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta pada saat yang sama melakukan inovasi kebangsaan maka kita akan keluar dari segala keterpurukan ini.

Bangsa ini butuh semangat pemuda. Bangsa ini butuh emosi, inovasi, keberanian, ketegasan dan kemauan mengambil risiko. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda, yang di dadanya tumbuh subur benih kebangsaan dan kerakyatan, yang di kepalanya berbunga gagasan-gagasan maju, yang di tangannya melekat semangat kerja keras dan pantang menyerah, serta di kakinya berakar ideologi dan keteguhan tekad yang tak akan lekang ditelan zaman.

Mari bergabung dalam barisan ini, barisan yang akan menggulung siapapun yang mencoba menghalangi tumbuhnya tunas-tunas baru, tunas-tunas muda harapan bangsa. Bangkitlah Pemuda Indonesia! Garda Pemuda Nasdem: Demi Kehormatan, Pengabdian dan Tanah Air!

Tabel 5.25.
Afiliasi Pemilih Pemula Garda Pemuda NasDem
n = 10

No	Pola Afiliasi	Jumlah
1	2	3
1	Pola Afiliasi Partai Politik	9
2	Popularitas	8
3	Merujuk pendapat teman	3
4	Merujuk pendapat guru	2
5	Merujuk pendapat orang tua/keluarga	2
6	Jenis kelamin	5
7	Usia	4
8	Track Record	9
9	Pengalaman berpolitik	9

5.6.6. Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk

masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Organisasi sosial kemasyarakatan termasuk didalamnya organisasi pemuda dan paguyuban (Undang-undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

1. Karang Taruna tumbuh dan berkembang di desa/kelurahan atau batas-batas hukum adat setempat, misalnya banjar adat, Kapung Hampoeng, Nagari, Negeri, dan lain-lain. Sedangkan Karang Taruna yang tumbuh dan berkembang di tingkat RT/RW/dusun/pedukuan/lingkungan merupakan unit yang tidak terpisahkan dan menjadi subordinasi dari Karang Taruna di desa/Kelurahan.
2. Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta rasa karsa dan karya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia
3. Karang taruna tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusahas menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna.
4. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus untuk atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karenanya setiap desa/kelurahan atau komunitas dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya yang dikelola secara otonom.
5. Gerakannya di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberi arti bahwa semua upaya dan program kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya

Karang Taruna bertujuan untuk:

1. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan

mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda;

2. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
3. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
4. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Fungsi Karang Taruna adalah :

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat. Khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
4. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
8. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang dimaksud adalah Fakir Miskin, Penyandang cacat, Anak Terlantar/Anak Jalanan/Anak Nakal, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial, Korban NAPZA, korban bencana, wanita rawan Sosial Ekonomi.

9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
10. Penyelenggara Usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Tabel 5.26.
Afiliasi Pemilih Pemula Karang Taruna n = 10

No	Pola Afiliasi	Jumlah
1	2	3
1	Pola Afiliasi Partai Politik	5
2	Popularitas	8
3	Merujuk pendapat teman	2
4	Merujuk pendapat guru	1
5	Merujuk pendapat orang tua/keluarga	0
6	Jenis kelamin	8
7	Usia	8
8	Track Record	7
9	Pengalaman berpolitik	6

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Mengacu pada deskripsi temuan penelitian di depan di depan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Estimasi proporsi pemilih pemula di Provinsi Jawa Timur terhadap jumlah konstituen di Provinsi Jawa Timur pada pemilu 2014 mendatang adalah sekitar 9,42% dari jumlah penduduk, namun itu setara dengan 14,01% dari jumlah konstituen. Pemilih pemula memiliki partisipasi politik yang relatif tinggi dalam Pemilu sehingga 18 - 20% dari pengguna hak pilih dalam Pemilu 2009 adalah Pemilih Pemula. Pola ini diasumsikan terjadi pada pemilu 2014.
2. Profil pemilih pemula di Provinsi Jawa Timur pada pemilu 2014 mendatang, menurut Usia, dan Jenis Kelamin adalah 9,42% dengan rincian sebagai berikut; umur 17 sebanyak 2,02%; umur 18 tahun sebanyak 1,90%; umur 19 tahun sebanyak 1,85%; umur 20 tahun sebanyak 1,86%; umur 21 tahun sebanyak 1,79%.
3. Komitmen Responden untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan/atau pilkada di masa mendatang (Tahun 2014 dan/atau sesudah tahun 2014) adalah sebagai berikut: a) Yang ikut memilih Legislatif sebanyak 88,23%, yang ikut memilih Bupati sebanyak 81,76%, yang ikut memilih Gubernur sebanyak 84,12% dan yang ikut memilih Presiden sebanyak 81,18%; b) Yang tidak ikut memilih Legislatif sebanyak 5,88%, yang tidak ikut memilih Bupati sebanyak 3,53%, yang tidak ikut memilih Gubernur sebanyak 4,21% dan yang tidak ikut memilih Presiden sebanyak 5,88%; c) Yang menjawab belum tahu untuk memilih Legislatif sebanyak 4,71%, Bupati sebanyak 8,83%, Gubernur sebanyak 10% dan Presiden sebanyak 10,59%; d) sedangkan yang tidak menjawab dalam memilih Legislatif sebanyak 1,18%, Bupati sebanyak 5,88%, Gubernur sebanyak 1,76% dan Presiden sebanyak 2,35%.

4. Kecenderungan afiliasi politik Responden terhadap partai politik pada Pemilu yang akan datang adalah sebagai berikut:
 - a. Demokrat dipilih atau disukai oleh 50 orang atau 33,33%,
 - b. GOLKAR dipilih atau disukai oleh 20 orang atau 13,33%,
 - c. NASDEM dipilih atau disukai oleh 18 orang atau 12,00%,
 - d. PDIP dipilih atau disukai oleh 18 orang atau 12,00%,
 - e. GERINDRA dipilih atau disukai oleh 11 orang atau 7,33%
 - f. PAN dipilih atau disukai oleh 4 orang atau 2,67%,
 - g. PKB dipilih atau disukai oleh 4 orang atau 2,67%,
 - h. PKS dipilih atau disukai oleh 3 orang atau 2,00%, dan
 - i. 14,01% belum menentukan sikap
5. Harapan Responden terhadap partai politik pemenang pemilu yang akan datang adalah dominan ingin bebas dari KKN, lebih bertanggung jawab, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
6. Harapan Responden terhadap calon anggota legislatif yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar berhasil menjadi anggota legislatif adalah dominan ingin punya Anggota Legislatif yang: Jujur, bertanggung jawab, Tidak KKN, dan Memperjuangkan aspirasi rakyat.
7. Harapan Responden terhadap Calon Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur) yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar berhasil menjadi Kepala Daerah adalah dominan ingin punya Kepala Daerah yang lebih baik dari sebelumnya, bisa memajukan daerahnya, dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
8. Harapan Responden terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mereka pilih jika yang bersangkutan benar-benar berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah dominan ingin punya Presiden dan Wakil Presiden yang bisa: memberantas KKN, memajukan Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9. Harapan Responden terhadap penyelenggaraan pemilu dan/atau pilukada yang akan berlangsung di masa mendatang adalah dominan ingin: LUBER dan JURDIL, tidak ada politik uang, dan tidak ada manipulasi suara.

10. Responden dari Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Kepemudaan lebih bersifat melembaga dan permanen (ke Partai Politik tertentu) dan bentuk partisipasi politiknya lebih variatif.
11. Pihak pemberi referensi yang menjadi rujukan dalam melakukan pilihan politik dan/atau pertimbangan yang melatarbelakangi pilihan politik di kalangan *pemilih pemula* secara berurutan adalah : saran teman dekat, saran pacar, popularitas calon, saran saudara kandung, reputasi calon (yang diketahui dari media masa), tokoh (calon) yang menjadi idola, saran orang tua, saran guru dan dari partainya.
12. Apapun adanya pemilih pemula cenderung akan menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi tersebut. Untuk itu pemilih pemula merupakan segmen konstituen yang perlu diberi pendidikan politik (program tertentu) sedemikian rupa sehingga partisipasi politiknya tidak hanya dipergunakan untuk mencari pengalaman politik yang pertama, namun pada *pemilu* periode tahun berikutnya tetap berkomitmen untuk menggunakan hak pilihnya.

6.2. Rekomendasi

Sejalan dengan uraian dalam kesimpulan di depan, penulis merekomendasikan:

1. Mengingat cukup besarnya jumlah pemilih pemula di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 yakni sekitar 9,42%, namun setara dengan 14,02% dari konstituen (penduduk yang memiliki hak pilih) maka pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dukungan atau simpati dari pemilih pemula perlu segera menyosialisasikan rencana ke depannya, melalui penyelenggaraan kegiatan dengan melibatkan calon pemilih pemula.
2. Mengingat pemilih pemula di Provinsi Jawa Timur pada pemilu 2014 mendatang cenderung lebih banyak dari mereka yang berjenis kelamin perempuan, maka pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dukungan atau simpati dari pemilih pemula yang berjenis kelamin perempuan perlu segera menyosialisasikan rencana ke depannya yang berkaitan dengan peningkatan harkat dan martabat kaum perempuan, melalui penyelenggaraan kegiatan dengan melibatkan calon pemilih pemula perempuan.

3. Mengingat masih ada sekitar 15% Responden yang belum secara tegas akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan/atau pemilukada di masa mendatang (Tahun 2014 dan/atau sesudah tahun 2014), maka pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dukungan atau simpati dari pemilih pemula perlu segera membuat kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan kesadaran para pemilih pemula terhadap perlunya partisipasi politik mereka dalam hidup berbangsa dan bernegara. Transformasi pola pendidikan bagi pemilih pemula sangat diperlukan mengingat pemilih sebagian besar kering dari pengetahuan politik dengan segala implikasinya. Pelakunya bisa dari pemerintah, swasta dan masyarakat.
4. Mengingat baru delapan (8) partai yang populer pada Responden penelitian ini, maka partai politik (lebih-lebih yang belum populer) jika ingin mendapatkan dukungan atau simpati dari pemilih pemula perlu menyosialisasikan rencana ke depannya yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan para pemilih pemula, melalui penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan calon pemilih pemula.
5. Mengingat harapan Responden terhadap partai politik pemenang pemilu yang akan datang adalah dominan ingin bebas dari KKN, lebih bertanggung jawab, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, maka setiap partai politik perlu menyosialisasikan programnya yang berkaitan dengan: pemberantasan KKN, dan pelaksanaan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan aspirasi dan/atau kepentingan rakyat.
6. Mengingat harapan Responden terhadap calon anggota legislatif terpilih adalah dominan ingin punya Anggota Legislatif yang: Jujur, Bertanggung jawab, Tidak KKN, dan Memperjuangkan aspirasi rakyat, maka masing-masing partai perlu melakukan seleksi yang baik atau akurat dalam rangka mendapatkan kader atau calon Anggota Legislatif yang sesuai dengan harapan pemilih.
7. Mengingat harapan Responden terhadap Calon Kepala Daerah adalah dominan ingin punya Kepala Daerah yang lebih baik dari sebelumnya, bisa memajukan daerahnya, dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka bagi mereka yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan ingin

mendapat dukungan atau simpati dari pemilih pemula perlu mengedepankan atau memprioritaskan program kerja untuk memajukan daerah dan/atau mensejahterakan masyarakat.

8. Mengingat harapan Responden terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah dominan ingin punya Presiden dan Wakil Presiden yang bisa: memberantas KKN, memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka bagi mereka yang ingin mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan ingin mendapat dukungan dari pemilih pemula perlu mengedepankan atau memprioritaskan program untuk memberantas KKN, memajukan Indonesia, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Mengingat harapan Responden terhadap penyelenggaraan pemilu dan/atau pilukada yang akan berlangsung di masa mendatang adalah dominan ingin: LUBER dan JURDIL, tidak ada politik uang, tidak ada manipulasi suara, maka KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan institusinya agar mampu melaksanakan pemilu secara LUBER dan JURDIL, bebas dari politik uang, dan tidak ada manipulasi suara.
10. Manajemen Data Pemilih Pemula. Hal ini relevan dengan ketersediaan data jumlah penduduk menurut umur tunggal dan jenis kelamin. Mengingat belum tertibnya administrasi dan/atau registrasi kependudukan di tiga Kabupaten yang dijadikan tempat penelitian ini, maka langkah bijaknya bila Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat program Komputerisasi Kependudukan di Jawa Timur, sehingga data penduduk masing-masing daerah selalu valid.
11. Memerankan Pemilih Pemula sebagai kekuatan kontrol politik bukan sebaliknya, pemilih pemula sebagai komoditas. Kaderisasi tokoh bangsa bisa dimulai dari pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muryanto dan Bobby Irwansyah : “*Hubungan Tingkat Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 Kota Medan di Lingkungan VI Kelurahan Pusat Pasar Medan Kecamatan Medan Kota*” (Makalah Penelitian, 2006)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi PT. Gramedia, Jakarta, 2008.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Sebuah Bunga Rampai, PT. Gramedia, Jakarta, 1982
- Fathurrohman, Deden dan Wawan Sobri, *Pengantar Ilmu Politik*, UMM Press, Malang, 2002
- Legowo, TA, “*Menakar Kualitas Hasil Pilkada : Beberapa Pokok Catatan*”, Makalah Seminar, 2005
- Mas’oed, Mohtar dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989
- Mufti, M. Mubarak, *Sukses Pilkada*, PT. Java Pustaka Media Tama, Surabaya, 2005
- Kurnardi Moh. Dan Harmailiy Ibrahim, 1994, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah : Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, DIA FISIP UI Jakarta, 2006
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
-

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009

- Raga Maran, Rafuel. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Rahman H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Romli, Lili, “*Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*”. Analisis CSIS, Vol 34, No. 3, 2005
- Sastroatmodjo, Sudijono.1995. *Partisipasi Politik*. Semarang:IKIP Semarang Press
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Surbakti, Ramlan, “*Himpunan Teori-Teori Politik*” (Handout Perkuliahan yang tidak dipublikasikan, Universitas Airlangga, Tanpa Tahun)
- Suryadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik Sejarah Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta:IRCiSoD
- Syarbaini, Syahrial,Dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyudi, Bambang : “*Partisipasi Politik Elit Politik Perempuan Kota Semarang Dalam Pemilu Tahun 2004*” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2007)
-

II. HARAPAN RESPONDEN PADA DAN/ATAU SETELAH PEMILU YANG AKAN DATANG

1. Bagaimanakah Komitmen anda dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif pada tahun 2014 yang akan datang? (Lingkari jawaban yang benar)

- Jawab: a. Ikut memilih, ----lanjutkan ke pertanyaan nomor 2 , 3, dan 4 ----
b. Tidak ikut memilih, ----lewati pertanyaan nomor 2, 3, dan 4----
c. Belum tahu,d. Tidak menjawab.

2. Calon Legislatif dari Partai apa atau yang mewakili Partai apa yang akan pilih dalam Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2014 yang akan datang?

Jawab: Calon Legislatif dari Partai

3. Bagaimana sikap anda, seandainya anda tidak mengenal calon Legislatif yang diusung oleh Partai yang anda sukai?.

Jawab:

.....

4. Apa yang mendorong atau memotivasi anda untuk ikut memilih Calon Legislatif yang akan datang?

Jawab:

.....

5. Apa yang mendorong atau memotivasi anda untuk tidak ikut memilih Calon Legislatif yang akan datang?

Jawab:

.....

6. Bagaimanakah Komitmen anda dalam Pemilihan Umum Calon Bupati/ Walikota yang akan datang? (Lingkari jawaban yang benar)

- Jawab:a. Ikut memilih, ----lanjutkan ke pertanyaan nomor 7 ----
b. Tidak ikut memilih, ----lewati pertanyaan nomor 7----
c. Belum tahu,d. Tidak menjawab.

7. Apa yang mendorong atau memotivasi anda untuk ikut memilih Calon Bupati/ Walikota daerah anda yang akan datang?

Jawab:

.....

8. Apa yang mendorong atau memotivasi anda untuk tidak ikut memilih Calon Bupati/ Walikota daerah anda yang akan datang?

Jawab:

.....

9. Bagaimanakah Komitmen anda dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Provinsi Jawa Timur yang akan datang? (Lingkari jawaban yang benar)

- Jawab: a. Ikut memilih, ----lanjutkan ke pertanyaan nomor 10 ----
b. Tidak ikut memilih, ----lewati pertanyaan nomor 10 ----
c. Belum tahu,d. Tidak menjawab.

10. Apa yang mendorong atau memotivasi anda untuk ikut memilih Calon Gubernur Provinsi Jawa Timur yang akan datang?

Jawab:

.....

11. Apa yang mendorong atau memotivasi anda untuk tidak ikut memilih Calon Gubernur Provinsi Jawa Timur yang akan datang?

Jawab:

.....

12. Bagaimanakah Komitmen anda dalam Pemilihan Umum Calon Presiden Indonesia yang akan datang? (Lingkari jawaban yang benar)

Jawab: a. Ikut memilih, ----lanjutkan ke pertanyaan nomor 13 ----

b. Tidak ikut memilih, ----lewati pertanyaan nomor 13----

c. Belum tahu,d. Tidak menjawab.

13. Apa yang mendorong atau memotivasi anda untuk ikut memilih Calon Presiden Indonesia yang akan datang?

Jawab:

.....

14. Apa yang mendorong atau memotivasi anda untuk tidak ikut memilih Calon Presiden Indonesia yang akan datang?

Jawab:

.....

15. Bagaimana harapan anda terhadap Partai Politik Peserta dan/atau Pemenang Pemilihan Umum yang akan datang?

Jawab:

.....

16. Bagaimana harapan anda terhadap Anggota Legislatif yang terpilih pada Pemilihan Umum yang akan datang?

Jawab:

.....

17. Bagaimana harapan anda terhadap Bupati/ Walikota daerah anda yang terpilih pada Pemilihan Umum yang akan datang?

Jawab:

.....

18. Bagaimana harapan anda terhadap Gubernur Provinsi Jawa Timur yang terpilih pada Pemilihan Umum yang akan datang?

Jawab:

.....

19. Bagaimana harapan anda terhadap Presiden Indonesia yang terpilih pada Pemilihan Umum yang akan datang?

Jawab:

.....

20. Bagaimakah opini/pendapat anda tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif yang anda ketahui selama ini?

Jawab:

.....

21. Bagaimakah opini/pendapat anda tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/ Walikota daerah anda yang anda ketahui selama ini?

Jawab:

.....

22. Bagaimakah opini/pendapat anda tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Jawa Timur yang anda ketahui selama ini?

Jawab:

.....

23. Bagaimakah opini/pendapat anda tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Indonesia yang anda ketahui selama ini?

Jawab:

.....

24. Bagaimakah harapan anda terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan/atau eksekutif yang akan datang?

Jawab:

.....